



**PEMETAAN OPINI, TEMUAN BPK RI, KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH, DAN DANA INSENTIF DAERAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Trisna Ayu Oktavia  
NIM. 120810301053**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Rasa syukur dan terima kasih skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Ninik Nurnilawati dan Bapak M.Thoiful Bari, M.Pd atas doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya;
2. Kakak saya Nila Kartiningrum, Adik saya Achmad Rohadi, dan seluruh anggota keluarga atas doa, semangat, dan dukungannya;
3. Guru-guru di kehidupan penulis atas ilmu, pengetahuan, dan jasanya yang telah diberikan;
4. Sahabat-sahabatku, terimakasih atas doa, bantuan, dukungan dan semangatnya;
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya  
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

Barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja, maka di malam itu ia  
diampuni

( H.R Ahmad)

*Learn from yesterday, Live from today, and hope for tomorrow*

(Albert Eistein)

Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan seekor burung tak bersayap

(Salvador Dali)

Kita mempunyai lebih banyak peluang yang tersedia di setiap momen daripada yang

kita sadari

(Thich Nhat Hanh)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trisna Ayu Oktavia

NIM : 120810301053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pemetaan opini, Temuan BPK RI, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Insentif Daerah Di Indonesia” merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan merupakan hasil plagiarism. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2016

Yang menyatakan,

Trisna Ayu Oktavia

NIM. 120810301053

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul skripsi : PEMETAAN OPINI, TEMUAN BPK RI,  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN DANA  
INSENTIF DAERAH DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Trisna Ayu Oktavia

NIM : 120810301053

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal persetujuan : 29 Maret 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman, SE, M.SA., Ak

NIP. 198207232005501002

Drs. Djoko Supatmoko M.M., Ak

NIP. 195502271984031001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM., Ak.

NIP 107107271995121001

**SKRIPSI**

**PEMETAAN OPINI, TEMUAN BPK RI, KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH, DAN DANA INSENTIF DAERAH DI INDONESIA**

Oleh :

Trisna Ayu Oktavia

NIM. 120810301053

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Taufik Kurrohman., SE., M.SA., Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Supatmoko., M.M., Ak

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMETAAN OPINI, TEMUAN BPK RI, KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH, DAN DANA INSENTIF DAERAH DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Trisna Ayu Oktavia  
NIM : 120810301053  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

25 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

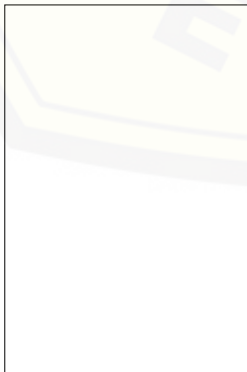
Susunan Panitia Penguji

Ketua : Andriana., SE, M.Sc , Ak (.....)  
NIP. 19820929 201912 2 002

Sekretaris : Kartika., SE, M.Sc, Ak (.....)  
NIP. 19820207 200812 2 002

Anggota : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak (.....)  
NIP. 19640809 199003 2 001

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



Dr. Mohammad Fathorrazi M.Si.  
NIP. 19630614 199002 1 001

**Trisna Ayu Oktavia**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud atas komitmen akuntabilitas dan transparansi yang mencerminkan bagaimana kondisi keuangan daerah tersebut beserta sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi kemandirian keuangan daerah, melihat pemerataan kualitas LKPD melalui opini, temuan BPK RI yang diidentifikasi selama periode 2014, mengetahui pemerataan DID tahun 2014 atas kinerja yang telah dicapai di Indonesia. Data penelitian menggunakan *purposive sampling* terhadap LKPD di Indonesia tahun 2014 yang dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu kepada BPK RI. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif intepretif dimana analisa data menggunakan statistic deskriptif, dan penyajian data menggunakan SIG. Hasil pemetaan menunjukkan tidak ada pemerataan kualitas opini, temuan BPK RI, kemandirian keuangan daerah, dan pemerolehan DID di Indonesia. Di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa yang tertib dalam pengelolaan keuangan negara.

**Kata Kunci** : LKPD, Opini, Temuan BPK RI, Kemandirian keuangan daerah, DID



**Trisna Ayu Oktavia**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## **ABSTRACT**

*Local Government Finance Report (LKPD) as a manifestation of the commitment to accountability and transparency that reflects how the financial condition of the area along with its resources. This study aims to look at the condition of local financial independence, quality equalization LKPD see through opinions, BPK findings identified during the period 2014, 2014 DID know the equalization of performance that has been achieved in Indonesia. The sample selection using purposive sampling of LPKD 2014 reported fully and timely to the BPK. Research conducted using descriptive method intepretif and presentation of data using GIS. Mapping results showed no quality equalization opinion, BPK's findings, local financial independence, and the acquisition of DID in Indonesia. In Indonesia is still concentrated in Java that discipline in public finance management.*

*Keyword : Local Government Finance Report (LKPD), Opinion, BPK RI Finding's, Independence of Financial Region, Insentif Funds of Distric in Indonesia*

## RINGKASAN

**Pemetaan Opini, Temuan BPK RI, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Insentif Daerah di Indonesia**, Trisna Ayu Oktavia, 120810301053, 2016, 53 Halaman, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagian dari sorotan publik, karena masyarakat yang semakin cerdas menuntut adanya transparansi. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa setiap BLU dan entitas pelapor harus mempertanggungjawabkan rupiah yang digunakan untuk pembangunan dan operasional pemerintahan, diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD wajib dilaporkan kepada BPK RI secara tepat waktu untuk memperoleh opini dan diperiksa kewajaran penyajian keuangan (UUD RI No. 15 Tahun 2004). Kondisi keuangan daerah akan tercermin dalam LKPD yang sudah mempunyai opini yang dipengaruhi oleh temuan-temuan BPK RI, hal ini akan berdampak dalam pemerolehan penyaluran dana khusus yakni Dana Insentif Daerah (DID). DID mampu memotivasi daerah agar meningkatkan prestasi keuangan. Pemerintah daerah di Indonesia yang berjumlah 552 memiliki potensi SDM dan SDA yang berbeda-beda, maka dari itu muncul perbedaan pencapaian kualitas LKPD. Agar mampu menggambarkan kondisi keuangan di Indonesia Tahun 2014 maka digunakanlah piranti lunak SIG.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan opini beserta pemerataan kualitas LKPD yang diberikan oleh BPK RI di Indonesia, untuk memetakan temuan-temuan yang diidentifikasi oleh BPK RI di Indonesia, untuk memetakan dan mengetahui sejauh mana kemandirian keuangan, dan memetakan DID di Indonesia. Diharapkan akan bermanfaat terutama bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi yang ada. Populasi dalam penelitian ini merupakan LKPD 2014

di Indonesia. Sampel diperoleh dengan menggunakan purposive sampling dan menghasilkan 504 sampel LKPD.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif interpretif, dimana metode analisa data yang digunakan statistik deskriptif dan uji regresi logistik ordinal. Penyajian data menggunakan piranti lunak GIS yang akan memetakan kondisi keuangan daerah. Hasil dari pemetaan menunjukkan bahwa di Indonesia pemerataan masih belum sepenuhnya berjalan yang berdampak pada ketimpangan, Masih terpusat di Pulau Jawa secara keseluruhan variabel. Terdapat 18% daerah yang sudah tertib dalam pengelolaan keuangan, namun berkemandirian sangat kurang. Hal demikian mengindikasikan bahwa daerah yang tidak memperoleh DID akan berpeluang untuk mendapatkan rasio yang lebih baik.

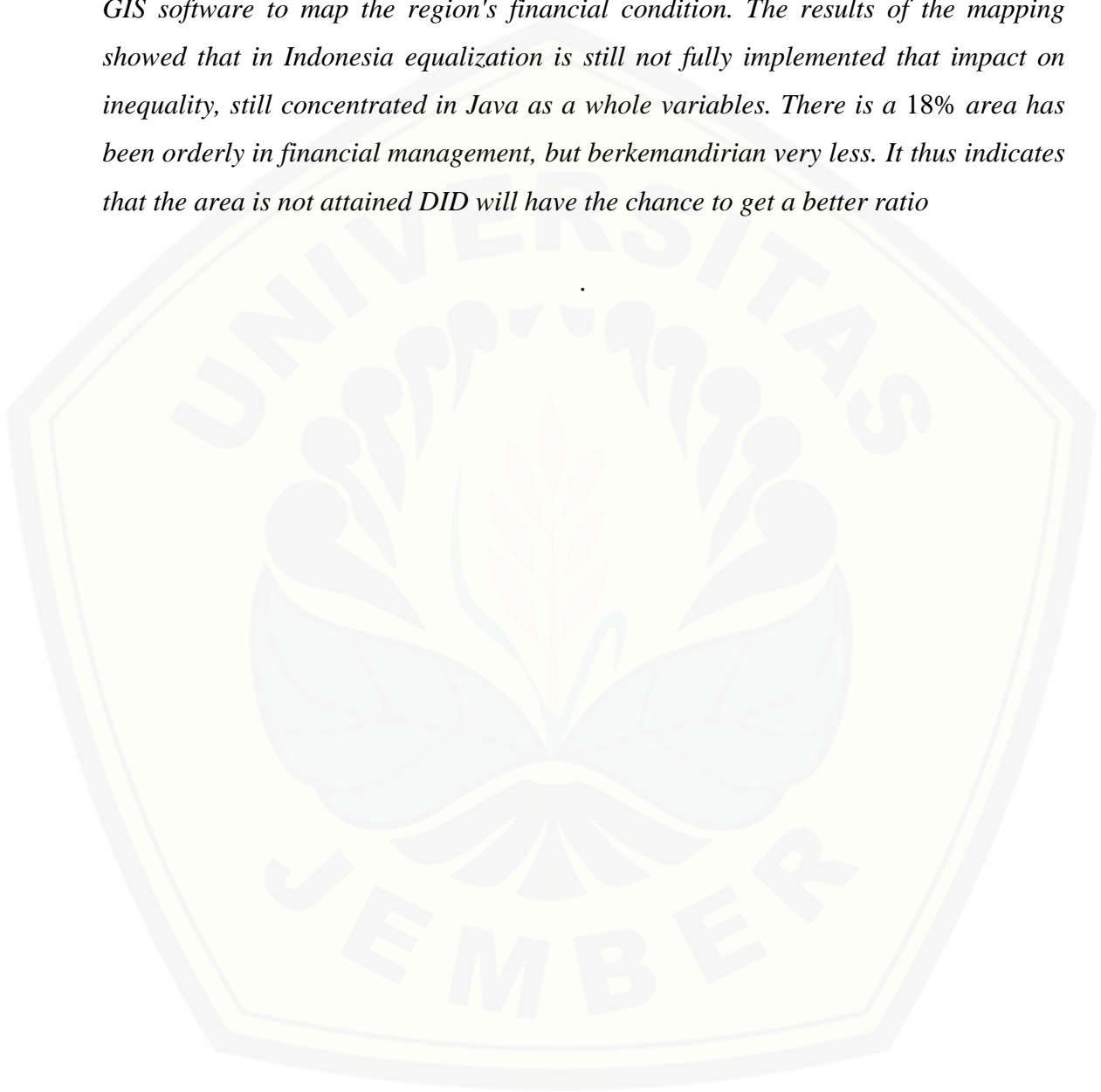
## SUMMARY

*The Mapping of opinions, BPK RI findings, Independence of Financial Region, Incentive Funds of Distric in Indonesia.* Trisna Ayu Oktavia, 120810301053, 2016, 53 pages, Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

*The financial statements of local government is also part of the public spotlight, because people are getting smarter demands for transparency. In Government Regulation No. 71 of 2010 on SAP states that every BLU and the reporting entity must account rupiah used for the construction and operation of government, embodied in the Local Government Finance Report (LKPD). LKPD shall be reported to the BPK on a timely basis to obtain fairness opinions and examined the financial presentation (Constitution No. 15 of 2004). The financial condition of the area will be reflected in LKPD who already have opinions influenced by the findings of the BPK, it will affect the distribution of special funds in acquiring the Regional Incentive Fund (DID). DID able to motivate regions to improve financial performance. The local government in Indonesia totaling 552 have the potential of human resources and natural resources is different, so it appears the difference in quality achievement LKPD. To be able to describe the financial situation in Indonesia in 2014 and then was used GIS software.*

*The purpose of this study was to map the equalization along opinion LKPD quality provided by BPK RI in Indonesia, to map the findings identified by BPK RI in Indonesia, to map and determine the extent of financial independence, and charted DID in Indonesia. Is expected to be particularly useful for the government to evaluate and improve the existing conditions. The population in this study is LKPD 2014 in Indonesia. Samples were obtained by using purposive sampling and generate 504 samples LKPD.*

*This research was descriptive intepretif, wherein the method anallisa data used descriptive statistics and ordinal logistic regression. Presentation of data using GIS software to map the region's financial condition. The results of the mapping showed that in Indonesia equalization is still not fully implemented that impact on inequality, still concentrated in Java as a whole variables. There is a 18% area has been orderly in financial management, but berkemandirian very less. It thus indicates that the area is not attained DID will have the chance to get a better ratio*



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pemetaan Opini, Temuan BPK RI, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Insentif Daerah di Indonesia”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Mohammad Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember,
2. Dr. Moehammad Fathorazi, Msi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Ahmad Roziq, SE.,M.M.,Ak selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembing Akademik;
6. Taufik Kurrohman, SE., M. SA., Ak selaku Dosen Pembimbing Utama yang sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun, sosok inspiratif yang telah memberikan banyak kesempatan dalam kehidupan peneliti;
7. Drs. Djoko Supatmoko, SE., M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun;
8. Andriana., SE., M.Sc, Ak dan Dr.Purnamie Titisari., SE., M.M selaku dosen Fakultas Ekonomi yang sabar membimbing, memberikan arahan positif, dan semangat;

9. Seluruh dosen dan staf jurusan akuntansi atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan;
10. Kedua orang tuaku M. Thoiful Bari, M.Pd dan Ninik Nurnilawati yang tersayang dan saya hormati, serta adik dan kakak yang telah memberikan segala upaya baik dalam bentuk moral, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, doa, dan semangat tiada tara;
11. Seluruh keluarga besar atas kasih sayang dan doa tulusnya;
12. Guru-guru di kehidupan penulis atas jasanya yang tiada tara;
13. Seluruh sahabatku Kuncoro, Destya, Desy, Anjang, Prambayu, Widi, Mahartri, Afiatin, Nico, Ragil, Dinda atas doa, semangat dan dukungannya;
14. Teman-teman Akuntansi 2012, Kos 2C6, HMJA;
15. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

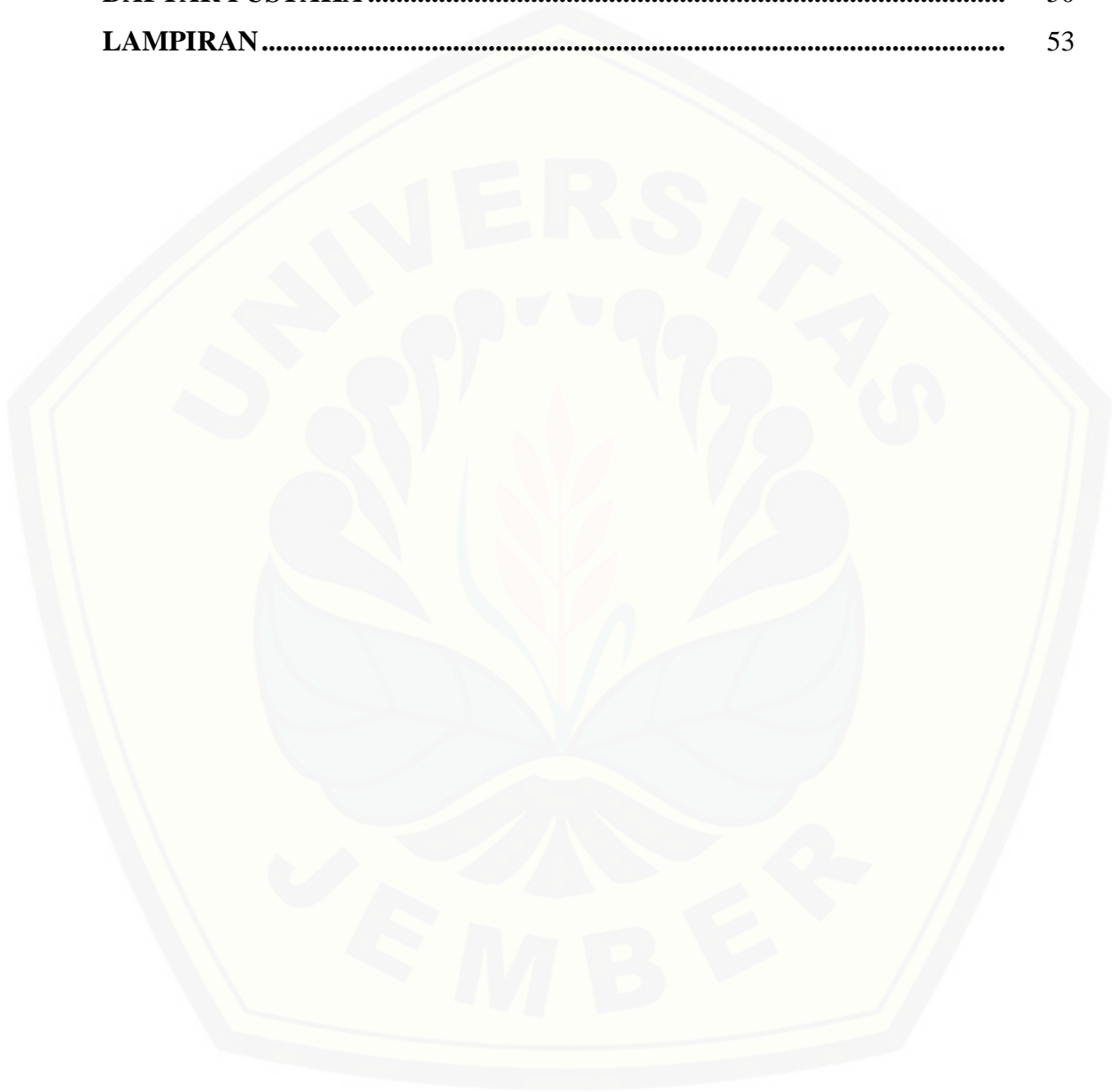
DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUANSKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>SUMMARY</b> .....	xii
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	8
2.1.2 Keuangan Daerah .....	9
2.1.3 Akuntansi Anggaran Sektor Publik.....	10



2.1.4 Akuntansi Keuangan Daerah .....	10
2.1.5 Opini Audit BPK RI .....	11
2.1.6 Kemandirian Kuangan Daerah .....	12
2.1.7 Dana Insentif Daerah .....	13
2.2 Penelitian Terdahulu .....	14
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Jenis dan Pengumpulan Data.....	16
3.3 Objek Penelitian .....	17
3.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	18
3.4.1 Opini atas LKPD .....	18
3.4.2 Temuan BPK RI.....	19
3.4.3 Kemandirian Keuangan Daerah .....	19
3.4.4 Dana Insentif Daerah.....	20
3.5 Keabsahan Data.....	21
3.6 Metode Analisis Data.....	21
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	22
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian (Negara Indonesia) .....	24
4.2 Hasil Penelitian .....	25
4.2.1 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD di Indonesia .....	25
4.2.2 Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah di Indonesia .....	29
4.2.3 Dana Insentif Daerah di Indonesia .....	36
4.2.4 Kemandirian Keuangan daerah di Indonesia.....	38
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	42
<b>BAB 5 KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan .....	48

5.2 Keterbatasan .....	49
5.3 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	22
4.1 Peta Negara Indonesia.....	24
4.2 Peta Opini LKPD di Indonesia.....	26
4.3 Peta Temuan BPK RI Atas LKPD di Indonesia.....	36
4.4 Peta Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia.....	37
4.5 Peta Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia.....	39

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	15
3.1 Pewarnaan Opini LKPD .....	18
3.2 Pewarnaan Temuan BPK RI .....	19
3.3 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah .....	20
3.4 Pewarnaan Kemandirian Keuangan Daerah .....	20
4.1 Rekap Opini LKPD di Indonesia .....	27
4.2 Rekap Permasalahan Utama SPI Pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	30
4.3 Rekap Permasalahan Utama Kerugian Pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	32
4.4 Rekap Permasalahan Utama Potensi Kerugian Pada Pemerintah Daerah di Indonesia .....	32
4.5 Rekap Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan Pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	33
4.6 Rekap Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	34
4.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan .....	35
4.8 Rekap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia.....	41

**DAFTAR LAMPIRAN**

A. Opini LKPD di Indonesia .....	53
B. Temuan Pokok BPK RI atas LKPD di Indonesia .....	60
C. Permasalahan Utama SPI pada Pemerintah Daerah di Indonesia .....	74
D. Permasalahan Utama Kerugian Pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	78
E. Permasalahan Utama Potensi Kerugian Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia .....	84
F. Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	88
G. Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi pada Pemerintah Daerah di Indonesia .....	91
H. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia .....	93
I. Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 .....	113
J. Peta Opini Kabupaten /Kota di Indonesia.....	117
K. Peta Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Indonesia.....	120
L. Peta Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia .....	124
M. Peta DID Kabupaten/Kota di Indonesia.....	128

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang laporan keuangan, tidak hanya laporan keuangan perusahaan *go publik* saja yang menjadi sorotan publik. Namun laporan keuangan pemerintah daerah juga bagian dari sorotan publik, karena masyarakat yang semakin cerdas menuntut adanya transparansi. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Badan Layanan Umum dan entitas pelaporan harus mempertanggungjawabkan rupiah atau uang publik yang digunakan untuk pembangunan dan operasional pemerintahan. Hal ini selaras dengan Undang - undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 maka Pemerintahan daerah tingkat kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Daerah. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan yang tentunya termasuk informasi keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran dari pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP, 2000 dalam Halim, 2004). Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dibuat oleh kabupaten/kota sebagai wujud pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah direalisasikan dan memiliki peran penting (akuntabilitas, transparansi, manajemen, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja). Oleh sebab itu, laporan keuangan yang disajikan haruslah dapat memengaruhi keputusan ekonomi, sosial, dan politik (SAP, 2010). Transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perombakan sistem sosial yang dilakukan selama era reformasi (Septariana, 2012) dan diperlukan untuk mewujudkan empat aspek sasaran keuangan negara. Tindakan pemerintah dalam era reformasi adalah melakukan koreksi secara menyeluruh atas sistem keuangan negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru sebagai wujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini di tunjukan dengan meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan dengan mengintegrasikan anggaran negara.

Para pengguna LKPD secara umum dapat dikategorikan, diantaranya masyarakat, wakil rakyat (DPRD), lembaga pengawas dan pemeriksa (BPK), pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah (SAP, 2010). Para pengguna dapat menggunakan laporan kuangan untuk menilai kinerja entitas pelapor salah satunya dengan analisis laporan keuangan. Hasil analisis ini bisa menjadi total ukur dalam menilai : kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Halim, 2013). Berbeda dengan analisis laporan keuangan yang sering dilakukan para *stakeholders* pada laporan keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan pemerintahan jarang dilakukan dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan yang bersifat *private* (Among, 2014).

Sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim,2004:150).

Ketentuan untuk perusahaan *go publik*, tepat waktu merupakan rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan (31 desember) sampai tanggal penyerahan ke bapepam (paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya) (Rachmawati, 2008). Undang-undang No 17 Tahun 2003 mengatur gubernur/bupati/walikota diberitanggungjawab untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun tutup buku. Kewajiban ini diperkuat dengan PMK 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan MK Nomor: PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini diperkuat Undang-undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat 1 dan 2. Laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Termuat dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 11 Ayat 3. Implikasi keterlambatan entitas pelaporan (pemerintah daerah) tidak dapat menerbitkan obligasi daerah karena LKPD dengan opini WTP dan WDP menjadi salah satu syarat, sanksi tertulis dari pihak Menteri Keuangan (DJP,2015), dan penundaan penyaluran dana dalam tahun berjalan (PP No 8, 2006).

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang Keuangan Negara diadakan bebas dan mandiri, pernyataan ini tertuang dalam UUD RI No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1. Pemeriksaan yang menjadi wewenang BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan



tertentu (UUD RI No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1). Pemeriksaan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IHSP, 2014: 7).

BPK berperan penting dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara; mengawal pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel dan transparan; serta memberikan keyakinan yang memadai dalam bentuk opini. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan melihat opini. “BPK RI tidak menyatakan kebenaran atas laporan keuangan, tetapi kewajaran atas laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan proyek/program/kegiatan, menilai efisiensi dan penghematan penggunaan sumber daya, serta menemukan unsur tindak pidana”, jelas Wakil Ketua BPK RI pada acara sosialisasi yang diselenggarakan BPK November 2013 di Provinsi Kalimantan. Namun pemeriksa wajib mengungkapkan dalam laporan pemeriksaan apabila menemukan ketidakpatuhan yang material dan berpengaruh langsung terhadap kewajaran laporan keuangan. Menurut Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri, laporan keuangan di tingkat kabupaten/kota dinilai belum optimal, belum terlalu akuntabel dan transparan. Terlebih lagi untuk tahun 2015 sudah menggunakan sistem akrual yang jauh lebih detail dibanding dengan sistem sebelumnya, hal ini akan berdampak juga pada pelayanan publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa LPKD yang mendapatkan opini WTP oleh BPK, menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara waktu, melaporkan LKPD secara tepat waktu ke pihak BPK, dan mampu mempertahankan kualitas LKPD maka akan mendapatkan Dana Insentif Daerah dengan proporsi yang sudah ditetapkan dalam

Permen tersebut. Dengan adanya *reward* dalam bentuk DID ini, daerah terus berupaya mengelola keuangannya secara lebih baik. Bahkan dalam artikel yang diusung oleh Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah menyebutkan bahwa program DID mampu meningkatkan prestasi daerah. DID mampu memotivasi daerah agar capaian kinerja utamanya optimal. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai penyelewengan DID, karena DID dialokasikan untuk membantu daerah melaksanakan fungsi pendidikan saja.

Pemerintahan Daerah Negara Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota di tahun 2014, jumlah ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya (BPS, 2015). Serta potensi yang dimiliki daerah tidaklah sama serta potensi pendapatan daerah sangat tinggi, hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tinggi pula. Maka dari itu, tuntutan akan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin menjadi sorotan publik. Penilaian kinerja pemerintah juga semakin ditingkatkan sebagai wujud dari akuntabilitas pemerintah daerah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Kurrohman, 2011 tentang pemetaan opini dan rasio kemandirian di Jawa Timur menggunakan pendekatan *Geographic Information System* (GIS). Sedangkan Septariana, 2012 hanya pemetaan opini audit BPK di Jawa Timur dengan penyajian data tabulasi.

Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk melakukan pemetaan opini beserta temuan BPK, Dana Insentif Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya yakni keuangan daerah di Indonesia, menggunakan pendekatan *Geographic Information System* (GIS), dan periode informasi yang akan digunakan yakni tahun 2014. Alasan penulis meneliti di tahun 2014, sebagai bahan penelitian lanjutan dalam mengevaluasi penerapan sistem akrual di tahun 2015. Karena ditakutkan akan terjadi penurunan kualitas LKPD yang akan berdampak pada penurunan kemandirian suatu daerah dan penurunan penerimaan dalam bentuk DID. Maka judul yang akan disusun oleh peneliti adalah “Pemetaan Opini, Temuan - Temuan BPK RI, Dana Insentif Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pemetaan atas opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 di Indonesia?
- b. Bagaimana pemetaan atas temuan-temuan yang diperoleh dari hasil identifikasi laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 di Indonesia?
- c. Bagaimana pemetaan atas dana insentif daerah Tahun 2014 di Indonesia?
- d. Bagaimana pemetaan atas kemandirian keuangan daerah Tahun 2014 di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memetakan opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerataan kualitas LKPD di Indonesia pada periode 2014;
- b. Untuk memetakan temuan-temuan yang diidentifikasi oleh pihak BPK RI di Indonesia periode LKPD 2014;
- c. Untuk memetakan dana insentif daerah tahun 2014 untuk pemerintah daerah di Indonesia;
- d. Untuk memetakan dan mengetahui sejauh mana kemandirian keuangan daerah atas kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah di Indonesia pada Tahun 2014;

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya;
- b. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan mampu mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas LKPD demi pembangunan daerah yang sinergi, sebagai gambaran atau cerminan dari kinerja pemerintah daerah dibandingkan pemerintah daerah lainnya yang terdapat di Indonesia, mengevaluasi implementasi *accrual basis* antara tahun 2015 dengan tahun 2014, memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan prestasi;
- c. Jika pemerintah daerah mampu memperbaiki temuan-temuan BPK RI dan/atau mempertahankan kualitas LKPD maka akan berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan provinsi dan keuangan daerah.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan teori

#### 2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelolah perusahaan dan principal sebagai pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik (*principal*) adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan *agent* adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai principal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh principal, sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut (Kim dan Verrechia dalam Sulisty, 2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri tersebut.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006). Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi namun lebih banyak menimbulkan *opportunistic* bagi si agen. Pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan di Pemerintahan Daerah Indonesia, sejalan dengan otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Masalah keagenan muncul dikalangan eksekutif dalam penyusunan APBD dan dikalangan legislatif terdapat dua

tinjauan perpektif yakni legislatif sebagai prinsipal dan agen. Kontrak semu merupakan masalah yang muncul dari kalangan legilatif selaku prinsipal dan *political corruption* dalam penyusunan anggaran selaku agen.

### 2.1.2. Keuangan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PP No 58 Tahun 2005). Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah sesuai dengan daerah otonom. Keuangan Daerah yang dimaksud sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Mamesh (1995:16) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah dalam batas daerah otonom yang dapat dinilai dengan uang beserta kandungannya.

Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pihak pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, yakni anggaran pendapatan dan belanja Negara yang tercantum dalam UU APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik Negara (Halim,

2013:34). Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak pemerintahan terkait, dimulai dari hilir ke hulu dan dimungkin teori keagenan terjadi, sebab para prinsipal bergerak sesuai dengan kehendak agen.

### 2.1.3. Akuntansi Anggaran Sektor Publik

Akuntansi sektor publik meliputi akuntansi keuangan lembaga non profit dan pemerintahan. Secara umum, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik ( Afifah, 2010:5). Halim (2004:34) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi bagi pemangku kepentingan. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu dalam bentuk ukuran *financial*. Adapun anggaran yang harus disusun meliputi perencanaan, pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Anggaran digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dan dianggap penting karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang.

Akuntansi anggaran mencatat dan menyajikan akun realisasi kegiatan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya (Halim, 2013:191). Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinue jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Keterkaitan antara keuangan negara dan anggaran negara sangatlah erat karena debit kredit keuangan negara berdasarkan pelaksanaan anggaran negara. Hal ini yang menjadikan APBN dan APBD sangat penting di sektor publik terutama di pemerintahan.

### 2.1.4. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pelapor

(Gubernur, Bupati, Walikota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal yang berkepentingan (Halim, 2013:34). Pihak eksternal secara umum dapat dikategorikan, diantaranya masyarakat, wakil rakyat (DPRD), lembaga pengawas dan pemeriksa (BPK & BPKP), pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah (SAP, 2010). Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah. Pengelolaan/pengurusan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum (APBD) dan pengurusan khusus (Barang-barang inventaris kekayaan daerah).

#### 2.1.5. Opini Audit BPK RI

BPK RI memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan bebas dan mandiri, pernyataan ini tertuang dalam UUD RI No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1 diperkuat dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 23 Huruf E Angka (1). Pemeriksaan yang menjadi wewenang BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (UUD RI No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1). Pemeriksaan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IHSP, 2014:7).

Dalam Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Adapun opini yang dapat diberikan oleh BPK RI (IHSP, 2014:8):

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam suatu hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK



dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelas dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP;

- b. Wajar Dengan Pengecualaian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- c. Tidak Wajar memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP;
- d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini Atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

#### 2.1.6. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pusat, sehingga PAD harus menjadi bagian dari sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara. Menurut Mahi (2000:58) dalam Tangkilisan (2007:82) dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampah PAD masih belum diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Ralatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah;
- b. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah;
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah;
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri tercermin pada kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio yang membandingkan indicator keuangan daerah pada APBD-nya. Kemandirian keuangan daerah akan teranalisis kinerja keuangan daerah dan penilaian terhadap manajemen keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan, terutama berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah secara tepat dan benar.

#### 2.1.7. Dana Insentif Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 menjelaskan Dana Insentif Daerah adalah dana penyesuaian dalam APBN tahun anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Adapun kriteria kinerja terdiri dari :

- a. Kriteria kinerja utama : kinerja mendapatkan opini WTP atau opini WDP dari BPK RI atas LKPD, dan kinerja menetapkan peraturan daerah mengenai APBD secara tepat waktu;
- b. Kriteria kinerja keuangan : kinerja meningkatkan atau mempertahankan kualitas LKPD untuk memperoleh opini WTP atau WDP dari BPK RI, kinerja menetapkan peraturan daerah mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, kinerja mencapai kenaikan PAD di atas rata-rata nasional, kinerja menyampaikan LKPD kepada BPK RI secara tepat waktu setiap tahunnya;
- c. Kriteria kinerja pendidikan : kinerja mencapai angka partisipasi kasar SD dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau mencapai angka partisipasi kasar

SMP dan sederajatnya di atas rata-rata nasional, kinerja mengurangi jarak IPM terhadap IPM ideal (100) di atas rata-rata nasional;

- d. Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan : kinerja mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, kinerja mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, kinerja kemampuan fiskal daerah terhadap besaran IPM.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang mengenai pemetaan opini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yakni Kurrohman, 2011 meneliti tentang Pemetaan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan dan kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur yang bertujuan untuk mengidentifikasi bidang kinerja manajemen keuangan berdasarkan indentifikasi opini, temuan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan laporan keuangan kabupaten dan kota di Kawasan Jawa Timur dari tahun 2006-2008 dengan menggunakan GIS. Hasil penelitian menunjukkan kinerja yang fluktuatif terhadap prestasi dari opini, temuan, dan rekomendasi dari pemeriksaan hasil laporan keuangan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditujukan oleh membandingkan opini, temuan, dan rekomendasi antara kabupaten dan kota selama tiga tahun anggaran.

Septariana, 2012 meneliti tentang pemetaan opini audit BPK pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan menjelaskan sebaran opini audit BPK. Dari opini yang diperoleh didasarkan pada temuan-temuan yang didapat selama proses pemeriksaan BPK, meliputi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran 2006-2010. Pemaparan hasil penelitian menggunakan tabulasi dan grafik yang akan menunjukkan perkembangan opini dan temuan tiap tahunnya.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Taufik Kurrohman (2011)	Pemetaan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur	Kinerja yang fluktuatif terhadap prestasi dari opini, temuan, dan rekomendasi dari pemeriksaan hasil laporan keuangan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditujukan oleh membandingkan opini, temuan, dan rekomendasi antara kabupaten dan kota selama tiga tahun anggaran.
2	Niegita Septariana (2012)	Pemetaan Opini Audit BPK pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur	Pemaparan hasil penelitian menggunakan tabulasi dan grafik yang akan menunjukkan perkembangan opini dan temuan tiap tahunnya.

## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif interpretif. Dimana metoda yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan, menyiapkan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti (Nazir, 2005 dalam Septariana, 2012). Pendekatan interpretif (Neuman, 2003 dalam Efferin, 2004), beranggapan bahwa pemahaman suatu fenomena sosial yang didapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, dimana teks di sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, atau gambar.

Penelitian ini akan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dan selengkap mungkin mengenai fenomena social tersebut. Penelitian deskriptif akan menangkap ciri khas suatu objek dan/atau subjek, atau suatu kejadian pada waktu data dikumpulkan, ciri khas tersebut mungkin berubah dengan perkembangan waktu. Cara berfikir, cara menginterpretasikan sesuatu, cara berkomunikasi, dan cara berinteraksi para pelaku, menjadi faktor signifikan yang menentukan terbentuknya suatu realita dalam sebuah pendekatan interpretif (Efferin, 2004). Penelitian kualitatif didukung dengan penelitian kuantitatif ini diharapkan menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan didukung dengan uji statistik guna memperkuat fenomena yang ada.

### **3.2 Jenis dan Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media prantara

(Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Data sekunder diperoleh melalui media perantara yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari Opini, Buku II dan Buku III atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diserahkan dan diidentifikasi oleh pihak BPK RI untuk Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia Tahun 2014. Data APBD yang telah diserahkan ke DJPK yang memuat informasi pendapatan guna perhitungan kemandirian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia Tahun 2014. Data mengenai DID diperoleh dari Menteri Keuangan yang mengalokasikan penyaluran DID tahun 2014. Sumber data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data LHP LKPD di Indonesia, maka akan diperoleh informasi mengenai keadaan laporan keuangan pemerintah daerah, temuan atas pemeriksaan BPK, serta opini untuk tiap-tiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia selama periode waktu yang ditentukan peneliti. Berdasarkan data APBD akan diperoleh gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah dan DID yang diperoleh daerah tersebut.

### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2014 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang di laporkan dalam bentuk LHP Semester 1 Tahun 2015, Realisasi APBD 2014 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta alokasi DID 2014 untuk provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang berjumlah 552.

### 3.4 Ruang Lingkup Penelitian

#### 3.4.1 Opini atas LKPD

Opini yang dikeluarkan pihak BPK hanyalah sebatas memberikan pendapat atas kewajaran pelaporan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SAP, ketaatan pada perundang-undangan yang berlaku, dan kehandalan sistem pengendalian intern. BPK akan mengungkapkan jika terdapat ketidakpatuhan yang material hal ini ditunjukkan adanya jumlah temuan oleh pihak BPK yang menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan opini. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas, salah satunya ditunjukkan dengan opini. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas serta entitas pelapor ingin melakukan perbaikan yang disarankan pihak BPK. Opini yang di keluarkan BPK RI meliputi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dalam penelitian ini, kriteria pemetaannya adalah :

Tabel 3.1 Pewarnaan Opini LKPD

Opini	Warna
WTP	Biru Muda
WDP	Orange
TW	Merah
TMP	Hitam

Sumber : IHSP Semester 1 Tahun 2015

#### 3.4.2 Temuan BPK RI

Temuan merupakan suatu kasus atau keadaan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Temuan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hal-hal yang ditemukan oleh BPK dari aktifitas pemeriksaan yang perlu dikaji ulang kembali serta menjadi evaluasi bagi entitas pemerintah daerah. Tujuan daripada temuan BPK RI adalah sebagai alat evaluasi poin-poin penting yang memerlukan pengkajian ulang pada laporan periode berikutnya oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Dan yang paling krusial adalah untuk

mengetahui ada tidaknya kecurangan serta penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengarah ke unsur tindak pidana. Temuan yang dilaporkan pihak BPK atas identifikasi LKPD disajikan berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum dengan kriteria pemetaan :

Tabel 3.2 Pewarnaan Temuan BPK RI

Jumlah Temuan	Warna
1-10	Putih
11-20	Kuning
21-30	Orange
31-40	Merah
41-50	Hitam

*Sumber : Kurrohman, Taufik. 2011*

#### 3.4.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Bisa dikatakan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari eksternal. Salau satu bentuk banuan eksternal yang diterima oleh pemerintah daerah adalah dana insentif daerah. Rasio kemandirian ini di tunjukan dengan seberapa besar PAD yang mampu dihasilkan oleh daerah tersebut di dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pusat.

Dalam penelitian ini rasio kemandirian daerah diukur dengan (Halim, 2008:128) :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintahan Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$



Kriteria Pengukurannya :

Tabel 3.3 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 - 20,00 %	Kurang
20,01 - 30,00 %	Sedang
30,01 - 40,00 %	Cukup
40,01 - 50,00 %	Baik
> 50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM

Tabel 3.4 Pewarnaan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah	Warna
Sangat Kurang	Hitam
Kurang	Merah
Sedang	Orange
Cukup	Kuning
Baik	Hijau Mudah
Sangat Baik	Putih

Sumber : Kurrohman, Taufik. 2011

#### 3.4.4 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah merupakan dana penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Kriteria utama ialah LKPD mendapatkan opini WTP dari BPK RI dan secara berurutan menetapkan APBD secara tepat waktu. DID menjadi salah satu inovasi pemerintahan dalam memotivasi entitas pelapor untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini pemetaan DID menggunakan kriteria yakni terdaftar oleh Kementerian Keuangan sebagai penerima DID di tahun 2014 atau tidak. Jika mendapatkan DID maka akan berwarna biru, sedangkan daerah yang tidak mendapatkan DID berwarna putih.

### 3.5 Keabsahan Data

Menetap keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria, yakni : derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2012:324). Dalam penelitian ini, menggunakan kriteria derajat kepercayaan dengan metoda triangulasi data. Keabsahan data penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaannya melalui sumber artinya membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton dalam Moleong, 2012: 330). Untuk data mengenai informasi opini dan temuan BPK RI tidak dilakukan uji keabsahan data dikarenakan BPK RI satu-satunya lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan atas LKPD di Indonesia sesuai dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2004. Tahapan yang dilakukan yaitu :

- a. Membandingkan data informasi mengenai realisasi PAD yang diperoleh dari DJPK dengan LHP atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diaudit BPK RI;
- b. Memastikan daerah yang menjadi penerima DID sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.07/2014 dengan pelaporan penggunaan DID di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diaudit BPK RI;

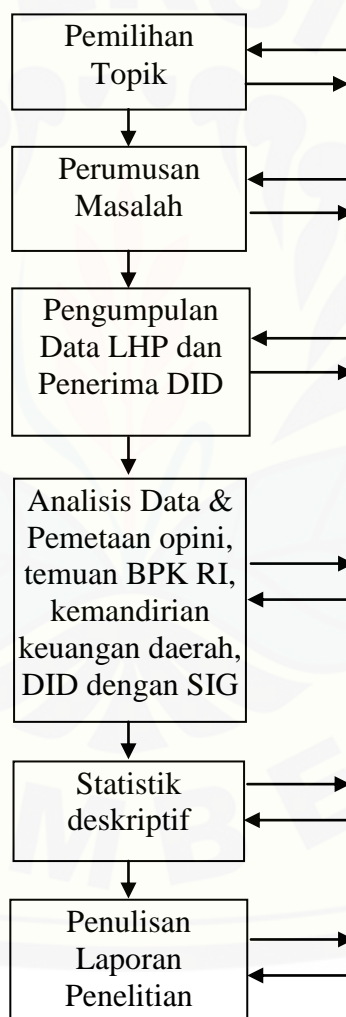
### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data-data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga akan mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014:170). Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal data atau keadaan atau fenomena. Data yang dipresentasikan kedalam bentuk deskriptif tanpa diolah dengan teknik-teknik analisis lainnya. Penelitian ini mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang kondisi sesuai dengan data yang ada dan yang sebenarnya. Pada penelitian ini, menggunakan ukuran nilai maksimum, nilai minimum, skala interval

agar meudahkan dalam pemetaan yang berbasis sistem. Analisa data menggunakan piranti lunak Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk memetakan laporan hasil pemeriksaan LKPD, kemandirian keuangan daerah, dan dana insentif daerah di Indonesia.

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan langkah – langkah penyelesaian masalah dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar di atas menjelaskan bagaimana tahapan penelitian ini dilakukan, garis batas antara tiap langkah lebih flexibel. Pertama, peneliti memulai dengan memilih dan menentukan topik yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti tertarik dengan topik bahasan pemetaan LHP, kemandirian daerah, dan DID di Indonesia. Setelah topik permasalahan ditentukan, maka peneliti mulai menentukan permasalahan yang akan dikupas. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam kerangka perumusan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data yang relevan dengan topik permasalahan. Data yang sudah terkumpul dianalisis untuk memperoleh informasi atas permasalahan yang sudah dirumuskan, memecahkan permasalahan, dan menarik kesimpulan. Analisa data yang pertama menggunakan piranti lunak Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk memetakan LHP LKPD, kemandirian daerah, dan DID di Indonesia. Setelah analisis data selesai, maka tahap akhir dari kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah menulis laporan penelitian, yang berisikan tentang kesimpulan dan pembahasan pemecahan permasalahan.

## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Hasil pemetaan opini atas laporan keuangan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerataan kualitas laporan keuangan daerah berdasarkan opini masih belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, dan NTB dengan pemerolehan 50% opini WTP, 45% opini WDP yang terpusat di Pulau Kalimantan, 1% opini TW di empat Kabupaten dan Kota, dan 4% opini TMP di Pulau Papua;
- b. Hasil pemetaan temuan BPK RI dari hasil identifikasi BPK RI menunjukkan bahwa rata-rata jumlah temuan pokok 11-20, hal ini selaras dengan pemerolehan opini. Temuan pokok ini terdiri dari 5.978 permasalahan SPI dan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp. 3,20 Triliun;
- c. Hasil pemetaan DID di Indonesia menunjukkan hasil belum meratanya penerima DID, hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sulawesi, dari hasil pemetaan ini dapat diketahui hanya 18% daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Hasil pemetaan kemandirian keuangan daerah di Indonesia menunjukkan hasil rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 0,00 – 10,00% dengan kategori sangat kurang dan daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri. Di Indonesia daerah yang sudah lebih baik kemandirian keuangannya adalah Pulau Jawa dan Bali dengan rasio 10,01-20%;

## 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah menggambarkan/memetaan saja untuk opini, temuan BPK RI, kemandirian keuangan daerah, dan dana insentif daerah sehingga fenomena yang dihasilkan hanya berdasarkan data. Tidak melakukan uji pengaruh pemerolehan opini yang didasari oleh jumlah temuan BPK RI dan dana insentif daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Serta periode penelitian di satu periode yakni di Tahun 2014 dengan pelaporan yang berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, sehingga tidak dapat membandingkan dengan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil pemetaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

- a. Melakukan uji pengaruh pemerolehan opini yang didasari oleh jumlah temuan BPK RI dan dana insentif daerah terhadap kemandirian keuangan daerah;
- b. Menambahkan periode sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 yakni LKPD Tahun 2015. Agar dapat membandingkan pemerataan kualitas opini, kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. IHSP. <http://www.bpk.go.id/ihps> [ 3 Januari 2016]
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. IHSP. <http://www.bpk.go.id/ihps> [ 3 Januari 2016]
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data Penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> [ 06 Desember 2015]
- Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah. 2013. Artikel. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/20-program-dana-insentif-daerah-mendorong-prestasi-daerah> [ 02 Januari 2016]
- Dirjen Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2015. Data Keuangan Daerah. [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316) [ 12 Februari 2016]
- Efferin, S. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi : Sebuah pendekatan praktis*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A, 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N dan Supomo, B. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen, Edisi 1*. Yogyakarta: BPF.
- Kementrian Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri. <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/2006/000003> [25 Desember 2015].

- Kementrian Dalam Negeri. 2013. Peraturan Pemerintah (PP). <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2005/12/09/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2005> [25 Desember 2015].
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
- Kurrohman, T. 2011. Pemetaan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 6 (3) Halaman 407-418.
- Mahardika, I.G.N.S. 2013. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan”. Tidak terbitkan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2004. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006: Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Sarwono, J. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi Kupas Tuntas Prosedur-prosedur Regresi dan Decision Trees dalam IBM SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputino.
- Septariana, N. 2012. “Pemetaan Opini Audit BPK pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Sulistyo, W.A.N. 2010. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008”. Tidak Terbitkan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.



Tangkilisan, H.N.S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN A. RINCIAN OPINI DI INDONESIA

No	Kabupaten dan Kota	Opini
1	Pemerintahan Aceh	WDP
2	Kab. Aceh Barat	WTP
3	Kab. Aceh Barat Daya	WDP
4	Kab. Aceh Besar	WTP
5	Kab. Aceh Jaya	WTP
6	Kab. Aceh Selatan	WDP
7	Kab. Aceh Singkil	WTP
8	Kab. Aceh Tamiang	WTP
9	Kab. Aceh Tengah	WTP
10	Kab. Aceh Tenggara	WDP
11	Kab. Aceh Timur	WTP
12	Kab. Aceh Utara	WDP
13	Kab. Bener Meriah	WTP
14	Kab. Bireuen	WTP
15	Kab. Gayo Lues	WTP
16	Kab. Nangan Raya	WTP
17	Kab. Pidie	WDP
18	Kab. Pidie Jaya	WDP
19	Kab. Simeulue	WDP
20	Kota Banda Aceh	WTP
21	Kota Langsa	WTP
22	Kota Lhokseumawe	WTP
23	Kota Sabang	WTP
24	Kota Subulussalam	WTP
25	Provinsi Sumatra Utara	WTP
26	Kab. Asahan	WTP
27	Kab. Batubara	TMP
28	Kab. Dairi	WTP
29	Kab. Deli Serdang	WDP
30	Kab. Humbang Hasundutan	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
31	Kab. Karo	WDP
32	Kab. Labuhanbatu	WTP
33	Kab. Labuhanbatu Sel.	WTP
34	Kab. Langkat	WDP
35	Kab. Nias	WDP
36	Kab. Padang Lawas Utara	WDP
37	Kab. Pak Pak Barat	WTP
38	Kab. Samosir	WDP
39	Kab. Serdang Bedagai	WTP
40	Kab. Simalungun	WDP
41	Kab. Tapanuli Selatan	WTP
42	Kab. Tapanuli Tengah	WDP
43	Kab. Tapanuli Utara	WTP
44	Kota Binjai	WTP
45	Kota Gunungsitoli	WDP
46	Kota Medan	WTP
47	Kota Padangsidempuan	WDP
48	Kota Pematangsiantar	WTP
49	Kota Sibolga	WTP
50	Kota Tebing Tinggi	WTP
51	Provinsi Sumatra Barat	WTP
52	Kab. Agam	WTP
53	Kab. Dharmasraya	WDP
54	Kab. Kepulauan Mentawai	WDP
55	Kab. Lima Puluh Kota	WDP
56	Kab. Padang Pariaman	WTP
57	Kab. Pasaman	WTP
58	Kab. Pasaman Barat	WDP
59	Kab. Pesisir Selatan	WTP
60	Kab. Sijunjung	WDP
61	Kab. Solok	WDP
62	Kab. Solok Selatan	WDP
63	Kab. Tanah Datar	WTP
64	Kota Bukit Tinggi	WTP
65	Kota Padang	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
66	Kota Padang Panjang	WDP
67	Kota Pariaman	WDP
68	Kota Payakumbuh	WTP
69	Kota Sawahlunto	WDP
70	Kota Solok	WDP
71	Provinsi Riau	WTP
72	Kab. Bengkalis	WTP
73	Kab. Indragiri Hilir	WDP
74	Kab. Indragiri Hulu	WDP
75	Kab. Kampar	WDP
76	Kab. Kepulauan Meranti	WTP
77	Kab. Kuantan Singingi	WTP
78	Kab. Pelalawan	WTP
79	Kab. Rokan Hilir	WDP
80	Kab. Rokan Hulu	WTP
81	Kab. Siak	WTP
82	Kota Dumai	WDP
83	Kota Pekanbaru	WDP
84	Provinsi Jambi	WTP
85	Kab. Batang Hari	WDP
86	Kab. Bungo	WDP
87	Kab. Kerinci	WTP
88	Kab. Merangin	WDP
89	Kab. Muaro Jambi	WDP
90	Kab. Sarolangun	WDP
91	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP
92	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP
93	Kab. Tebo	WDP
94	Kota Jambi	WDP
95	Kota Sungai Penuh	WTP
96	Provinsi Sumatra Selatan	WTP
97	Kab. Banyuasin	WTP
98	Kab. Empat lawang	WDP
99	Kab. Lahat	WTP
100	Kab. Muara Enim	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
101	Kab. Musi Banyuasin	WTP
102	Kab. Musi Rawas	WTP
103	Kab. Musi Rawas Utara	TMP
104	Kab. Ogan Ilir	WTP
105	Kab. Ogan Kemerling ilir	WTP
106	Kab. Ogan Kemerling Ulu	WDP
107	Kab. OKU Selatan	WTP
108	Kab. OKU Timur	WTP
109	Kab. Penukal Arab Lematang Ilir	TMP
110	Kota Lubuk Linggau	WTP
111	Kota Pagar Alam	WTP
112	Kota Palembang	WTP
113	Kota Prabumulih	WTP
114	Provinsi Bengkulu	WTP
115	Kab. Bengkulu Selatan	WTP
116	Kab. Bengkulu Tengah	WTP
117	Kab. Bengkulu Utara	WTP
118	Kab. Kaur	WTP
119	Kab. Kepahiang	WDP
120	Kab. Lebong	WDP
121	Kab. Mukomuko	WDP
122	Kab. Rejang Lebong	WDP
123	Kab. Seluma	TW
124	Kota Bengkulu	WDP
125	Provinsi Lampung	WTP
126	Kab. Lampung Barat	WTP
127	Kab. Lampung Selatan	WDP
128	Kab. Lampung Tengah	WDP
129	Kab. Lampung Timur	WDP
130	Kab. Lampung Utara	WDP
131	Kab. Mesuji	WTP
132	Kab. Pesawaran	WDP
133	Kabupaten Pesisir Barat	TMP
134	Kab. Pringsewu	WDP
135	Kab. Tanggamus	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
136	Kab. Tulang Bawang	WTP
137	Kab. Tulang Bawang Barat	WTP
138	Kab. Way Kanan	WTP
139	Kota Bandar Lampung	WTP
140	Kota Metro	WTP
141	Provinsi Bangka Belitung	WDP
142	Kab. Bangka	WDP
143	Kab. Bangka Barat	WTP
144	Kab. Bangka Selatan	TMP
145	Kab. Bangka Tengah	WDP
146	Kab. Belitung	WDP
147	Kab. Belitung Timur	TW
148	Kota Pangkal Pinang	WDP
149	Provinsi Kepulauan Riau	WTP
150	Kab. Bintan	WTP
151	Kab. Karimun	WTP
152	Kab. Anambas	WDP
153	Kab. Lingga	WDP
154	Kab. Natuna	WTP
155	Kota Batam	WTP
156	Kota Tanjungpinang	WTP
157	Provinsi DKI Jakarta	WDP
158	Provinsi Jawa Barat	WTP
159	Kab. Bandung	WDP
160	Kab. Bandung Barat	WDP
161	Kab. Bekasi	WTP
162	Kab. Bogor	WDP
163	Kab. Ciamis	WTP
164	Kab. Cianjur	WTP
165	Kab. Cirebon	WDP
166	Kab. Garut	WDP
167	Kab. Indramayu	WDP
168	Kab. Karawang	WDP
169	Kab. Kuningan	WTP
170	Kab. Majalengka	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
171	Kab. Pangandaran	WDP
172	Kab. Purwakarta	WDP
173	Kab. Subang	TMP
174	Kab. Sukabumi	WTP
175	Kab. Sumedang	WTP
176	Kab. Tasikmalaya	WTP
177	Kota Bandung	WDP
178	Kota Banjar	WTP
179	Kota Bekasi	WDP
180	Kota Bogor	WDP
181	kota Cimahi	WTP
182	Kota Cirebon	WDP
183	Kota Depok	WTP
184	Kota Sukabumi	WTP
185	Kota Tasikmalaya	WDP
186	Provinsi Jawa Tengah	WTP
187	Kab. Banjarnegara	WTP
188	Kab. Banyumas	WTP
189	Kab. Batang	WDP
190	Kab. Blora	WTP
191	Kab. Boyolali	WTP
192	Kab. Brebes	WDP
193	Kab. Cilacap	WDP
194	Kab. Demak	WDP
195	Kab. Grobogan	WDP
196	Kab. Jepara	WTP
197	Kab. Karanganyar	WTP
198	Kab. Kebumen	WDP
199	Kab. Kendal	WDP
200	Kab. Klaten	WDP
201	Kab. Kudus	WTP
202	Kab. Magelang	WDP
203	Kab. Pati	WDP
204	Kab. Pekalongan	WDP
205	Kab. Pemasang	WDP
206	Kab. Purbalingga	WDP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
207	Kab. Purworejo	WTP
208	Kab. Rembang	WDP
209	Kab. Semarang	WTP
210	Kab. Sragen	WDP
211	Kab. Sukoharjo	WDP
212	Kab. Tegal	WDP
213	Kab. Temanggung	WTP
214	Kab. Wonogiri	WDP
215	Kab. Wonosobo	WDP
216	Kota Magelang	WDP
217	Kota Pekalongan	WDP
218	Kota Salatiga	WDP
219	Kota Semarang	WDP
220	Kota Surakarta	WTP
221	Kota Tegal	WDP
222	Prov DIY	WTP
223	Kab. Bantul	WTP
224	Kab. Gunung Kidul	WDP
225	Kab. Kulon Progo	WTP
226	Kab. Sleman	WTP
227	Kota Yogyakarta	WTP
228	Prov. Jawa Timur	WDP
229	Kab. Bangkalan	WDP
230	Kab. Banyuwangi	WTP
231	Kab. Blitar	WDP
232	Kab. Bojonegoro	WTP
233	Kab. Bondowoso	WTP
234	Kab. Gresik	WDP
235	Kab. Jember	WDP
236	Kab. Jombang	WTP
237	Kab. Kediri	WDP
238	Kab. Lamongan	WDP
239	Kab. Lumajang	WTP
240	Kab. Madiun	WTP
241	Kab. Magetan	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
242	Kab. Malang	WTP
243	Kab. Mojokerto	WTP
244	Kab. Nganjuk	WTP
245	Kab. Ngawi	WTP
246	Kab. Pacitan	WTP
247	Kab. Pamekasan	WTP
248	Kab. Pasuruan	WTP
249	Kab. Ponorogo	WTP
250	Kab. Probolinggo	WTP
251	Kab. Sampang	WDP
252	Kab. Sidoarjo	WTP
253	Kab. Situbondo	WTP
254	Kab. Sumenep	WDP
255	Kab. Trenggalek	WDP
256	Kab. Tuban	WDP
257	Kab. Tulungagung	WTP
258	Kota Batu	WDP
259	Kota Blitar	WTP
260	Kota Kediri	WTP
261	Kota Madiun	WTP
262	Kota Malang	WTP
263	Kota Mojokerto	WTP
264	Kota Pasuruan	WDP
265	Kota Probolinggo	WDP
266	Kota Surabaya	WTP
267	Prov Banten	TMP
268	Kab. Lebak	WDP
269	Kab. Pandeglang	TMP
270	Kab. Serang	WTP
271	Kab. Tangerang	WTP
272	Kota Cilegon	WTP
273	Kota Serang	WDP
274	Kota Tangerang	WTP
275	Kota Tangerang Selatan	WDP
276	Provinsi Bali	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
277	Kab. Badung	WTP
278	Kab. Bangli	WDP
279	Kab. Buleleng	WTP
280	Kab. Gianyar	WTP
281	Kab. Jembrana	WTP
282	Kab. Karangasem	WDP
283	Kab. Klungkung	WDP
284	Kab. Tabanan	WTP
285	Kab. Denpasar	WTP
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	WTP
287	Kab. Bima	WDP
288	Kab. Dompu	WTP
289	Kab. Lombok Barat	WTP
290	Kab. Lombok Tengah	WTP
291	Kab. Lombok Timur	WDP
292	Kab. Lombok Utara	WTP
293	Kab. Sumbawa	WTP
294	Kab. Sumbawa Barat	WTP
295	Kota Bima	WTP
296	Kota Mataram	WTP
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	WDP
298	Kab. Alor	WDP
299	Kab. Belu	WDP
300	Kab. Ende	WDP
301	Kab. Flores Timur	WDP
302	Kab. Manggarai	WDP
303	Kab. Manggarai Barat	WDP
304	Kab. Manggarai Timur	WDP
305	Kab. Ngada	WDP
306	Kab. Sabu Raijua	WDP
307	Kab. Sumba Barat	WDP
308	Kab. Sumba Barat Daya	WDP
309	Kab. Sumba Tengah	WDP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
310	Kab. Sumba Timur	WDP
311	Kab. Timor Tengah Selatan	WDP
312	Kab. Timor Tengah Utara	WDP
313	Kota Kupang	WDP
314	Provinsi Kalimantan Barat	WTP
315	Kab. Bengkayang	WDP
316	Kab. Kapuas Hulu	WDP
317	Kab. Kayong Utara	WDP
318	Kab. Ketapang	WTP
319	Kab. Kubu Raya	WTP
320	Kab. Landak	WTP
321	Kab. Melawi	WDP
322	Kab. Pontianak (mempawah)	WDP
323	Kab. Sambas	WDP
324	Kab. Sanggau	WTP
325	Kab. Sekadau	WTP
326	Kab. Sintang	WTP
327	Kota Pontianak	WTP
328	Kota Singkawang	WDP
329	Provinsi Kalimantan Tengah	WTP
330	Kab. Barito Selatan	WDP
331	Kab. Barito Timur	WDP
332	Kab. Barito Utara	WTP
333	Kab. Gunung Mas	WDP
334	Kab. Kapuas	WDP
335	Kab. Katingan	WTP
336	Kab. Kotawaringin Barat	WTP
337	Kab. Kotawaringin Timur	WTP
338	Kab. Lamandau	WTP
339	Kab. Murung Raya	WDP
340	Kab. Pulau Pisau	WDP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
341	Kab. Seruyan	WDP
342	Kab. Sukamara	WTP
343	Kota Palangkaraya	WDP
344	Provinsi Kalimantan Timur	WTP
345	Kab. Berau	WTP
346	Kab. Kutai Barat	WDP
347	Kab. Kutai Kartanegara	WTP
348	Kab. Kutai Timur	WDP
349	Kab. Paser	WTP
350	Kab. Penajam Paser Utara	WDP
351	Kota Balikpapan	WTP
352	Kota Bontang	WTP
353	Kota Samarinda	WTP
354	Kab. Mahakam Ulu	TMP
355	Provinsi Kalimantan Utara	WTP
356	Kab. Malinau	WTP
357	Kab. Nunukan	WDP
358	Kab. Bulungan	WDP
359	Kota Tarakan	WTP
360	Provinsi Kalimantan Selatan	WTP
361	Kab. Balangan	WTP
362	Kab. Banjar	WTP
363	Kab. Barito Kuala	WDP
364	Kab. Hulu Sungai Selatan	WTP
365	Kab. Hulu Sungai Tengah	WTP
366	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP
367	Kab. Kotabaru	WDP
368	Kab. Tabalong	WTP
369	Kab. Tanah Bumbu	WTP
370	Kab. Tanah Laut	WTP
371	Kab. Tapin	WTP
372	Kab. Banjarbaru	WDP
373	Kab. Banjarmasin	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
374	Provinsi Sulawesi Utara	WTP
375	Kab. Bolaang Mongondwo	WDP
376	Kab. Bolaang Mongondwo Selatan	WTP
377	Kab. Bolaang Mongondwo Timur	WTP
378	Kab. Bolaang Mongondwo Utara	WDP
379	Kab. Kepulauan Sangihe	WTP
380	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	WTP
381	Kab. Kepulauan Talaud	WDP
382	Kab. Minahasa	WTP
383	Kab. Minahasa Selatan	WDP
384	Kab. Minahasa Tenggara	WDP
385	Kab. Minahasa Utara	WDP
386	Kota Bitung	WTP
387	Kota Kotamobagu	WTP
388	Kota Manado	WTP
389	Kota Tomohon	WTP
390	Provinsi Sulawesi Tengah	WTP
391	Kab. Banggai	WTP
392	Kab. Banggai Kepulauan	WTP
393	kab. Buol	WDP
394	Kab. Donggala	WTP
395	Kab. Morowali	WDP
396	Kab. Parigi Moutong	WDP
397	Kab. Poso	WDP
398	Kab. Sigi	WDP
399	Kab. Tojo Una-Una	WTP
400	Kab. Tolitoli	WDP
401	Kota Palu	WTP
402	Kab. Banggai Laut	TMP
403	Kab. Morowali Utara	TMP
404	Provinsi Sulawesi Sel.	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
405	Kab. Bantaeng	WDP
406	Kab. Barru	WTP
407	Kab. Bone	WDP
408	Kab. Bulukumba	WTP
409	Kab. Enrekang	WDP
410	Kab. Gowa	WTP
411	Kab. Jeneponto	TMP
412	Kab. Kep. Selayar	TMP
413	Kab. Luwu	WDP
414	Kab. Luwu Timur	WTP
415	Kab. Luwu Utara	WTP
416	Kab. Maros	WTP
417	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	WTP
418	Kab. Pinrang	WTP
419	Kab. Sidenreng Rappang	WDP
420	Kab. Sinjai	WDP
421	Kab. Soppeng	WTP
422	Kab. Takalar	WDP
423	Kab. Tana Toraja	WDP
424	Kab. Toraja Utara	WDP
425	Kab. Wajo	WDP
426	Kota Makasar	WDP
427	Kota Palopo	WDP
428	Kota Pare-pare	WDP
429	Provinsi Sulawesi Tenggara	WTP
430	Kab. Bombana	WTP
431	Kab. Buton	WTP
432	Kab. Buton Utara	WDP
433	Kab. Kolaka	WDP
434	Kab. Kolaka Utara	WTP
435	cab. Konawe	WDP
436	cab. Konawe Selatan	WDP
437	cab. Konawe Utara	WDP
438	Kab. Muna	WDP
439	Kab. Wakatobi	WTP

No	Kabupaten dan Kota	Opini
440	Kota Baubau	WDP
441	Kota Kendari	WTP
442	Kab. Konawe Kep.	WDP
443	Kab. Kolaka Timur	WDP
444	Provinsi Gorontalo	WTP
445	Kab. Boalemo	WTP
446	Kab. Bone Bolango	WTP
447	Kab. Gorontalo	WTP
448	Kab. Gorontalo Utara	WTP
449	Kab. Pohuwato	WTP
450	Kota Gorontalo	WTP
451	Prov. Sulawesi Barat	WTP
452	Kab. Majene	WTP
453	Kab. Mamasa	WDP
454	Kab. Mamuju	WTP
455	Kab. Mamuju Tengah	WDP
456	Kab. Matra	WDP
457	Kab. Polman	WDP
458	Provinsi Maluku	WDP
459	Kab. Buru	WDP
460	Kab. Buru Selatan	TMP
461	Kab. Kep. Aru	TMP
462	Kab. Maluku Barat Daya	WDP
463	Kab. Maluku Tengah	WDP
464	Kab. Maluku Tenggara	WDP
465	Kab. Maluku Tenggara Barat	WDP
466	Kota Tual	WDP
467	Provinsi Maluku Utara	WDP
468	Kab. Halmahera Barat	WDP
469	Kab. Halmahera Selatan	WTP
470	Kab. Halmahera Tengah	WDP
471	Kab. Halmahera Timur	WDP
472	Kab. Halmahera Utara	WDP
473	Kab. Kepulauan Sula	WDP
474	Kab. Pulau Morotai	WDP



No	Kabupaten dan Kota	Opini
475	Kota Ternate	WTP
476	Kota Tidore Kepulauan	WTP
477	Kab. Pulau Taliabu	TW
478	Provinsi Papua	WTP
479	Kab. Asmat	WTP
480	Kab. Jayapura	WTP
481	Kab. Jayawijaya	WDP
482	Kab. Kep. Yapen	WDP
483	Kab. Lanny Jaya	TW
484	Kab. Mappi	TMP
485	Kab. Merauke	WDP
486	Kab. Mimika	WDP
487	Kab. Nabire	WDP
488	Kab. Paniai	TMP
489	Kab. Puncak Jaya	WDP
490	Kab. Yahukimo	TMP
491	Kab. Yalimo	WDP
492	Kota Jayapura	WTP
493	Provinsi Papua Barat	WTP
494	Kab. Fakfak	WDP
495	Kab. Kaimana	WTP
496	Kab. Manokwari	TMP
497	Kab. Maybrat	WDP
498	Kab. Raja Ampat	WTP
499	Kab. Sorong	WTP
500	Kab. Sorong Selatan	WTP
501	Kab. Tambrau	WTP
502	Kab. Teluk Bintuni	WTP
503	Kab. Teluk Wondama	WDP
504	Kota Sorong	WTP

**LAMPIRAN B. RINCIAN TEMUAN POKOK BPK RI ATAS LKPD DI  
INDONESIA**

No	Kabupaten dan Kota	Temuan BPK		SUB
		SPI	UUD	
1	Pemerintahan Aceh	11	7	18
2	Kab. Aceh Barat	6	9	15
3	Kab. Aceh Barat Daya	5	4	9
4	Kab. Aceh Besar	7	12	19
5	Kab. Aceh Jaya	7	6	13
6	Kab. Aceh Selatan	7	4	11
7	Kab. Aceh Singkil	5	7	12
8	Kab. Aceh Tamiang	7	4	11
9	Kab. Aceh Tengah	6	5	11
10	Kab. Aceh Tenggara	5	4	9
11	Kab. Aceh Timur	6	6	12
12	Kab. Aceh Utara	5	4	9
13	Kab. Bener Meriah	7	11	18
14	Kab. Bireuen	8	7	15
15	Kab. Gayo Lues	6	5	11
16	Kab. Nangan Raya	7	6	13
17	Kab. Pidie	5	5	10
18	Kab. Pidie Jaya	5	7	12
19	Kab. Simeulue	9	7	16
20	Kota Banda Aceh	5	5	10
21	Kota Langsa	4	5	9
22	Kota Lhokseumawe	8	7	15
23	Kota Sabang	5	5	10
24	Kota Subulussalam	10	5	15
25	Provinsi Sumatra Utara	11	9	20
26	Kab. Asahan	5	11	16
27	Kab. Batubara	8	6	14
28	Kab. Dairi	5	3	8
29	Kab. Deli Serdang	5	6	11
30	Kab. Humbang Hasundutan	6	7	13
31	Kab. Karo	6	4	10
32	Kab. Labuhanbatu	4	3	7
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	4	5	9

34	Kab. Langkat	9	12	21
35	Kab. Nias	8	6	14
36	Kab. Padang Lawas Utara	8	5	13
37	Kab. Pak Pak Barat	3	3	6
38	Kab. Samosir	6	6	12
39	Kab. Serdang Bedagai	5	7	12
40	Kab. Simalungun	6	5	11
41	Kab. Tapanuli Selatan	6	5	11
42	Kab. Tapanuli Tengah	8	5	13
43	Kab. Tapanuli Utara	5	6	11
44	Kota Binjai	5	8	13
45	Kota Gunungsitoli	9	7	16
46	Kota Medan	11	6	17
47	Kota Padangsidimpuan	7	9	16
48	Kota Pematangsiantar	11	3	14
49	Kota Sibolga	10	7	17
50	Kota Tebing Tinggi	8	4	12
51	Provinsi Sumatera Barat	6	3	9
52	Kab. Agam	4	5	9
53	Kab. Dharmasraya	3	3	6
54	Kab. Kepulauan Mentawai	4	5	9
55	Kab. Lima Puluh Kota	4	4	8
56	Kab. Padang Pariaman	5	3	8
57	Kab. Pasaman	3	3	6
58	Kab. Pasaman Barat	5	3	8
59	Kab. Pesisir Selatan	3	4	7
60	Kab. Sijunjung	3	3	6
61	Kab. Solok	3	3	6
62	Kab. Solok Selatan	4	4	8
63	Kab. Tanah Datar	4	6	10
64	Kota Bukit Tinggi	4	4	8
65	Kota Padang	3	5	8
66	Kota Padang Panjang	3	3	6
67	Kota Pariaman	3	4	7
68	Kota Payakumbuh	7	2	9
69	Kota Sawahlunto	6	5	11
70	Kota Solok	5	4	9
71	Provinsi Riau	24	25	49

72	Kab. Bengkalis	12	14	26
73	Kab. Indragiri Hilir	19	12	31
74	Kab. Indragiri Hulu	8	4	12
75	Kab. Kampar	13	9	22
76	Kab. Kepulauan Meranti	8	15	23
77	Kab. Kuantan Singingi	8	9	17
78	Kab. Pelalawan	5	3	8
79	Kab. Rokan Hilir	8	10	18
80	Kab. Rokan Hulu	3	3	6
81	Kab. Siak	4	5	9
82	Kota Dumai	5	3	8
83	Kota Pekanbaru	4	5	9
84	Provinsi Jambi	10	9	19
85	Kab. Batang Hari	6	7	13
86	Kab. Bungo	4	8	12
87	Kab. Kerinci	8	10	18
88	Kab. Merangin	9	13	22
89	Kab. Muaro Jambi	4	15	19
90	Kab. Sarolangun	9	7	16
91	Kab. Tanjung Jabung Barat	14	7	21
92	Kab. Tanjung Jabung Timur	10	5	15
93	Kab. Tebo	7	6	13
94	Kota Jambi	11	7	18
95	Kota Sungai Penuh	7	8	15
96	Provinsi Sumatra Selatan	10	13	23
97	Kab. Banyuasin	6	12	18
98	Kab. Empat lawang	7	10	17
99	Kab. Lahat	6	12	18
100	Kab. Muara Enim	11	4	15
101	Kab. Musi Banyuasin	8	11	19
102	Kab. Musi Rawas	6	5	11
103	Kab. Musi Rawas Utara	9	9	18
104	Kab. Ogan Ilir	7	4	11
105	Kab. Ogan Kemering ilir	7	15	22
106	Kab. Ogan Kemering Ulu	10	9	19
107	Kab. OKU Selatan	7	13	20
108	Kab. OKU Timur	5	9	14
109	Kab. Penukal Arab Lematang Ilir	10	12	22

110	Kota Lubuk Linggau	6	9	15
111	Kota Pagar Alam	9	8	17
112	Kota Palembang	8	7	15
113	Kota Prabumulih	8	6	14
114	Provinsi Bengkulu	6	9	15
115	Kab. Bengkulu Selatan	7	4	11
116	Kab. Bengkulu Tengah	5	9	14
117	Kab. Bengkulu Utara	5	5	10
118	Kab. Kaur	6	3	9
119	Kab. Kepahiang	8	6	14
120	Kab. Lebong	4	9	13
121	Kab. Mukomuko	13	22	35
122	Kab. Rejang Lebong	8	8	16
123	Kab. Seluma	7	12	19
124	Kota Bengkulu	14	9	23
125	Provinsi Lampung	13	7	20
126	Kab. Lampung Barat	7	4	11
127	Kab. Lampung Selatan	11	10	21
128	Kab. Lampung Tengah	7	8	15
129	Kab. Lampung Timur	8	5	13
130	Kab. Lampung Utara	8	9	17
131	Kab. Mesuji	7	10	17
132	Kab. Pesawaran	7	7	14
133	Kabupaten Pesisir Barat	14	8	22
134	Kab. Pringsewu	10	4	14
135	Kab. Tanggamus	6	7	13
136	Kab. Tulang Bawang	6	7	13
137	Kab. Tulang Bawang Barat	5	6	11
138	Kab. Way Kanan	7	11	18
139	Kota Bandar Lampung	8	3	11
140	Kota Metro	9	4	13
141	Provinsi Bangka Belitung	8	7	15
142	Kab. Bangka	8	4	12
143	Kab. Bangka Barat	11	11	22
144	Kab. Bangka Selatan	12	8	20
145	Kab. Bangka Tengah	14	10	24
146	Kab. Belitung	9	5	14
147	Kab. Belitung Timur	9	9	18

148	Kota Pangkal Pinang	17	7	24
149	Provinsi Kepulauan Riau	5	6	11
150	Kab. Bintan	3	7	10
151	Kab. Karimun	10	5	15
152	Kab. Anambas	10	8	18
153	Kab. Lingga	10	14	24
154	Kab. Natuna	8	7	15
155	Kota Batam	8	7	15
156	Kota Tanjungpinang	8	8	16
157	Provinsi DKI Jakarta	10	38	48
158	Provinsi Jawa Barat	13	10	23
159	Kab. Bandung	10	6	16
160	Kab. Bandung Barat	6	5	11
161	Kab. Bekasi	10	9	19
162	Kab. Bogor	7	12	19
163	Kab. Ciamis	7	4	11
164	Kab. Cianjur	7	8	15
165	Kab. Cirebon	3	4	7
166	Kab. Garut	13	4	17
167	Kab. Indramayu	6	5	11
168	Kab. Karawang	7	11	18
169	Kab. Kuningan	8	8	16
170	Kab. Majalengka	3	5	8
171	Kab. Pangandaran	3	4	7
172	Kab. Purwakarta	7	5	12
173	Kab. Subang	8	8	16
174	Kab. Sukabumi	6	5	11
175	Kab. Sumedang	3	6	9
176	Kab. Tasikmalaya	5	3	8
177	Kota Bandung	3	4	7
178	Kota Banjar	2	4	6
179	Kota Bekasi	12	9	21
180	Kota Bogor	10	5	15
181	kota Cimahi	4	9	13
182	Kota Cirebon	5	7	12
183	Kota Depok	4	6	10
184	Kota Sukabumi	11	8	19
185	Kota Tasikmalaya	7	9	16

186	Provinsi Jawa Tengah	13	20	33
187	Kab. Banjarnegara	6	10	16
188	Kab. Banyumas	11	5	16
189	Kab. Batang	5	9	14
190	Kab. Blora	7	6	13
191	Kab. Boyolali	2	9	11
192	Kab. Brebes	6	9	15
193	Kab. Cilacap	7	4	11
194	Kab. Demak	10	4	14
195	Kab. Grobogan	11	3	14
196	Kab. Jepara	8	4	12
197	Kab. Karanganyar	4	6	10
198	Kab. Kebumen	4	5	9
199	Kab. Kendal	5	12	17
200	Kab. Klaten	8	8	16
201	Kab. Kudus	16	9	25
202	Kab. Magelang	7	5	12
203	Kab. Pati	9	4	13
204	Kab. Pekalongan	5	9	14
205	Kab. Pemasang	8	4	12
206	Kab. Purbalingga	6	6	12
207	Kab. Purworejo	5	9	14
208	Kab. Rembang	7	12	19
209	Kab. Semarang	5	5	10
210	Kab. Sragen	6	10	16
211	Kab. Sukoharjo	8	11	19
212	Kab. Tegal	6	10	16
213	Kab. Temanggung	6	8	14
214	Kab. Wonogiri	9	4	13
215	Kab. Wonosobo	7	7	14
216	Kota Magelang	3	5	8
217	Kota Pekalongan	5	6	11
218	Kota Salatiga	5	4	9
219	Kota Semarang	17	4	21
220	Kota Surakarta	5	8	13
221	Kota Tegal	9	6	15

222	Prov DIY	6	4	10
223	Kab. Bantul	5	8	13
224	Kab. Gunung Kidul	9	17	26
225	Kab. Kulon Progo	5	7	12
226	Kab. Sleman	11	9	20
227	Kota Yogyakarta	7	11	18
228	Prov. Jawa Timur	7	8	15
229	Kab. Bangkalan	5	4	9
230	Kab. Banyuwangi	9	7	16
231	Kab. Blitar	2	3	5
232	Kab. Bojonegoro	8	6	14
233	Kab. Bondowoso	4	5	9
234	Kab. Gresik	10	4	14
235	Kab. Jember	10	2	12
236	Kab. Jombang	3	18	21
237	Kab. Kediri	2	2	4
238	Kab. Lamongan	7	8	15
239	Kab. Lumajang	5	10	15
240	Kab. Madiun	4	2	6
241	Kab. Magetan	4	4	8
242	Kab. Malang	4	2	6
243	Kab. Mojokerto	9	5	14
244	Kab. Nganjuk	4	2	6
245	Kab. Ngawi	5	4	9
246	Kab. Pacitan	5	5	10
247	Kab. Pamekasan	7	6	13
248	Kab. Pasuruan	6	4	10
249	Kab. Ponorogo	11	5	16
250	Kab. Probolinggo	5	5	10
251	Kab. Sampang	10	6	16
252	Kab. Sidoarjo	4	5	9
253	Kab. Situbondo	10	6	16
254	Kab. Sumenep	6	5	11
255	Kab. Trenggalek	3	1	4
256	Kab. Tuban	6	3	9
257	Kab. Tulungagung	4	2	6



258	Kota Batu	3	3	6
259	Kota Blitar	3	3	6
260	Kota Kediri	2	2	4
261	Kota Madiun	4	6	10
262	Kota Malang	4	3	7
263	Kota Mojokerto	11	5	16
264	Kota Pasuruan	5	5	10
265	Kota Probolinggo	10	8	18
266	Kota Surabaya	8	5	13
267	Prov Banten	6	10	16
268	Kab. Lebak	3	12	15
269	Kab. Pandeglang	12	10	22
270	Kab. Serang	5	9	14
271	Kab. Tangerang	6	18	24
272	Kota Cilegon	7	5	12
273	Kota Serang	5	9	14
274	Kota Tangerang	4	8	12
275	Kota Tangerang Selatan	5	5	10
276	Provinsi Bali	4	5	9
277	Kab. Badung	4	3	7
278	Kab. Bangli	4	2	6
279	Kab. Buleleng	3	2	5
280	Kab. Gianyar	5	3	8
281	Kab. Jembrana	3	3	6
282	Kab. Karangasem	7	7	14
283	Kab. Klungkung	3	4	7
284	Kab. Tabanan	7	5	12
285	Kab. Denpasar	4	2	6
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2	2	4
287	Kab. Bima	3	3	6
288	Kab. Dompu	4	2	6
289	Kab. Lombok Barat	2	2	4
290	Kab. Lombok Tengah	9	9	18
291	Kab. Lombok Timur	4	3	7
292	Kab. Lombok Utara	2	2	4
293	Kab. Sumbawa	3	4	7

294	Kab. Sumbawa Barat	5	3	8
295	Kota Bima	4	7	11
296	Kota Mataram	2	4	6
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	5	11
298	Kab. Alor	4	2	6
299	Kab. Belu	3	4	7
300	Kab. Ende	4	3	7
301	Kab. Flores Timur	3	3	6
302	Kab. Manggarai	2	3	5
303	Kab. Manggarai Barat	3	3	6
304	Kab. Manggarai Timur	3	2	5
305	Kab. Ngada	6	4	10
306	Kab. Sabu Raijua	6	5	11
307	Kab. Sumba Barat	3	4	7
308	Kab. Sumba Barat Daya	3	3	6
309	Kab. Sumba Tengah	5	4	9
310	Kab. Sumba Timur	2	2	4
311	Kab. Timor Tengah Selatan	3	2	5
312	Kab. Timor Tengah Utara	3	4	7
313	Kota Kupang	2	2	4
314	Provinsi Kalimantan Barat	4	3	7
315	Kab. Bengkayang	3	3	6
316	Kab. Kapuas Hulu	3	5	8
317	Kab. Kayong Utara	3	4	7
318	Kab. Ketapang	4	4	8
319	Kab. Kubu Raya	4	4	8
320	Kab. Landak	6	3	9
321	Kab. Melawi	3	3	6
322	Kab. Pontianak (mempawah)	4	2	6
323	Kab. Sambas	4	2	6
324	Kab. Sanggau	4	5	9
325	Kab. Sekadau	3	3	6
326	Kab. Sintang	3	3	6
327	Kota Pontianak	3	2	5
328	Kota Singkawang	5	3	8
329	Provinsi Kalimantan Tengah	8	4	12

330	Kab. Barito Selatan	6	5	11
331	Kab. Barito Timur	10	6	16
332	Kab. Barito Utara	5	1	6
333	Kab. Gunung Mas	4	2	6
334	Kab. Kapuas	11	1	12
335	Kab. Katingan	5	5	10
336	Kab. Kotawaringin Barat	8	1	9
337	Kab. Kotawaringin Timur	4	6	10
338	Kab. Lamandau	13	2	15
339	Kab. Murung Raya	9	7	16
340	Kab. Pulau Pisau	10	2	12
341	Kab. Seruyan	9	4	13
342	Kab. Sukamara	10	5	15
343	Kota Palangkaraya	7	4	11
344	Provinsi Kalimantan Timur	7	6	13
345	Kab. Berau	11	8	19
346	Kab. Kutai Barat	6	11	17
347	Kab. Kutai Kartanegara	12	18	30
348	Kab. Kutai Timur	6	3	9
349	Kab. Paser	7	7	14
350	Kab. Penajam Paser Utara			0
351	Kota Balikpapan	5	4	9
352	Kota Bontang	8	2	10
353	Kota Samarinda	9	10	19
354	Kab. Mahakan Ulu	19	6	25
355	Provinsi Kalimantan Utara	3	1	4
356	Kab. Malinau	4	5	9
357	Kab. Nunukan	5	7	12
358	Kab. Bulungan	2	3	5
359	Kota Tarakan	4	5	9
360	Provinsi Kalimantan Selatan	2	2	4
361	Kab. Balangan	3	3	6
362	Kab. Banjar	3	3	6
363	Kab. Barito Kuala	2	2	4
364	Kab. Hulu Sungai Selatan	3	2	5
365	Kab. Hulu Sungai Tengah	3	2	5
366	Kab. Hulu Sungai Utara	3	3	6
367	Kab. Kotabaru	3	3	6

368	Kab. Tabalong	2	3	5
369	Kab. Tanah Bumbu	4	3	7
370	Kab. Tanah Laut	3	4	7
371	Kab. Tapin	3	3	6
372	Kab. Banjarbaru	3	3	6
373	Kab. Banjarmasin	3	2	5
374	Provinsi Sulawesi Utara	8	19	27
375	Kab. Bolaang Mongondwo	10	26	36
376	Kab. Bolaang Mongondwo Selatan	7	8	15
377	Kab. Bolaang Mongondwo Timur	11	13	24
378	Kab. Bolaang Mongondwo Utara	9	8	17
379	Kab. Kepulauan Sangihe	6	8	14
380	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	11	6	17
381	Kab. Kepulauan Talaud	8	19	27
382	Kab. Minahasa	8	11	19
383	Kab. Minahasa Selatan	12	26	38
384	Kab. Minahasa Tenggara	14	20	34
385	Kab. Minahasa Utara	9	20	29
386	Kota Bitung	14	11	25
387	Kota Kotamobagu	9	9	18
388	Kota Manado	14	15	29
389	Kota Tomohon	2	15	17
390	Provinsi Sulawesi Tengah	6	8	14
391	Kab. Banggai	4	6	10
392	Kab. Banggai Kepulauan	4	14	18
393	kab. Buol	10	10	20
394	Kab. Donggala	8	17	25
395	Kab. Morowali	17	9	26
396	Kab. Parigi Moutong	7	11	18
397	Kab. Poso	10	6	16
398	Kab. Sigi	7	7	14
399	Kab. Tojo Una-Una	6	10	16
400	Kab. Tolitoli	9	12	21
401	Kota Palu	10	11	21
402	Kab. Banggai Laut	6	7	13
403	Kab. Morowali Utara	11	8	19
404	Provinsi Sulawesi Selatan	7	8	15
405	Kab. Bantaeng	9	4	13

406	Kab. Barru	8	5	13
407	Kab. Bone	12	9	21
408	Kab. Bulukumba	14	6	20
409	Kab. Enrekang	13	11	24
410	Kab. Gowa	9	15	24
411	Kab. Jeneponto	15	9	24
412	Kab. Kep. Selayar	13	16	29
413	Kab. Luwu	13	7	20
414	Kab. Luwu Timur	8	3	11
415	Kab. Luwu Utara	5	3	8
416	Kab. Maros	9	4	13
417	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3	5	8
418	Kab. Pinrang	11	10	21
419	Kab. Sidenreng Rappang	12	7	19
420	Kab. Sinjai	7	6	13
421	Kab. Soppeng	-	-	0
422	Kab. Takalar	-	-	0
423	Kab. Tana Toraja	-	-	0
424	Kab. Toraja Utara	-	-	0
425	Kab. Wajo	9	11	20
426	Kota Makasar	7	5	12
427	Kota Palopo	10	6	16
428	Kota Pare-pare	10	6	16
429	Provinsi Sulawesi Tenggara	6	5	11
430	Kab. Bombana	9	16	25
431	Kab. Buton	4	8	12
432	Kab. Buton Utara	7	6	13
433	Kab. Kolaka	6	5	11
434	Kab. Kolaka Utara	6	2	8
435	kab. Konawe	12	9	21
436	kab. Konawe Selatan	6	9	15
437	kab. Konawe Utara	6	9	15
438	Kab. Muna	5	8	13
439	Kab. Wakatobi	5	5	10
440	Kota Baubau	6	8	14
441	Kota Kendari	3	3	6
442	Kab. Konawe Kepulauan	9	8	17
443	Kab. Kolaka Timur	12	5	17

444	Provinsi Gorontalo	11	7	18
445	Kab. Boalemo	8	4	12
446	Kab. Bone Bolango	7	13	20
447	Kab. Gorontalo	4	7	11
448	Kab. Gorontalo Utara	6	6	12
449	Kab. Pohuwato	4	9	13
450	Kota Gorontalo	9	5	14
451	Prov. Sulawesi Barat			0
452	Kab. Majene	9	12	21
453	Kab. Mamasa	9	5	14
454	Kab. Mamuju	2	8	10
455	Kab. Mamuju Tengah	7	7	14
456	Kab. Matra	6	9	15
457	Kab. Polman	7	7	14
458	Provinsi Maluku	8	8	16
459	Kab. Buru	8	9	17
460	Kab. Buru Selatan	15	11	26
461	Kab. Kep. Aru	11	10	21
462	Kab. Maluku Barat Daya	8	9	17
463	Kab. Maluku Tengah	4	12	16
464	Kab. Maluku Tenggara	6	8	14
465	Kab. Maluku Tenggara Barat	12	11	23
466	Kota Tual	7	6	13
467	Provinsi Maluku Utara	6	9	15
468	Kab. Halmahera Barat	9	4	13
469	Kab. Halmahera Selatan	4	7	11
470	Kab. Halmahera Tengah	4	5	9
471	Kab. Halmahera Timur	3	4	7
472	Kab. Halmahera Utara	4	5	9
473	Kab. Kepulauan Sula	7	5	12
474	Kab. Pulau Morotai	4	10	14
475	Kota Ternate	3	3	6
476	Kota Tidore Kepulauan	2	3	5
477	Kab. Pulau Taliabu	4	10	14
478	Provinsi Papua	12	13	25
479	Kab. Asmat	9	7	16
480	Kab. Jayapura	10	16	26
481	Kab. Jayawijaya	7	8	15

482	Kab. Kep. Yapen	9	9	18
483	Kab. Lanny Jaya	6	7	13
484	Kab. Mappi	4	12	16
485	Kab. Merauke	7	15	22
486	Kab. Mimika	8	10	18
487	Kab. Nabire	10	19	29
488	Kab. Paniai	14	13	27
489	Kab. Puncak Jaya	4	4	8
490	Kab. Yahukimo	10	12	22
491	Kab. Yalimo	8	6	14
492	Kab. Jayapura	7	11	18
493	Provinsi Papua Barat	5	3	8
494	Kab. Fakfak	6	5	11
495	Kab. Kaimana	8	5	13
496	Kab. Manokwari	3	2	5
497	Kab. Maybrat	4	4	8
498	Kab. Raja Ampat	7	7	14
499	Kab. Sorong	2	2	4
500	Kab. Sorong Selatan	5	3	8
501	Kab. Tambrauw	4	3	7
502	Kab. Teluk Bintuni	4	2	6
503	Kab. Teluk Wondama	5	4	9
504	Kota Sorong	5	5	10

**LAMPIRAN C. PERMASALAHAN UTAMA SPI PADA PEMERINTAH  
DAERAH DI INDONESIA**

<b>Permasalahan Utama dan Contohnya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Entitas</b>
<p>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persediaan belum dilakukan <i>stock opname</i> pada akhir tahun</li> <li>• Pencatatan tidak didukung kartu persediaan</li> <li>• Penyajian saldo penyertaan modal dicatat dengan metode biaya</li> <li>• Pengelolaan aset tetap belum optimal</li> </ul>	927	405
<p>Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai</li> <li>• Realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya</li> <li>• Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib</li> <li>• Penyajian saldo investasi nonpermanen belum menerapkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV)</li> <li>• Penyajian piutang pajak belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan</li> </ul>	871	406
<p>Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi belanja tahun anggaran 2014 yang diberikan kepada instansi vertikal terlambat dilaporkan ke Mendagri dan Menkeu</li> <li>• Pendapatan yang berasal dari Jamkesmas diterima langsung oleh puskesmas dan belum diverifikasi Dinas</li> </ul>	770	357



<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerahan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Penggunaan dan BOS Pendidikan tidak sesuai dengan Juknis/Pedoman</li> </ul>		
<p>Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi belanja tahun anggaran 2014 yang diberikan kepada instansi vertikal terlambat dilaporkan ke Mendagri dan Menkeu</li> <li>• Pendapatan yang berasal dari Jamkesmas diterima langsung oleh puskesmas dan belum diverifikasi Dinas Kesehatan</li> <li>• Penyerahan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Penggunaan dan BOS Pendidikan tidak sesuai dengan Juknis/Pedoman</li> </ul>	692	375
<p>Perencanaan kegiatan tidak memadai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penganggaran dan realisasi belanja pada LRA belum sesuai dengan SAP</li> <li>• Realisasi pemberian tambahan penghasilan tidak berdasarkan kriteria dan satuan harga yang jelas</li> <li>• Besaran tambahan penghasilan dibuat setelah mengetahui besaran alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD</li> <li>• Penggunaan langsung atas pendapatan retribusi jasa</li> </ul>	692	375

<p>umum tidak sesuai ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian belanja bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan tidak terduga tidak memadai</li> </ul>		
<p>Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang tahun 2014</li> <li>• Wajib pajak air permukaan yang tidak memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPPA) dan wajib pajak air permukaan belum memperpanjang SIPPA</li> <li>• Pengelolaan penerimaan nilai strategis reklame dan hasil lelang titik reklame belum memadai</li> <li>• Pengelolaan database pajak reklame belum memadai</li> <li>• Penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pengelolaan pajak reklame tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	486	288
<p>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pengelolaan aset tetap dalam mendukung penyusunan laporan keuangan tidak memadai</li> <li>• Penggunaan sistem aplikasi komputer belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan</li> <li>• Aplikasi SIMDA BMD yang digunakan dalam menatausahakan BMD belum sepenuhnya siap dalam menunjang pencatatan akuntansi berbasis akrual</li> <li>• Persiapan pemerintah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual belummempadai</li> </ul>	310	207

Kelemahan SPI lainnya :	1922	484
<ul style="list-style-type: none"><li>• Entitas tidak memiliki <i>standard operating procedure</i> (SOP) yang formal, seperti belum ada SOP pengelolaan dan penatausahaan kas, persediaan, dan pendapatan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah/ PAD), sehingga penyajian saldo kas, persediaan, dan PAD tidak berdasarkan dokumen yang lengkap dan sah, serta tidak didukung dengan landasan hukum yang kuat</li><li>• SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati</li><li>• Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal yang ditunjukkan dengan belum ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan sebelumnya</li><li>• Kelemahan pengamanan fisik aset</li></ul>		

**LAMPIRAN D. PERMASALAHAN UTAMA KERUGIAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

<b>Permasalahan Utama dan Contohnya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai (Rp miliar)</b>	<b>Entitas</b>
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang pada belanja modal dan pemeliharaan:	594	265,75	373
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan 48 kegiatan kontrak pembangunan jalan, saluran, gedung, sumur resapan, dan rehab gedung</li> </ul>		13,93	Prov. DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan volume pada belanja modal serta barang dan jasa</li> </ul>		6,46	Prov. Lampung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan pada pekerjaan pembangunan dan rehab gedung</li> </ul>		6,23	Kab. Penukul Abab Lematang Ilir
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan volume pada pelaksanaan 72 paket pekerjaan</li> </ul>		4,44	Prov. Sulawesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum</li> </ul>		4,04	Kab. Bengkulu Tengah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan volume pada kegiatan pembangunan SPAM Sungai Kapih Tahap I</li> </ul>		1,13	Kota Samarinda
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan fisik pada 6 SKPD</li> </ul>		1,04	Kab. Maluku

			Barat Daya
<b>Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan</b>	<b>489</b>	<b>346,25</b>	<b>264</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan tanah RS SW tidak berdasarkan proses perencanaan, studi kelayakan, penelitian, analisis dan evaluasi yang cermat, mendalam dan komprehensif atas kelayakan lokasi dan kewajaran harga RS SW milik YKSW, sehingga Provinsi DKI Jakarta membayar harga tanah lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi nyata di atas tanah tersebut</li> </ul>		191,33	Prov. DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja makanan dan minuman serta belanja BBM tidak sesuai dengan pengadaan/pembelian sebenarnya</li> </ul>		18,95	Kab. Bangkal an
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tambahan penghasilan yang SP2D-nya tidak membubuhkan potongan pajak</li> </ul>		5,52	Kab. Lanny Jaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran beasiswa oleh Pemprov tidak sesuai dengan Pergub, perjanjian, dan persyaratan penerima beasiswa</li> </ul>		5,07	Prov. Jambi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja modal pembebasan lahan tahun anggaran 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		4,28	Kab. Konawe Utara
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja makanan dan minuman, belanja bahan bakar, serta belanja terkait bimtek tidak dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>		2,28	Kab. Banggai
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan</li> </ul>		2,73	Kab. Manokw

			ari
<b>Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/ jasa</b>	<b>371</b>	<b>88,16</b>	<b>220</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran pada 16 paket pekerjaan konstruksi jalan</li> </ul>		2,45	Kab. Lampung Selatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran timbunan pasir atas pekerjaan pembangunan <i>water front city</i> pada Dinas Pekerjaan Umum</li> </ul>		2,24	Kab. Kepulauan Anambas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran pengadaan Bahan Bakar Minyak PLTD Waisai pada Dinas Pertambangan dan Energi</li> </ul>		1,59	Kab. Raja Ampat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran biaya personel dan biaya nonpersonel pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perindustrian dan Energi tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		1,52	Prov. DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Harga satuan timpang atas penambahan volume pekerjaan dan terdapat pembayaran pekerjaan CCTV, hydrant, dan balok latiu yang seharusnya tidak dilakukan pada pembangunan RSUD Klaten</li> </ul>		1,35	Kab. Klaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil atas dua puluh empat paket pekerjaan jasa konsultan pada sepuluh SKPD tidak sesuai ketentuan</li> </ul>		1,57	Prov. Sulawesi Utara
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan jasa konsultan perencanaan di Dinas PU</li> </ul>		1,13	Kab.

tidak memadai dan berindikasi kelebihan pembayarannya			Buol
<b>Biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan</b>	<b>218</b>	<b>47,61</b>	<b>206</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD</li> </ul>		1,82	Kab. Maluku Tengah
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan</li> </ul>		1,76	Prov. Maluku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas</li> </ul>		1,14	Kab. Kolaka
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi perjalanan dinas pada 13 SKPD Lebih Bayar Minimal</li> </ul>		1,03	Kab. Pesisir Selatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran paket transportasi dan akomodasi melebihi analisa standar belanja</li> </ul>		1,02	Kab. Serang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan</li> </ul>		1,02	Kab. Sigi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan</li> </ul>		0,81	Kab. Aceh Tenggara
<b>Pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar yang ditetapkan</b>	<b>123</b>	<b>51,99</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian honor penunjang kinerja bagi kader posyandu dan PKK tidak sesuai Peraturan Wali Kota</li> </ul>		17,66	Kota Bekasi

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian honor kegiatan di beberapa SKPD melebihi standar biaya masukan</li> </ul>		6,51	Prov. Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran honorarium kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, <i>hearing/</i> dialog, dan rapat-rapat paripurna miliar tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		6,27	Kab. Jayawijaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		2,29	Kota Sorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran honorarium pengelola keuangan kepada PPK, PPTK dan staf pengelola keuangan tidak mengacu peraturan bupati</li> </ul>		1,07	Kab. Lampung Timur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran honor jasa pembinaan dan pendampingan kegiatan padat karya pangan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Perkebunan tidak didukung SK Bupati dan tumpang tindih dengan anggaran dan kegiatan di kecamatan, kelurahan, dan desa</li> </ul>		0,55	Kab. Timor Tengah Utara
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat indikasi kecurangan dalam pencairan honorarium panitia pelaksana kegiatan di Sekretariat DPRD</li> </ul>		0,45	Kab. Minahasa Selatan
<b>Kerugian lainnya</b>	<b>627</b>	<b>621,55</b>	<b>293</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahalan harga (<i>mark up</i>) seperti proses lelang pengadaan barang pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat</li> </ul>		10,32	Prov. Jawa Barat



tidak sesuai dengan ketentuan			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketekoran kas pada bendahara pengeluaran sekretariat daerah (Setda) karena penggunaan uang untuk kepentingan pribadi</li></ul>		1,99	Kab. Gowa
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pada Dinas Pendidikan belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak</li></ul>		1,46	Kab. Kotabaru
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja atau pengadaan fiktif senilai Rp1,42 miliar pada pengadaan <i>handy talky</i> di Kantor Sandi Daerah Kota Medan</li></ul>		1,42	Kota Medan

**LAMPIRAN E. PERMASALAHAN UTAMA POTENSI KERUGIAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

<b>Permasalahan Utama dan contohnya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai (Rp miliar)</b>	<b>Entitas</b>
<b>Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya</b>	<b>100</b>	<b>78,84</b>	<b>80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi Kelebihan pembayaran akibat selisih volume atas realisasi kontrak pada pekerjaan peningkatan jalan</li> </ul>		8,04	Kab. Bulungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran pembangunan terminal bandara tidak sesuai dengan progress fisiknya per 31 Desember 2014</li> </ul>		7,31	Kab. Banyuwangi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan Volume pekerjaan atas 9 paket pekerjaan rehabilitasi berkala jalan aspal</li> </ul>		3,61	Pro. Banten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pekerjaan atas 20 pekerjaan pada 6 SKPD</li> </ul>		13	Kab. Puncak Jaya
<b>Aset berupa tanah, kendaraan, dan asset lainnya dikuasai pihak lain</b>	<b>94</b>	<b>369,28</b>	<b>90</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian asset lemah, sehingga berpotensi kehilangan asset tetap yang dimiliki oleh pihak ketiga</li> </ul>		45,23	Kab. Siak
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung dan Bangunan dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain tanpa ada perjanjian, imbal balik dan bukti serah terima yang sah sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		28,63	Kab. Yalimo

<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap peralatan dan mesin dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian yang jelas</li> </ul>		19,52	Prov. Sumatera Utara
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap peralatan dan mesin khususnya kendaraan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain berpotensi rusak atau hilang dan tidak dapat digunakan untuk menunjang operasional pemkab</li> </ul>		9,47	Kab. Puncak Jaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan asset belum memadai, sehingga pemkab berpotensi kehilangan kendaraan dinas</li> </ul>		8,31	Kab. Kutai Timur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapal motor keadaan rusak berat yang dikuasai pihak lain masih dilaporkan sebagai aset tetap peralatan dan mesin</li> </ul>		8,82	Kab. Kepulauan Mentawai
<b>Aset berupa mesin, peralatan dan asset lainnya tidak diketahui keberadaannya</b>	<b>53</b>	<b>616,58</b>	<b>52</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya pada 19 SKPD</li> </ul>		212,67	Kab. Siak
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tidak diketahui lokasinya</li> </ul>		208,37	Kota. Samarinda
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tidak diketahui keberadaannya</li> </ul>		31,77	Kab. Buol
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat asset yang tidak dapat ditelusuri</li> </ul>		26,22	Kab. Kepahiang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat barang milik daerah sebanyak 571 unit tidak diketahui keberadaannya</li> </ul>		23,29	Kota Kupang
<b>Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih</b>	<b>40</b>	<b>311,14</b>	<b>38</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan penyaluran dana bergulir dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Bank PD</li> </ul>		153,37	Kab. Kampar

BPR Sarimadu diragukan tertagih			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat potensi kerugian daerah atas investasi dana bergulir yang tidak dikembalikan oleh nasabah</li> </ul>		47,81	Prov. Jawa Barat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dana bergulir berpotensi tidak tertagih</li> </ul>		30,83	Prov. NTB
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman macet diragukan tingkat ketertagihannya dan berpotensi hilangnya penerimaan yang menjadi hak pemerintah Provinsi NTT</li> </ul>		16,37	Prov. NTT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) belum optimal dan berpotensi tidak dapat tertagih</li> </ul>		12,57	Kota Bontang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi kerugian daerah atas penagihan piutang pajak mineral bukan logam dan bantuan yang belum dilakukan secara optimal sesuai ketentuan, sehingga berisiko terjadi kadaluarsa dalam penagihan</li> </ul>		3,76	Kab. Maltra
<b>Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan</b>	<b>11</b>	<b>3,06</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengadaan 13 jenis pohon di Dinas Pertamanan dan Pemakanan tidak sesuai dengan ketentuan dan berindikasi merugikan daerah atas pohon yang mati</li> </ul>		2,31	Prov. DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pembangunan embung tidak sesuai spesifikasi kontrak</li> </ul>		0,34	Kab. Maluku Tenggara Barat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (Tahap I) dan tanggungjawab pemeliharaan yang</li> </ul>		0,21	Kab. Indragiri Hulu

belum dilaksanakan			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum mengalami rusak berat</li></ul>		0,11	Kab. Langkat
<b>Potensi kerugian daerah lainnya</b>	<b>26</b>	<b>31,28</b>	<b>23</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan tiang pancang di pasar Marelan</li></ul>		10,53	Kota Medan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat izin usaha pertambangan yang belum didukung dengan jaminan reklamasi</li></ul>		1,59	Kab. Rembang
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan reklamasi tidak sesuai ketentuan</li></ul>		1,13	Kab. Rembang

**LAMPIRAN F. PERMASALAHAN UTAMA KEKURANGAN PENERIMAAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

<b>Permasalahan Utama dan contohnya</b>	<b>Jum -lah</b>	<b>Nilai (Rp miliar)</b>	<b>Entitas</b>
<b>Penerimaan selain denda belum ditetapkan, dipungut/disetorkan</b>	<b>511</b>	<b>256,86</b>	<b>301</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ)</li> </ul>		28,95	Kab. Siak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemungutan PPJ Non-PLN</li> </ul>		22,56	Kab. Pelalawan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang pajak hotel belum dipungut</li> </ul>		9,76	Kab. Cianjur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa transmisi, distribusi dan tertier</li> </ul>		8,12	Kab. Paser
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat PPh dan PPN yang belum disetor oleh BLUD</li> </ul>		5,66	Prov. DKI Jakarta
<b>Denda keterlambatan belum ditetapkan, dipungut/disetor ke kas daerah</b>	<b>303</b>	<b>83,43</b>	<b>223</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pembangunan gedung, bangunan, jalan</li> </ul>		5,38	Kab. Kuantan Singingi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan peningkatan jalan pantai</li> </ul>		3,16	Kab. Nunukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pembangunan jalan, gedung, pagar dan gudang</li> </ul>		3,13	Kab. Mappi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pembangunan stadion utama jember</li> </ul>		1,57	Kab.

sport garden (JSG)			Jember
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pembangunan Gedung Zona 5 RSUD dr. Soeselo Slawi</li> </ul>		1,31	Kab. Tegal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda keterlambatan pada 5 paket pekerjaan pembangunan gedung dan satu paket pengadaan barang diserahkan ke masyarakat belum dikenakan</li> </ul>		1,46	Prov. Kaltim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pekerjaan pada 4 SKPD terlambat diselesaikan dan belum dipungut denda keterlambatan</li> </ul>		1,09	Prov. Maluku
<b>Pengenaan tariff pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan</b>	<b>35</b>	<b>21,39</b>	<b>32</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah – sewa tanah tidak sesuai tariff</li> </ul>		13,72	Prov. Jambi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan</li> </ul>		3,33	Kab. Rembang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tarif pajak hiburan lebih rendah</li> </ul>		0,83	Kab. Pematang Siantar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemungutan PPh atas jasa konstruksi dan jasa konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dan kurang setor</li> </ul>		0,68	Kab. Langkat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut tidak sesuai dengan tariff yang ditetapkan dalam peraturan bupati</li> </ul>		0,33	Kab. Kerinci
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi atas penerbitan izin mendirikan bangunan TA 2014 kurang ditetapkan</li> </ul>		0,28	Kab. Halmahera Utara
<b>Penggunaan langsung penerimaan Negara/daerah</b>	<b>29</b>	<b>3,61</b>	<b>26</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan langsung penerimaan RSUD Kota Pinang</li> </ul>		0,95	Kab. Labuhan Batu Selatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan langsung penerimaan retribusi untuk operasional kantor</li> </ul>		0,50	Kab. Tana Toraja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pelayanan kesehatan</li> </ul>		0,43	Kab. Karawang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan langsung retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sungai Dareh</li> </ul>		0,22	Kab. Dharmasraya
<b>Kekurangan penerimaan lainnya</b>	<b>14</b>	<b>7,55</b>	<b>13</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak disetornya pendapatan RSUD Manokwari ke kas daerah</li> </ul>		5,39	Kab. Manokwari
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa kas PT LTC belum disetor ke kas daerah</li> </ul>		0,45	Kab. Lampung Timur



**LAMPIRAN G. PERMASALAHAN UTAMA PENYIMPANGAN  
ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DAERAH**

<b>Permasalahan Utama dan contohnya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Entitas</b>
<b>Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)</b>	<b>628</b>	<b>330</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap</li> <li>• Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya</li> <li>• Pengelolaan belanja hibah, bantuan social, bantuan keuangan desa, dan jasa konsultasi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban</li> </ul>		
<b>Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah</b>	<b>552</b>	<b>336</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan dan pemanfaatan asset tetap belum tertib</li> <li>• Barang milik daerah tidak didukung dengan data yang andal</li> <li>• Barang yang sudah diserahkan ke masyarakat masih disajikan sebagai asset pemerintah</li> <li>• Penghapusan atas barang milik daerah belum tuntas</li> </ul>		
<b>Kepemilikan asset tidak/belum didukung bukti yang sah</b>	<b>271</b>	<b>253</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kendaraan belum dilengkapi bukti kepemilikan</li> <li>• Tanah hasil pengadaan belum memiliki sertifikat</li> </ul>		
<b>Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan</b>	<b>256</b>	<b>173</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMD melebihi batasan penyertaan modal</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang izin usaha pertambangan belum menyerahkan jaminan reklamasi</li> <li>• Perhitungan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) belum berpedoman pada Undang-undang pajak dan retribusi daerah</li> </ul>		
<p><b>Kelemahan administrasi lainnya</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi persampahan/kebersihan dan pelayanan pasar ke kas daerah</li> <li>• Keterlambatan penyetoran penerimaan pelayanan pendidikan</li> <li>• Keterlambatan penyetoran penerimaan PPh Pasal 21 dan PAD</li> <li>• Keterlambatan penyetoran sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan uang persediaan (UP)</li> <li>• Penyetoran modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah belum memiliki landasan hukum</li> <li>• Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan</li> </ul>		

**LAMPIRAN H. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA**

No	Kabupaten dan Kota	PAD	Bantuan Pusat	Rasio	Kemandirian
1	Pemerintahan Aceh	Rp 1,731,130,839,637.00	Rp 9,838,458,886,191.00	18%	Kurang
2	Kab. Aceh Barat	Rp 112,034,104,121.00	Rp 733,847,802,402.00	15%	Kurang
3	Kab. Aceh Barat Daya	Rp 58,384,755,218.41	Rp 564,667,191,928.86	10%	Sangat Kurang
4	Kab. Aceh Besar	Rp 114,542,978,638.65	Rp 1,054,767,753,429.78	11%	Kurang
5	Kab. Aceh Jaya	Rp 36,406,713,759.23	Rp 483,124,527,706.88	8%	Sangat Kurang
6	Kab. Aceh Selatan	Rp 78,487,063,289.00	Rp 766,871,775,571.00	10%	Sangat Kurang
7	Kab. Aceh Singkil	Rp 31,030,277,201.85	Rp 489,148,349,918.72	6%	Sangat Kurang
8	Kab. Aceh Tamiang	Rp 97,374,583,496.36	Rp 827,607,862,251.89	12%	Kurang
9	Kab. Aceh Tengah	Rp 132,068,284,863.30	Rp 719,818,795,928.03	18%	Kurang
10	Kab. Aceh Tenggara	Rp 56,043,722,456.95	Rp 805,035,126,182.67	7%	Sangat Kurang
11	Kab. Aceh Timur	Rp 86,544,530,935.15	Rp 959,179,302,804.09	9%	Sangat Kurang
12	Kab. Aceh Utara	Rp 178,550,865,626.16	Rp 1,438,194,951,998.67	12%	Kurang
13	Kab. Bener Meriah	Rp 44,090,831,965.00	Rp 545,565,220,472.00	8%	Sangat Kurang
14	Kab. Bireuen	Rp 172,302,227,983.38	Rp 1,148,525,347,572.43	15%	Kurang
15	Kab. Gayo Lues	Rp 28,906,170,977.59	Rp 509,026,966,718.29	6%	Sangat Kurang
16	Kab. Nangan Raya	Rp 65,177,801,946.48	Rp 668,658,223,153.19	10%	Sangat Kurang
17	Kab. Pidie	Rp 166,598,720,922.67	Rp 1,139,200,611,445.49	15%	Kurang
18	Kab. Pidie Jaya	Rp 29,851,341,063.64	Rp 648,115,838,415.86	5%	Sangat Kurang
19	Kab. Simeulue	Rp 34,956,712,854.02	Rp 498,248,621,867.00	7%	Sangat Kurang
20	Kota Banda Aceh	Rp 171,777,275,448.97	Rp 811,552,695,026.00	21%	Sedang
21	Kota Langsa	Rp 114,168,702,058.30	Rp 642,174,417,856.52	18%	Kurang
22	Kota Lhokseumawe	Rp 48,730,219,320.12	Rp 719,540,052,062.62	7%	Sangat Kurang
23	Kota Sabang	Rp 42,723,293,975.24	Rp 407,217,337,606.04	10%	Sangat Kurang

24	Kota Subulussalam	Rp 25,220,557,442.15	Rp 355,995,386,095.24	7%	Sangat Kurang
25	Provinsi Sumatra Utara	Rp 4,416,811,865,266.62	Rp 3,321,429,286,013.00	133%	Sangat baik
26	Kab. Asahan	Rp 91,468,218,558.86	Rp 1,389,864,557,448.00	7%	Sangat Kurang
27	Kab. Batubara	Rp 44,868,572,975.56	Rp 757,145,000,663.00	6%	Sangat Kurang
28	Kab. Dairi	Rp 53,525,854,131.23	Rp 707,094,466,600.00	8%	Sangat Kurang
29	Kab. Deli Serdang	Rp 433,885,507,125.82	Rp 2,007,514,826,334.00	22%	Sedang
30	Kab. Humbang Hasundutan	Rp 29,491,349,500.38	Rp 659,027,826,548.00	4%	Sangat Kurang
31	Kab. Karo	Rp 72,914,095,471.05	Rp 918,228,028,727.00	8%	Sangat Kurang
32	Kab. Labuhanbatu	Rp 109,896,912,458.24	Rp 788,864,385,160.00	14%	Kurang
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	Rp 36,386,788,023.65	Rp 644,715,928,671.00	6%	Sangat Kurang
34	Kab. Langkat	Rp 107,811,975,547.21	Rp 1,540,371,084,996.00	7%	Sangat Kurang
35	Kab. Nias	Rp 65,082,210,841.36	Rp 450,003,985,037.00	14%	Kurang
36	Kab. Padang Lawas Utara	Rp 22,172,689,275.33	Rp 534,310,568,591.00	4%	Sangat Kurang
37	Kab. Pak Pak Barat	Rp 15,388,657,986.30	Rp 436,562,821,698.00	4%	Sangat Kurang
38	Kab. Samosir	Rp 36,849,574,656.55	Rp 513,867,087,315.00	7%	Sangat Kurang
39	Kab. Serdang Bedagai	Rp 74,762,406,401.00	Rp 1,004,351,305,405.00	7%	Sangat Kurang
40	Kab. Simalungun	Rp 96,390,208,715.29	Rp 1,522,430,664,101.00	6%	Sangat Kurang
41	Kab. Tapanuli Selatan	Rp 95,588,202,103.12	Rp 795,282,232,171.00	12%	Kurang
42	Kab. Tapanuli Tengah	Rp 55,364,392,068.85	Rp 734,600,900,058.00	8%	Sangat Kurang
43	Kab. Tapanuli Utara	Rp 63,696,097,398.86	Rp 780,637,089,042.00	8%	Sangat Kurang
44	Kota Binjai	Rp 71,967,137,635.10	Rp 717,043,184,708.00	10%	Sangat Kurang
45	Kota Gunungsitoli	Rp 19,164,450,366.75	Rp 491,480,818,500.00	4%	Sangat Kurang
46	Kota Medan	Rp 1,384,246,114,729.62	Rp 2,657,869,713,502.00	52%	Sangat baik
47	Kota Padangsidimpuan	Rp 58,725,449,619.94	Rp 624,135,723,887.00	9%	Sangat Kurang
48	Kota Pematangsiantar	Rp 90,477,498,256.76	Rp 722,182,429,366.00	13%	Kurang
49	Kota Sibolga	Rp 52,922,967,441.19	Rp 464,357,654,006.00	11%	Kurang

50	Kota Tebing Tinggi	Rp	74,515,273,851.97	Rp	528,535,694,063.00	14%	Kurang
51	Provinsi Sumatra Barat	Rp	1,729,222,284,039.71	Rp	1,895,006,012,551.00	91%	Sangat baik
52	Kab. Agam	Rp	79,418,015,100.62	Rp	1,040,367,827,202.00	8%	Sangat Kurang
53	Kab. Dharmasraya	Rp	52,811,257,415.12	Rp	626,638,129,141.00	8%	Sangat Kurang
54	Kab. Kepulauan Mentawai	Rp	36,444,071,105.24	Rp	659,207,368,330.00	6%	Sangat Kurang
55	Kab. Lima Puluh Kota	Rp	52,829,354,363.69	Rp	951,232,277,513.00	6%	Sangat Kurang
56	Kab. Padang Pariaman	Rp	62,821,048,940.10	Rp	999,677,221,517.00	6%	Sangat Kurang
57	Kab. Pasaman	Rp	72,878,860,051.17	Rp	737,066,849,309.00	10%	Sangat Kurang
58	Kab. Pasaman Barat	Rp	69,925,195,482.20	Rp	809,464,052,377.00	9%	Sangat Kurang
59	Kab. Pesisir Selatan	Rp	86,699,821,743.34	Rp	1,082,264,394,015.00	8%	Sangat Kurang
60	Kab. Sijunjung	Rp	54,261,421,578.22	Rp	748,241,681,501.22	7%	Sangat Kurang
61	Kab. Solok	Rp	51,502,148,550.00	Rp	936,616,143,196.00	5%	Sangat Kurang
62	Kab. Solok Selatan	Rp	32,342,605,637.16	Rp	595,659,027,818.00	5%	Sangat Kurang
63	Kab. Tanah Datar	Rp	99,694,236,766.69	Rp	903,513,077,359.00	11%	Kurang
64	Kota Bukit Tinggi	Rp	61,613,681,043.00	Rp	533,811,302,544.00	12%	Kurang
65	Kota Padang	Rp	315,678,797,930.44	Rp	1,579,068,821,954.00	20%	Kurang
66	Kota Padang Panjang	Rp	51,601,386,498.33	Rp	378,768,402,671.00	14%	Kurang
67	Kota Pariaman	Rp	26,677,826,163.98	Rp	525,545,020,914.00	5%	Sangat Kurang
68	Kota Payakumbuh	Rp	65,900,626,216.33	Rp	536,605,001,965.00	12%	Kurang
69	Kota Sawahlunto	Rp	48,580,391,650.27	Rp	436,449,625,354.00	11%	Kurang
70	Kota Solok	Rp	29,522,681,473.46	Rp	459,406,757,839.00	6%	Sangat Kurang
71	Provinsi Riau	Rp	3,245,087,745,089.53	Rp	4,887,322,146,743.00	66%	Sangat baik
72	Kab. Bengkalis	Rp	253,347,320,754.24	Rp	3,724,565,320,385.76	7%	Sangat Kurang
73	Kab. Indragiri Hilir	Rp	105,652,588,332.49	Rp	1,700,103,511,077.65	6%	Sangat Kurang
74	Kab. Indragiri Hulu	Rp	111,827,898,830.96	Rp	1,515,887,532,834.12	7%	Sangat Kurang
75	Kab. Kampar	Rp	188,653,172,768.25	Rp	2,484,922,833,542.18	8%	Sangat Kurang

76	Kab. Kepulauan Meranti	Rp	62,850,644,834.26	Rp	1,113,694,801,807.08	6%	Sangat Kurang
77	Kab. Kuantan Singingi	Rp	61,698,721,113.94	Rp	1,353,651,314,801.71	5%	Sangat Kurang
78	Kab. Pelalawan	Rp	86,278,846,807.95	Rp	1,399,128,343,300.51	6%	Sangat Kurang
79	Kab. Rokan Hilir	Rp	86,143,189,934.62	Rp	2,303,118,247,886.53	4%	Sangat Kurang
80	Kab. Rokan Hulu	Rp	90,890,315,698.66	Rp	1,351,576,985,254.27	7%	Sangat Kurang
81	Kab. Siak	Rp	309,862,790,957.13	Rp	2,338,091,062,620.03	13%	Kurang
82	Kota Dumai	Rp	153,223,679,194.87	Rp	1,046,192,617,476.28	15%	Kurang
83	Kota Pekanbaru	Rp	440,550,158,026.39	Rp	1,919,642,118,749.27	23%	Sedang
84	Provinsi Jambi	Rp	1,281,243,472,806.44	Rp	1,882,425,324,006.00	68%	Sangat baik
85	Kab. Batang Hari	Rp	70,809,104,649.66	Rp	878,961,220,495.00	8%	Sangat Kurang
86	Kab. Bungo	Rp	107,019,908,939.41	Rp	924,354,873,264.00	12%	Kurang
87	Kab. Kerinci	Rp	55,550,777,965.91	Rp	791,670,296,984.00	7%	Sangat Kurang
88	Kab. Merangin	Rp	67,200,333,088.58	Rp	947,899,452,306.00	7%	Sangat Kurang
89	Kab. Muaro Jambi	Rp	61,611,858,861.86	Rp	919,570,451,129.00	7%	Sangat Kurang
90	Kab. Sarolangun	Rp	60,955,222,149.96	Rp	832,540,933,587.00	7%	Sangat Kurang
91	Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp	73,098,923,519.10	Rp	1,019,586,258,490.00	7%	Sangat Kurang
92	Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp	34,687,282,551.67	Rp	885,838,562,424.00	4%	Sangat Kurang
93	Kab. Tebo	Rp	56,845,780,301.53	Rp	826,516,826,093.00	7%	Sangat Kurang
94	Kota Jambi	Rp	246,427,699,826.28	Rp	1,064,949,342,896.00	23%	Sedang
95	Kota Sungai Penuh	Rp	33,199,858,218.30	Rp	557,064,371,432.00	6%	Sangat Kurang
96	Provinsi Sumatra Selatan	Rp	2,422,673,788,768.86	Rp	3,809,213,539,367.65	64%	Sangat baik
97	Kab. Banyuasin	Rp	106,917,589,923.06	Rp	1,528,099,956,749.16	7%	Sangat Kurang
98	Kab. Empat lawang	Rp	32,656,389,092.31	Rp	74,874,133,237,941.00	0%	Sangat Kurang
99	Kab. Lahat	Rp	125,319,372,145.89	Rp	1,270,995,434,433.10	10%	Sangat Kurang
100	Kab. Muara Enim	Rp	138,705,896,244.15	Rp	1,613,011,610,429.01	9%	Sangat Kurang

101	Kab. Musi Banyuasin	Rp	172,924,886,329.95	Rp	2,953,538,687,254.56	6%	Sangat Kurang
102	Kab. Musi Rawas	Rp	120,152,665,892.99	Rp	1,005,660,563,209.19	12%	Kurang
103	Kab. Musi Rawas Utara	Rp	21,349,935,082.44	Rp	545,765,886,843.00	4%	Sangat Kurang
104	Kab. Ogan Ilir	Rp	49,061,109,820.33	Rp	1,004,584,272,915.35	5%	Sangat Kurang
105	Kab. Ogan Kemering ilir	Rp	145,590,658,057.19	Rp	1,296,514,817,686.33	11%	Kurang
106	Kab. Ogan Kemering Ulu	Rp	79,344,461,049.83	Rp	913,783,332,696.00	9%	Sangat Kurang
107	Kab. OKU Selatan	Rp	3,147,644,444.97	Rp	11,053,628,695.14	28%	Sedang
108	Kab. OKU Timur	Rp	62,418,322,201.39	Rp	973,126,518,541.00	6%	Sangat Kurang
109	Kab. Penukal Arab Lematang Ilir	Rp	8,903,213,895.13	Rp	319,964,872,329.00	3%	Sangat Kurang
110	Kota Lubuk Linggau	Rp	50,181,249,514.31	Rp	759,035,672,331.28	7%	Sangat Kurang
111	Kota Pagar Alam	Rp	40,661,820,108.80	Rp	655,716,332,552.65	6%	Sangat Kurang
112	Kota Palembang	Rp	734,218,688,570.79	Rp	2,094,810,134,822.48	35%	Cukup
113	Kota Prabumulih	Rp	64,169,588,731.40	Rp	749,378,376,264.61	9%	Sangat Kurang
114	Provinsi Bengkulu	Rp	672,064,468,248.82	Rp	1,311,790,979,017.00	51%	Sangat baik
115	Kab. Bengkulu Selatan	Rp	40,100,659,786.64	Rp	659,558,684,716.58	6%	Sangat Kurang
116	Kab. Bengkulu Tengah	Rp	16,477,747,495.40	Rp	552,346,233,653.67	3%	Sangat Kurang
117	Kab. Bengkulu Utara	Rp	51,659,109,965.54	Rp	747,003,951,654.25	7%	Sangat Kurang
118	Kab. Kaur	Rp	19,493,428,861.87	Rp	520,046,566,901.34	4%	Sangat Kurang
119	Kab. Kepahiang	Rp	28,183,721,899.10	Rp	546,453,835,118.37	5%	Sangat Kurang
120	Kab. Lebong	Rp	17,498,314,380.33	Rp	509,117,966,972.24	3%	Sangat Kurang
121	Kab. Mukomuko	Rp	34,892,901,396.86	Rp	572,216,159,913.54	6%	Sangat Kurang
122	Kab. Rejang Lebong	Rp	64,936,983,995.77	Rp	736,221,091,131.48	9%	Sangat Kurang
123	Kab. Seluma	Rp	25,607,988,161.57	Rp	611,440,890,161.09	4%	Sangat Kurang
124	Kota Bengkulu	Rp	81,754,841,665.45	Rp	843,443,609,354.50	10%	Sangat Kurang
125	Provinsi Lampung	Rp	2,274,685,572,912.86	Rp	1,472,486,568,518.00	154%	Sangat baik

126	Kab. Lampung Barat	Rp	40,800,358,949.56	Rp	590,436,745,534.00	7%	Sangat Kurang
127	Kab. Lampung Selatan	Rp	132,168,294,855.96	Rp	1,217,992,471,165.00	11%	Kurang
128	Kab. Lampung Tengah	Rp	108,180,987,618.02	Rp	1,681,052,640,416.00	6%	Sangat Kurang
129	Kab. Lampung Timur	Rp	83,131,971,570.03	Rp	1,467,440,582,678.00	6%	Sangat Kurang
130	Kab. Lampung Utara	Rp	80,918,349,920.71	Rp	1,211,513,327,601.00	7%	Sangat Kurang
131	Kab. Mesuji	Rp	20,901,990,434.66	Rp	535,394,648,191.00	4%	Sangat Kurang
132	Kab. Pesawaran	Rp	36,482,436,458.71	Rp	877,092,944,071.00	4%	Sangat Kurang
133	Kabupaten Pesisir Barat	Rp	10,398,965,479.72	Rp	344,022,355,600.00	3%	Sangat Kurang
134	Kab. Pringsewu	Rp	63,339,740,419.74	Rp	818,572,735,687.00	8%	Sangat Kurang
135	Kab. Tanggamus	Rp	22,488,697,780.02	Rp	850,100,136,648.00	3%	Sangat Kurang
136	Kab. Tulang Bawang	Rp	24,444,892,153.16	Rp	756,770,696,482.00	3%	Sangat Kurang
137	Kab. Tulang Bawang Barat	Rp	17,262,915,190.50	Rp	604,915,618,283.00	3%	Sangat Kurang
138	Kab. Way Kanan	Rp	45,811,422,785.85	Rp	825,482,193,577.00	6%	Sangat Kurang
139	Kota Bandar Lampung	Rp	394,646,889,446.59	Rp	1,375,287,940,150.00	29%	Sedang
140	Kota Metro	Rp	97,421,477,067.36	Rp	601,990,248,490.00	16%	Kurang
141	Provinsi Bangka Belitung	Rp	563,108,840,861.42	Rp	1,156,665,582,595.00	49%	Baik
142	Kab. Bangka	Rp	89,113,748,853.54	Rp	830,213,863,197.49	11%	Kurang
143	Kab. Bangka Barat	Rp	39,916,055,462.69	Rp	641,715,397,522.84	6%	Sangat Kurang
144	Kab. Bangka Selatan	Rp	28,907,044,191.72	Rp	627,646,047,080.34	5%	Sangat Kurang
145	Kab. Bangka Tengah	Rp	61,632,402,924.42	Rp	598,313,177,631.24	10%	Sangat Kurang
146	Kab. Belitung	Rp	110,451,451,677.67	Rp	646,778,515,726.16	17%	Kurang
147	Kab. Belitung Timur	Rp	72,695,257,570.74	Rp	569,531,726,597.23	13%	Kurang
148	Kota Pangkal Pinang	Rp	113,817,278,385.97	Rp	632,070,856,429.12	18%	Kurang
149	Provinsi Kepulauan Riau	Rp	1,070,208,288,698.16	Rp	1,848,977,043,176.00	58%	Sangat baik
150	Kab. Bintan	Rp	190,843,040,464.25	Rp	667,690,986,625.12	29%	Sedang
151	Kab. Karimun	Rp	310,386,407,101.08	Rp	650,473,950,472.08	48%	Baik



152	Kab. Anambas	Rp	21,489,585,792.80	Rp	815,081,102,668.89	3%	Sangat Kurang
153	Kab. Lingga	Rp	21,010,343,891.22	Rp	640,583,210,734.74	3%	Sangat Kurang
154	Kab. Natuna	Rp	39,404,360,299.17	Rp	1,116,906,579,323.86	4%	Sangat Kurang
155	Kota Batam	Rp	779,944,837,450.53	Rp	1,112,513,770,530.29	70%	Sangat baik
156	Kota Tanjungpinang	Rp	125,170,740,484.86	Rp	713,137,525,338.17	18%	Kurang
157	Provinsi DKI Jakarta	Rp	31,274,215,885,719.00	Rp	12,160,469,922,272.00	257%	Sangat baik
158	Provinsi Jawa Barat	Rp	15,018,153,309,919.00	Rp	7,250,566,866,517.00	207%	Sangat baik
159	Kab. Bandung	Rp	702,045,372,759.08	Rp	3,092,824,175,044.00	23%	Sedang
160	Kab. Bandung Barat	Rp	248,697,185,722.70	Rp	1,564,194,843,926.00	16%	Kurang
161	Kab. Bekasi	Rp	1,547,787,549,382.00	Rp	2,318,302,208,248.00	67%	Sangat baik
162	Kab. Bogor	Rp	1,712,937,376,136.16	Rp	3,495,272,539,177.00	49%	Baik
163	Kab. Ciamis	Rp	162,320,228,014.08	Rp	1,658,997,764,825.00	10%	Sangat Kurang
164	Kab. Cianjur	Rp	411,538,567,542.95	Rp	2,098,464,782,783.00	20%	Kurang
165	Kab. Cirebon	Rp	452,870,109,028.00	Rp	2,165,818,948,459.00	21%	Kurang
166	Kab. Garut	Rp	2,056,832,593,361.00	Rp	2,630,765,368,597.00	78%	Sangat baik
167	Kab. Indramayu	Rp	328,116,166,964.00	Rp	2,056,832,593,361.00	16%	Kurang
168	Kab. Karawang	Rp	909,158,490,944.00	Rp	2,239,682,990,685.00	41%	Cukup
169	Kab. Kuningan	Rp	202,517,821,120.00	Rp	1,842,807,874,071.00	11%	Kurang
170	Kab. Majalengka	Rp	223,120,890,621.00	Rp	1,650,113,276,898.00	14%	Kurang
171	Kab. Pangandaran	Rp	32,473,188,880.00	Rp	595,195,357,929.00	5%	Sangat Kurang
172	Kab. Purwakarta	Rp	293,833,261,345.00	Rp	1,248,591,759,595.00	24%	Sedang
173	Kab. Subang	Rp	262,614,860,828.00	Rp	1,961,271,507,293.00	13%	Kurang
174	Kab. Sukabumi	Rp	457,059,973,434.86	Rp	2,266,689,907,695.00	20%	Kurang
175	Kab. Sumedang	Rp	361,809,842,760.30	Rp	1,637,670,747,440.00	22%	Sedang
176	Kab. Tasikmalaya	Rp	154,225,170,573.00	Rp	2,043,157,156,475.00	8%	Sangat Kurang
177	Kota Bandung	Rp	1,718,057,298,378.00	Rp	3,065,609,444,766.00	56%	Sangat baik

178	Kota Banjar	Rp	118,592,601,620.00	Rp	554,115,890,632.00	21%	Sedang
179	Kota Bekasi	Rp	1,205,363,127,728.55	Rp	2,152,245,991,251.00	56%	Sangat baik
180	Kota Bogor	Rp	544,835,708,254.00	Rp	1,188,391,596,875.00	46%	Baik
181	kota Cimahi	Rp	227,949,120,180.56	Rp	857,892,194,854.00	27%	Sedang
182	Kota Cirebon	Rp	298,540,660,324.00	Rp	873,423,813,040.00	34%	Cukup
183	Kota Depok	Rp	659,173,522,492.23	Rp	1,531,177,020,576.00	43%	Baik
184	Kota Sukabumi	Rp	258,467,192,313.00	Rp	709,999,109,287.00	36%	Cukup
185	Kota Tasikmalaya	Rp	253,450,505,778.21	Rp	1,143,506,296,816.00	22%	Sedang
186	Provinsi Jawa Tengah	Rp	9,916,358,231,432.00	Rp	5,210,592,932,680.00	190%	Sangat baik
187	Kab. Banjarnegara	Rp	161,652,537,773.00	Rp	1,241,745,724,866.00	13%	Kurang
188	Kab. Banyumas	Rp	435,597,688,642.40	Rp	1,821,609,022,338.00	24%	Sedang
189	Kab. Batang	Rp	172,638,212,951.92	Rp	996,496,336,760.00	17%	Kurang
190	Kab. Blora	Rp	144,724,169,929.00	Rp	1,291,175,772,181.00	11%	Kurang
191	Kab. Boyolali	Rp	227,516,495,964.00	Rp	1,060,318,727,801.00	21%	Sedang
192	Kab. Brebes	Rp	257,770,613,635.00	Rp	1,676,188,178,862.00	15%	Kurang
193	Kab. Cilacap	Rp	374,023,664,012.65	Rp	1,989,620,436,527.00	19%	Kurang
194	Kab. Demak	Rp	220,329,949,471.00	Rp	1,417,236,369,503.00	16%	Kurang
195	Kab. Grobogan	Rp	235,295,346,522.00	Rp	1,432,450,581,331.00	16%	Kurang
196	Kab. Jepara	Rp	231,673,059,919.00	Rp	1,367,000,562,384.00	17%	Kurang
197	Kab. Karanganyar	Rp	215,298,860,199.00	Rp	1,320,130,708,911.00	16%	Kurang
198	Kab. Kebumen	Rp	242,079,502,075.00	Rp	1,723,930,277,062.00	14%	Kurang
199	Kab. Kendal	Rp	215,294,060,700.00	Rp	964,405,138,040.00	22%	Sedang
200	Kab. Klaten	Rp	177,922,415,860.00	Rp	1,673,049,937,033.00	11%	Kurang
201	Kab. Kudus	Rp	234,073,380,352.00	Rp	1,277,010,279,673.00	18%	Kurang
202	Kab. Magelang	Rp	242,448,677,267.00	Rp	1,371,853,521,157.00	18%	Kurang
203	Kab. Pati	Rp	279,254,884,135.00	Rp	1,558,287,730,084.00	18%	Kurang

204	Kab. Pekalongan	Rp	225,037,017,191.46	Rp	1,219,463,619,186.00	18%	Kurang
205	Kab. Pemalang	Rp	217,345,439,974.00	Rp	1,427,909,330,523.00	15%	Kurang
206	Kab. Purbalingga	Rp	202,593,689,614.00	Rp	1,138,928,031,787.00	18%	Kurang
207	Kab. Purworejo	Rp	200,259,501,329.00	Rp	1,240,530,591,533.00	16%	Kurang
208	Kab. Rembang	Rp	165,530,925,487.27	Rp	1,021,258,285,387.00	16%	Kurang
209	Kab. Semarang	Rp	248,213,039,938.00	Rp	1,233,141,787,684.00	20%	Kurang
210	Kab. Sragen	Rp	254,392,449,817.00	Rp	1,404,489,702,182.00	18%	Kurang
211	Kab. Sukoharjo	Rp	264,814,413,083.00	Rp	1,224,112,760,630.00	22%	Sedang
212	Kab. Tegal	Rp	253,716,602,369.00	Rp	1,484,366,472,437.00	17%	Kurang
213	Kab. Temanggung	Rp	160,726,943,432.00	Rp	1,030,950,406,014.00	16%	Kurang
214	Kab. Wonogiri	Rp	182,149,063,108.00	Rp	1,476,103,563,342.00	12%	Kurang
215	Kab. Wonosobo	Rp	1,476,103,563,342.00	Rp	1,476,103,563,342.00	100%	Sangat baik
216	Kota Magelang	Rp	164,927,631,230.00	Rp	561,180,543,171.00	29%	Sedang
217	Kota Pekalongan	Rp	144,055,424,017.00	Rp	554,131,875,764.00	26%	Sedang
218	Kota Salatiga	Rp	165,747,645,080.00	Rp	561,872,223,732.00	29%	Sedang
219	Kota Semarang	Rp	1,138,367,228,493.00	Rp	1,958,242,550,296.00	58%	Sangat baik
220	Kota Surakarta	Rp	335,660,206,640.82	Rp	1,146,836,814,312.00	29%	Sedang
221	Kota Tegal	Rp	241,936,166,929.00	Rp	556,587,071,261.00	43%	Baik
222	Prov DIY	Rp	1,464,604,954,200.16	Rp	1,666,443,974,080.00	88%	Sangat baik
223	Kab. Bantul	Rp	357,411,062,723.21	Rp	1,421,248,281,272.54	25%	Sedang
224	Kab. Gunung Kidul	Rp	159,304,338,220.22	Rp	1,182,972,315,633.12	13%	Kurang
225	Kab. Kulon Progo	Rp	158,623,927,339.19	Rp	934,001,271,245.47	17%	Kurang
226	Kab. Sleman	Rp	573,337,599,560.11	Rp	1,499,148,394,633.56	38%	Cukup
227	Kota Yogyakarta	Rp	470,641,528,444.03	Rp	989,100,906,639.78	48%	Baik
228	Prov. Jawa Timur	Rp	14,442,216,534,958.90	Rp	6,284,788,710,312.00	230%	Sangat baik
229	Kab. Bangkalan	Rp	135,785,489,733.88	Rp	1,372,537,369,448.00	10%	Sangat Kurang

230	Kab. Banyuwangi	Rp	283,488,703,181.03	Rp	1,989,017,340,887.00	14%	Kurang
231	Kab. Blitar	Rp	188,827,430,090.89	Rp	1,625,297,146,359.00	12%	Kurang
232	Kab. Bojonegoro	Rp	291,244,903,352.15	Rp	2,135,850,930,198.00	14%	Kurang
233	Kab. Bondowoso	Rp	134,684,701,401.68	Rp	1,238,611,083,374.00	11%	Kurang
234	Kab. Gresik	Rp	700,587,792,877.47	Rp	1,484,521,467,104.00	47%	Baik
235	Kab. Jember	Rp	440,462,012,490.69	Rp	2,332,871,944,529.00	19%	Kurang
236	Kab. Jombang	Rp	304,065,301,093.38	Rp	1,543,752,120,108.00	20%	Kurang
237	Kab. Kediri	Rp	295,295,340,021.17	Rp	1,770,618,065,216.00	17%	Kurang
238	Kab. Lamongan	Rp	272,409,285,215.81	Rp	1,604,396,466,467.00	17%	Kurang
239	Kab. Lumajang	Rp	194,076,104,164.10	Rp	1,335,277,899,152.00	15%	Kurang
240	Kab. Madiun	Rp	121,390,771,373.60	Rp	1,221,635,769,128.00	10%	Sangat Kurang
241	Kab. Magetan	Rp	141,162,943,323.69	Rp	1,330,555,120,386.00	11%	Kurang
242	Kab. Malang	Rp	411,185,107,107.13	Rp	2,646,536,514,726.00	16%	Kurang
243	Kab. Mojokerto	Rp	357,924,994,262.11	Rp	1,391,533,094,129.00	26%	Sedang
244	Kab. Nganjuk	Rp	255,957,914,871.74	Rp	1,568,917,301,474.00	16%	Kurang
245	Kab. Ngawi	Rp	169,237,013,272.36	Rp	1,457,858,827,983.00	12%	Kurang
246	Kab. Pacitan	Rp	101,276,945,021.59	Rp	1,054,553,814,042.00	10%	Sangat Kurang
247	Kab. Pamekasan	Rp	171,518,204,166.97	Rp	1,242,188,934,874.00	14%	Kurang
248	Kab. Pasuruan	Rp	421,442,629,861.45	Rp	1,751,783,870,630.00	24%	Sedang
249	Kab. Ponorogo	Rp	198,730,421,479.94	Rp	1,450,906,695,456.00	14%	Kurang
250	Kab. Probolinggo	Rp	195,263,627,246.23	Rp	1,389,679,735,705.00	14%	Kurang
251	Kab. Sampang	Rp	123,039,103,222.87	Rp	1,113,203,231,798.00	11%	Kurang
252	Kab. Sidoarjo	Rp	1,115,332,938,500.16	Rp	2,103,999,540,495.00	53%	Sangat baik
253	Kab. Situbondo	Rp	129,640,577,933.62	Rp	1,156,284,408,115.00	11%	Kurang
254	Kab. Sumenep	Rp	162,371,865,154.17	Rp	1,437,587,324,640.00	11%	Kurang
255	Kab. Trenggalek	Rp	132,951,069,331.87	Rp	1,308,890,814,109.00	10%	Sangat Kurang

256	Kab. Tuban	Rp	291,079,944,393.40	Rp	1,499,334,455,247.00	19%	Kurang
257	Kab. Tulungagung	Rp	276,577,973,500.22	Rp	1,837,980,458,369.00	15%	Kurang
258	Kota Batu	Rp	80,493,920,959.53	Rp	622,534,992,445.00	13%	Kurang
259	Kota Blitar	Rp	102,757,907,576.34	Rp	600,176,929,228.00	17%	Kurang
260	Kota Kediri	Rp	207,529,193,679.15	Rp	979,119,578,183.00	21%	Sedang
261	Kota Madiun	Rp	134,584,344,293.39	Rp	779,727,369,746.00	17%	Kurang
262	Kota Malang	Rp	372,545,396,292.03	Rp	1,373,296,293,363.00	27%	Sedang
263	Kota Mojokerto	Rp	105,277,492,017.80	Rp	580,809,016,051.00	18%	Kurang
264	Kota Pasuruan	Rp	100,647,029,803.49	Rp	600,935,504,562.00	17%	Kurang
265	Kota Probolinggo	Rp	135,062,805,887.61	Rp	683,362,100,310.00	20%	Kurang
266	Kota Surabaya	Rp	3,307,323,863,978.47	Rp	2,721,487,993,061.00	122%	Sangat baik
267	Prov Banten	Rp	4,899,125,741,756.00	Rp	1,159,872,633,122.00	422%	Sangat baik
268	Kab. Lebak	Rp	244,448,053,657.15	Rp	1,796,231,788,248.15	14%	Kurang
269	Kab. Pandeglang	Rp	140,046,902,014.24	Rp	1,606,084,592,532.00	9%	Sangat Kurang
270	Kab. Serang	Rp	464,326,280,197.00	Rp	1,439,356,757,210.00	32%	Cukup
271	Kab. Tangerang	Rp	1,576,315,878,393.00	Rp	2,105,537,374,448.00	75%	Sangat baik
272	Kota Cilegon	Rp	467,960,299,677.00	Rp	806,230,954,523.00	58%	Sangat baik
273	Kota Serang	Rp	97,827,597,434.00	Rp	873,460,253,533.00	11%	Kurang
274	Kota Tangerang	Rp	1,810,414,602,536.59	Rp	1,788,230,988,126.00	101%	Sangat baik
275	Kota Tangerang Selatan	Rp	1,023,817,429,319.00	Rp	1,244,631,795,574.00	82%	Sangat baik
276	Provinsi Bali	Rp	2,920,416,697,074.56	Rp	1,647,611,927,002.47	177%	Sangat baik
277	Kab. Badung	Rp	2,722,625,562,620.69	Rp	666,810,980,390.22	408%	Sangat baik
278	Kab. Bangli	Rp	76,141,461,020.04	Rp	716,286,217,990.92	11%	Kurang
279	Kab. Buleleng	Rp	219,682,330,020.37	Rp	1,323,434,563,035.71	17%	Kurang
280	Kab. Gianyar	Rp	424,782,236,418.88	Rp	974,956,281,166.86	44%	Baik
281	Kab. Jembrana	Rp	89,349,644,542.62	Rp	731,852,765,724.64	12%	Kurang

282	Kab. Karangasem	Rp	239,425,004,469.89	Rp	933,033,205,357.82	26%	Sedang
283	Kab. Klungkung	Rp	98,837,765,832.75	Rp	718,964,641,054.29	14%	Kurang
284	Kab. Tabanan	Rp	273,411,753,679.78	Rp	1,089,031,929,713.26	25%	Sedang
285	Kab. Denpasar	Rp	698,739,758,265.29	Rp	1,024,868,882,535.04	68%	Sangat baik
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	1,115,060,397,173.45	Rp	1,672,366,844,641.00	67%	Sangat baik
287	Kab. Bima	Rp	100,898,999,652.35	Rp	924,962,872,285.40	11%	Kurang
288	Kab. Dompu	Rp	75,370,940,344.00	Rp	713,417,226,120.08	11%	Kurang
289	Kab. Lombok Barat	Rp	169,108,924,482.66	Rp	964,570,970,626.48	18%	Kurang
290	Kab. Lombok Tengah	Rp	140,507,905,589.16	Rp	1,269,876,763,367.76	11%	Kurang
291	Kab. Lombok Timur	Rp	180,308,182,148.09	Rp	1,505,439,317,611.11	12%	Kurang
292	Kab. Lombok Utara	Rp	81,090,502,359.92	Rp	490,844,229,922.58	17%	Kurang
293	Kab. Sumbawa	Rp	126,129,383,069.28	Rp	1,026,346,434,467.71	12%	Kurang
294	Kab. Sumbawa Barat	Rp	42,509,446,245.27	Rp	587,483,358,365.77	7%	Sangat Kurang
295	Kota Bima	Rp	23,665,602,709.36	Rp	576,913,977,752.23	4%	Sangat Kurang
296	Kota Mataram	Rp	202,584,643,067.01	Rp	869,490,722,898.23	23%	Sedang
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp	763,300,806,702.00	Rp	2,016,666,627,275.00	38%	Cukup
298	Kab. Alor	Rp	41,455,306,647.46	Rp	671,774,665,734.00	6%	Sangat Kurang
299	Kab. Belu	Rp	70,227,478,518.70	Rp	515,647,707,537.00	14%	Kurang
300	Kab. Ende	Rp	61,000,829,122.68	Rp	709,895,152,336.00	9%	Sangat Kurang
301	Kab. Flores Timur	Rp	44,528,326,885.99	Rp	701,259,544,069.00	6%	Sangat Kurang
302	Kab. Manggarai	Rp	72,537,773,352.26	Rp	627,007,693,138.13	12%	Kurang
303	Kab. Manggarai Barat	Rp	51,499,162,120.11	Rp	633,187,799,954.00	8%	Sangat Kurang
304	Kab. Manggarai Timur	Rp	22,053,561,300.68	Rp	572,532,548,200.00	4%	Sangat Kurang
305	Kab. Ngada	Rp	38,948,646,034.33	Rp	536,999,985,305.00	7%	Sangat Kurang
306	Kab. Sabu Raijua	Rp	26,975,204,349.00	Rp	416,379,323,896.00	6%	Sangat Kurang

307	Kab. Sumba Barat	Rp	32,649,628,297.52	Rp	448,094,293,309.00	7%	Sangat Kurang
308	Kab. Sumba Barat Daya	Rp	36,136,621,234.63	Rp	520,144,538,440.00	7%	Sangat Kurang
309	Kab. Sumba Tengah	Rp	19,270,679,660.63	Rp	392,588,082,806.00	5%	Sangat Kurang
310	Kab. Sumba Timur	Rp	62,609,245,757.00	Rp	717,873,060,843.00	9%	Sangat Kurang
311	Kab. Timor Tengah Selatan	Rp	61,898,590,785.10	Rp	857,878,518,332.00	7%	Sangat Kurang
312	Kab. Timor Tengah Utara	Rp	32,029,110,641.22	Rp	655,514,540,919.00	5%	Sangat Kurang
313	Kota Kupang	Rp	113,032,803,506.97	Rp	848,156,798,315.00	13%	Kurang
314	Provinsi Kalimantan Barat	Rp	1,621,610,890,848.66	Rp	2,092,103,740,022.00	78%	Sangat baik
315	Kab. Bengkayang	Rp	37,591,715,170.35	Rp	675,327,773,724.91	6%	Sangat Kurang
316	Kab. Kapuas Hulu	Rp	80,897,012,028.41	Rp	1,098,082,202,709.00	7%	Sangat Kurang
317	Kab. Kayong Utara	Rp	17,452,030,854.08	Rp	499,777,447,470.91	3%	Sangat Kurang
318	Kab. Ketapang	Rp	110,300,249,782.83	Rp	1,313,087,235,521.00	8%	Sangat Kurang
319	Kab. Kubu Raya	Rp	97,407,483,796.39	Rp	868,834,058,122.91	11%	Kurang
320	Kab. Landak	Rp	85,690,913,103.69	Rp	802,963,166,033.71	11%	Kurang
321	Kab. Melawi	Rp	27,198,582,017.81	Rp	754,295,700,586.00	4%	Sangat Kurang
322	Kab. Pontianak (mempawah)	Rp	60,340,345,243.92	Rp	697,089,959,727.91	9%	Sangat Kurang
323	Kab. Sambas	Rp	119,494,577,985.98	Rp	1,052,737,654,926.91	11%	Kurang
324	Kab. Sanggau	Rp	82,393,250,925.93	Rp	1,028,090,757,752.71	8%	Sangat Kurang
325	Kab. Sekadau	Rp	34,446,701,162.96	Rp	576,676,473,928.91	6%	Sangat Kurang
326	Kab. Sintang	Rp	96,284,966,370.04	Rp	1,101,057,752,014.00	9%	Sangat Kurang
327	Kota Pontianak	Rp	298,768,480,274.53	Rp	1,031,188,316,755.91	29%	Sedang
328	Kota Singkawang	Rp	90,012,140,476.19	Rp	626,600,793,055.91	14%	Kurang
329	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp	1,253,708,122,296.09	Rp	1,562,083,561,094.00	80%	Sangat baik
330	Kab. Barito Selatan	Rp	32,814,636,483.83	Rp	744,012,587,441.61	4%	Sangat Kurang
331	Kab. Barito Timur	Rp	60,796,731,625.25	Rp	676,432,540,695.75	9%	Sangat Kurang

332	Kab. Barito Utara	Rp	41,508,164,460.74	Rp	813,077,816,395.79	5%	Sangat Kurang
333	Kab. Gunung Mas	Rp	32,033,588,783.29	Rp	708,412,425,373.00	5%	Sangat Kurang
334	Kab. Kapuas	Rp	72,316,999,794.22	Rp	1,154,641,150,305.88	6%	Sangat Kurang
335	Kab. Katingan	Rp	50,959,197,565.90	Rp	852,540,489,412.96	6%	Sangat Kurang
336	Kab. Kotawaringin Barat	Rp	121,396,033,600.09	Rp	863,844,114,212.57	14%	Kurang
337	Kab. Kotawaringin Timur	Rp	171,262,043,654.20	Rp	1,098,343,090,015.53	16%	Kurang
338	Kab. Lamandau	Rp	32,037,968,713.97	Rp	578,291,063,536.19	6%	Sangat Kurang
339	Kab. Murung Raya	Rp	38,138,507,758.80	Rp	873,141,180,015.12	4%	Sangat Kurang
340	Kab. Pulau Pisau	Rp	31,155,819,392.39	Rp	667,162,142,431.92	5%	Sangat Kurang
341	Kab. Seruyan	Rp	30,268,270,771.84	Rp	780,981,041,261.67	4%	Sangat Kurang
342	Kab. Sukamara	Rp	22,494,679,977.61	Rp	525,071,478,062.27	4%	Sangat Kurang
343	Kota Palangkaraya	Rp	88,001,254,976.36	Rp	875,687,524,745.68	10%	Sangat Kurang
344	Provinsi Kalimantan Timur	Rp	6,663,113,274,491.13	Rp	4,253,320,982,625.00	157%	Sangat baik
345	Kab. Berau	Rp	240,856,792,138.07	Rp	1,880,199,384,647.00	13%	Kurang
346	Kab. Kutai Barat	Rp	106,406,970,634.35	Rp	1,471,283,655,514.00	7%	Sangat Kurang
347	Kab. Kutai Kartanegara	Rp	338,775,287,401.43	Rp	5,813,145,104,038.00	6%	Sangat Kurang
348	Kab. Kutai Timur	Rp	213,875,483,349.60	Rp	3,020,995,457,208.00	7%	Sangat Kurang
349	Kab. Paser	Rp	111,052,683,654.88	Rp	1,703,182,623,101.00	7%	Sangat Kurang
350	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-
351	Kota Balikpapan	Rp	752,582,581,776.47	Rp	1,742,127,915,182.00	43%	Baik
352	Kota Bontang	Rp	160,367,872,157.65	Rp	1,212,180,697,143.00	13%	Kurang
353	Kota Samarinda	Rp	435,498,980,673.66	Rp	1,721,772,679,351.00	25%	Sedang
354	Kab. Mahakan Ulu	Rp	3,723,189,618.96	Rp	591,377,379,102.75	1%	Sangat Kurang
355	Provinsi Kalimantan Utara	Rp	11,833,885,267.48	Rp	1,301,518,992,846.00	1%	Sangat Kurang
356	Kab. Malinau	Rp	103,370,977,368.61	Rp	1,636,382,698,287.00	6%	Sangat Kurang
357	Kab. Nunukan	Rp	111,968,757,895.52	Rp	1,474,080,677,070.00	8%	Sangat Kurang



358	Kab. Bulungan	Rp	126,038,940,770.95	Rp	1,429,739,918,731.00	9%	Sangat Kurang
359	Kota Tarakan	Rp	88,059,263,275.24	Rp	1,226,319,981,718.00	7%	Sangat Kurang
360	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	2,898,704,954,479.94	Rp	1,858,359,631,211.00	156%	Sangat baik
361	Kab. Balangan	Rp	48,888,532,628.55	Rp	634,289,800,624.00	8%	Sangat Kurang
362	Kab. Banjar	Rp	160,159,439,171.31	Rp	1,064,281,553,872.00	15%	Kurang
363	Kab. Barito Kuala	Rp	69,514,695,192.29	Rp	877,291,257,517.00	8%	Sangat Kurang
364	Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp	85,095,560,247.13	Rp	822,890,517,872.00	10%	Sangat Kurang
365	Kab. Hulu Sungai Tengah	Rp	84,411,165,075.25	Rp	802,183,221,254.00	11%	Kurang
366	Kab. Hulu Sungai Utara	Rp	92,003,509,511.35	Rp	769,195,454,181.00	12%	Kurang
367	Kab. Kotabaru	Rp	111,771,791,560.34	Rp	1,158,034,346,547.00	10%	Sangat Kurang
368	Kab. Tabalong	Rp	125,445,851,681.00	Rp	838,842,152,761.00	15%	Kurang
369	Kab. Tanah Bumbu	Rp	118,015,674,952.73	Rp	963,632,196,932.00	12%	Kurang
370	Kab. Tanah Laut	Rp	133,464,861,067.09	Rp	1,007,944,836,084.00	13%	Kurang
371	Kab. Tapin	Rp	55,566,634,310.83	Rp	865,846,318,646.00	6%	Sangat Kurang
372	Kab. Banjarbaru	Rp	93,573,552,710.00	Rp	686,345,263,260.00	14%	Kurang
373	Kota Banjarmasin	Rp	216,427,691,789.61	Rp	1,191,239,516,914.00	18%	Kurang
374	Provinsi Sulawesi Utara	Rp	937,681,926,708.00	Rp	1,383,128,855,889.00	68%	Sangat baik
375	Kab. Bolaang Mongondwo	Rp	32,332,795,327.00	Rp	636,183,539,345.00	5%	Sangat Kurang
376	Kab. Bolaang Mongondwo Selatan	Rp	12,276,185,314.85	Rp	367,939,412,631.00	3%	Sangat Kurang
377	Kab. Bolaang Mongondwo Timur	Rp	10,051,647,462.86	Rp	369,445,672,919.00	3%	Sangat Kurang
378	Kab. Bolaang Mongondwo Utara	Rp	10,283,830,786.00	Rp	385,361,685,507.00	3%	Sangat Kurang
379	Kab. Kepulauan Sangihe	Rp	52,202,324,139.28	Rp	671,902,776,967.00	8%	Sangat Kurang
380	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Rp	20,681,159,632.00	Rp	440,850,797,489.00	5%	Sangat Kurang

381	Kab. Kepulauan Talaud	Rp	22,653,130,445.00	Rp	604,911,860,551.00	4%	Sangat Kurang
382	Kab. Minahasa	Rp	58,778,368,154.51	Rp	845,532,106,780.00	7%	Sangat Kurang
383	Kab. Minahasa Selatan	Rp	26,137,234,620.00	Rp	559,006,861,881.00	5%	Sangat Kurang
384	Kab. Minahasa Tenggara	Rp	14,633,333,049.00	Rp	532,885,931,332.00	3%	Sangat Kurang
385	Kab. Minahasa Utara	Rp	49,283,471,770.00	Rp	556,551,413,835.00	9%	Sangat Kurang
386	Kota Bitung	Rp	83,520,151,103.00	Rp	656,612,029,588.00	13%	Kurang
387	Kota Kotamobagu	Rp	24,664,876,568.00	Rp	452,987,297,155.00	5%	Sangat Kurang
388	Kota Manado	Rp	263,392,316,992.00	Rp	1,064,278,393,926.00	25%	Sedang
389	Kota Tomohon	Rp	20,100,568,636.00	Rp	506,405,974,807.00	4%	Sangat Kurang
390	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp	824,611,352,385.31	Rp	1,239,776,947,097.00	67%	Sangat baik
391	Kab. Banggai	Rp	94,645,183,394.01	Rp	1,103,723,845,850.00	9%	Sangat Kurang
392	Kab. Banggai Kepulauan	Rp	16,015,577,696.74	Rp	469,403,584,789.00	3%	Sangat Kurang
393	kab. Buol	Rp	35,113,223,859.95	Rp	585,772,636,088.00	6%	Sangat Kurang
394	Kab. Donggala	Rp	58,214,324,450.36	Rp	782,814,171,666.00	7%	Sangat Kurang
395	Kab. Morowali	Rp	25,341,127,904.78	Rp	446,987,919,910.00	6%	Sangat Kurang
396	Kab. Parigi Moutong	Rp	76,559,870,443.39	Rp	867,452,574,588.00	9%	Sangat Kurang
397	Kab. Poso	Rp	56,747,822,256.51	Rp	887,355,753,486.00	6%	Sangat Kurang
398	Kab. Sigi	Rp	23,589,608,190.34	Rp	731,440,554,036.00	3%	Sangat Kurang
399	Kab. Tojo Una-Una	Rp	43,985,692,101.60	Rp	655,433,632,848.00	7%	Sangat Kurang
400	Kab. Tolitoli	Rp	47,846,419,986.13	Rp	695,316,708,534.00	7%	Sangat Kurang
401	Kota Palu	Rp	211,275,634,100.51	Rp	922,209,615,092.00	23%	Sedang
402	Kab. Banggai Laut	Rp	6,509,928,485.93	Rp	192,139,784,881.00	3%	Sangat Kurang
403	Kab. Morowali Utara	Rp	40,673,134,304.00	Rp	472,078,378,858.00	9%	Sangat Kurang
404	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp	3,029,122,238,495.78	Rp	2,464,148,133,299.00	123%	Sangat baik
405	Kab. Bantaeng	Rp	43,384,987,346.49	Rp	579,308,953,333.00	7%	Sangat Kurang
406	Kab. Barru	Rp	45,076,356,508.76	Rp	637,524,799,264.51	7%	Sangat Kurang

407	Kab. Bone	Rp	155,427,196,665.96	Rp	1,352,154,495,205.46	11%	Kurang
408	Kab. Bulukumba	Rp	89,616,625,391.16	Rp	946,611,295,510.91	9%	Sangat Kurang
409	Kab. Enrekang	Rp	34,597,091,444.65	Rp	701,511,734,260.18	5%	Sangat Kurang
410	Kab. Gowa	Rp	149,352,694,369.65	Rp	1,958,503,831,033.72	8%	Sangat Kurang
411	Kab. Jeneponto	Rp	46,032,160,889.00	Rp	740,661,341,552.11	6%	Sangat Kurang
412	Kab. Kep. Selayar	Rp	35,602,098,991.01	Rp	628,108,209,558.66	6%	Sangat Kurang
413	Kab. Luwu	Rp	63,945,274,905.56	Rp	853,485,579,117.88	7%	Sangat Kurang
414	Kab. Luwu Timur	Rp	134,350,836,071.47	Rp	306,731,685,559.74	44%	Baik
415	Kab. Luwu Utara	Rp	130,513,142,409.79	Rp	749,237,125,802.09	17%	Kurang
416	Kab. Maros	Rp	116,287,310,132.70	Rp	863,436,465,517.26	13%	Kurang
417	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Rp	129,209,748,612.26	Rp	880,220,670,109.54	15%	Kurang
418	Kab. Pinrang	Rp	93,521,199,626.40	Rp	882,733,682,088.26	11%	Kurang
419	Kab. Sidenreng Rappang	Rp	64,628,526,309.80	Rp	742,083,647,719.41	9%	Sangat Kurang
420	Kab. Sinjai	Rp	45,404,255,704.00	Rp	721,704,581,323.52	6%	Sangat Kurang
421	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-	-
422	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-
423	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-	-
424	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-	-	-
425	Kab. Wajo	Rp	99,680,372,716.71	Rp	986,267,050,883.80	10%	Sangat Kurang
426	Kota Makasar	Rp	730,988,641,340.67	Rp	1,836,090,960,671.36	40%	Cukup
427	Kota Palopo	Rp	81,646,676,135.53	Rp	607,256,402,094.14	13%	Kurang
428	Kota Pare-pare	Rp	112,070,946,227.51	Rp	591,947,511,465.19	19%	Kurang
429	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp	599,942,751,257.23	Rp	1,549,728,926,741.00	39%	Cukup
430	Kab. Bombana	Rp	35,149,036,230.00	Rp	600,594,950,019.00	6%	Sangat Kurang
431	Kab. Buton	Rp	34,468,617,767.36	Rp	856,791,810,911.00	4%	Sangat Kurang

432	Kab. Boton Utara	Rp	11,032,612,736.00	Rp	475,586,192,768.00	2%	Sangat Kurang
433	Kab. Kolaka	Rp	67,736,373,890.18	Rp	701,182,312,649.00	10%	Sangat Kurang
434	Kab. Kolaka Utara	Rp	34,848,369,694.36	Rp	583,042,234,785.00	6%	Sangat Kurang
435	kab. Konawe	Rp	33,215,438,790.82	Rp	813,204,664,536.00	4%	Sangat Kurang
436	kab. Konawe Selatan	Rp	45,766,897,223.00	Rp	819,799,966,946.00	6%	Sangat Kurang
437	kab. Konawe Utara	Rp	10,539,118,920.00	Rp	576,255,282,057.00	2%	Sangat Kurang
438	Kab. Muna	Rp	41,971,593,120.00	Rp	946,987,516,772.00	4%	Sangat Kurang
439	Kab. Wakatobi	Rp	23,357,945,917.00	Rp	533,008,388,729.00	4%	Sangat Kurang
440	Kota Baubau	Rp	54,989,798,633.62	Rp	640,021,950,788.00	9%	Sangat Kurang
441	Kota Kendari	Rp	167,470,392,685.25	Rp	869,595,129,349.00	19%	Kurang
442	Kab. Konawe Kepulauan	Rp	2,562,692,684.00	Rp	118,250,052,580.00	2%	Sangat Kurang
443	Kab. Kolaka Timur	Rp	7,164,639,366.80	Rp	281,725,145,400.00	3%	Sangat Kurang
444	Provinsi Gorontalo	Rp	281,920,210,038.54	Rp	926,615,334,591.00	30%	Sedang
445	Kab. Boalemo	Rp	37,352,461,970.57	Rp	525,334,402,813.00	7%	Sangat Kurang
446	Kab. Bone Bolango	Rp	44,670,045,826.72	Rp	551,156,498,839.00	8%	Sangat Kurang
447	Kab. Gorontalo	Rp	105,365,567,589.29	Rp	811,478,390,357.00	13%	Kurang
448	Kab. Gorontalo Utara	Rp	20,958,450,360.22	Rp	439,299,777,533.00	5%	Sangat Kurang
449	Kab. Pohuwato	Rp	38,888,554,935.92	Rp	582,584,618,231.00	7%	Sangat Kurang
450	Kota Gorontalo	Rp	124,732,780,260.20	Rp	625,743,376,490.00	20%	Kurang
451	Kab. Majene	Rp	53,921,491,920.68	Rp	613,773,112,669.00	9%	Sangat Kurang
452	Kab. Mamasa	Rp	15,447,710,512.89	Rp	571,528,922,845.00	3%	Sangat Kurang
453	Kab. Mamuju	Rp	55,539,367,583.41	Rp	559,802,348,455.00	10%	Sangat Kurang
454	Kab. Mamuju Tengah	Rp	4,226,143,223.40	Rp	219,690,802,401.00	2%	Sangat Kurang
455	Kab. Mamuju Utara	Rp	21,232,571,780.75	Rp	517,113,245,524.00	4%	Sangat Kurang
456	Kab. Polewali Mandar	Rp	96,599,288,473.99	Rp	821,971,346,994.00	12%	Kurang
457	Provinsi Maluku	Rp	425,425,607,781.12	Rp	1,397,385,764,932.00	30%	Sedang

458	Kab. Buru	Rp	15,127,721,029.26	Rp	516,468,957,280.00	3%	Sangat Kurang
459	Kab. Buru Selatan	Rp	11,075,938,022.29	Rp	169,218,168,688.00	7%	Sangat Kurang
460	Kab. Kep. Aru	Rp	10,943,358,500.91	Rp	555,157,975,260.00	2%	Sangat Kurang
461	Kab. Maluku Barat Daya	Rp	15,193,765,673.02	Rp	585,812,195,177.00	3%	Sangat Kurang
462	Kab. Maluku Tengah	Rp	52,677,744,194.82	Rp	1,080,147,960,098.00	5%	Sangat Kurang
463	Kab. Maluku Tenggara	Rp	32,566,078,104.19	Rp	515,961,450,420.00	6%	Sangat Kurang
464	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp	22,590,856,452.75	Rp	664,859,496,620.00	3%	Sangat Kurang
465	Kota Tual	Rp	16,562,973,939.59	Rp	357,345,348,883.00	5%	Sangat Kurang
466	Provinsi Maluku Utara	Rp	203,059,697,909.92	Rp	1,254,013,359,801.00	16%	Kurang
467	Kab. Halmahera Barat	Rp	18,657,849,526.88	Rp	560,540,840,392.00	3%	Sangat Kurang
468	Kab. Halmahera Selatan	Rp	28,651,193,407.35	Rp	700,561,794,203.00	4%	Sangat Kurang
469	Kab. Halmahera Tengah	Rp	17,275,993,754.20	Rp	534,408,467,345.00	3%	Sangat Kurang
470	Kab. Halmahera Timur	Rp	28,579,935,680.43	Rp	571,845,461,772.00	5%	Sangat Kurang
471	Kab. Halmahera Utara	Rp	115,814,255,742.65	Rp	612,511,692,634.00	19%	Kurang
472	Kab. Kepulauan Sula	Rp	12,126,425.75	Rp	487,130,395,718.00	0.0025%	Sangat Kurang
473	Kab. Pulau Morotai	Rp	5,425,533,354.66	Rp	441,226,036,427.00	1%	Sangat Kurang
474	Kota Ternate	Rp	57,765,211,341.94	Rp	715,145,649,036.00	8%	Sangat Kurang
475	Kota Tidore Kepulauan	Rp	27,672,173,876.51	Rp	624,052,811,640.00	4%	Sangat Kurang
476	Kab. Pulau Taliabu	Rp	1,361,510,287.00	Rp	164,126,853,351.00	1%	Sangat Kurang
477	Provinsi Papua	Rp	944,929,691,841.00	Rp	9,420,883,556,686.00	10%	Sangat Kurang
478	Kab. Asmat	Rp	63,263,054,027.00	Rp	959,895,988,928.00	7%	Sangat Kurang
479	Kab. Jayapura	Rp	80,133,491,088.00	Rp	923,530,761,676.00	9%	Sangat Kurang
480	Kab. Jayawijaya	Rp	62,533,965,367.00	Rp	964,536,986,315.00	6%	Sangat Kurang
481	Kab. Kep. Yapen	Rp	32,813,904,747.75	Rp	600,704,023,283.00	5%	Sangat Kurang
482	Kab. Lanny Jaya	Rp	15,650,634,895.00	Rp	933,007,951,058.00	2%	Sangat Kurang

483	Kab. Mappi	Rp	14,137,545,842.00	Rp	976,119,446,336.00	1%	Sangat Kurang
484	Kab. Merauke	Rp	139,260,614,709.99	Rp	1,683,000,695,422.00	8%	Sangat Kurang
485	Kab. Mimika	Rp	202,193,722,109.39	Rp	1,540,314,657,757.00	13%	Kurang
486	Kab. Nabire	Rp	45,605,269,508.00	Rp	1,006,859,356,216.00	5%	Sangat Kurang
487	Kab. Paniai	Rp	19,898,695,578.00	Rp	783,803,310,239.00	3%	Sangat Kurang
488	Kab. Puncak Jaya	Rp	15,193,433,996.00	Rp	952,826,693,981.00	2%	Sangat Kurang
489	Kab. Yahukimo	Rp	17,725,673,199.00	Rp	885,794,413,731.00	2%	Sangat Kurang
490	Kab. Yalimo	Rp	24,813,245,609.00	Rp	851,139,133,727.00	3%	Sangat Kurang
491	Kab. Jayapura	Rp	147,103,021,595.00	Rp	901,862,316,516.00	16%	Kurang
492	Provinsi Papua Barat	Rp	306,674,697,583.22	Rp	5,455,673,503,923.00	6%	Sangat Kurang
493	Kab. Fakfak	Rp	48,737,896,937.22	Rp	944,167,330,041.00	5%	Sangat Kurang
494	Kab. Kaimana	Rp	28,602,411,363.39	Rp	905,348,148,982.00	3%	Sangat Kurang
495	Kab. Manokwari	Rp	7,030,318,058.45	Rp	772,560,276,622.00	1%	Sangat Kurang
496	Kab. Maybrat	Rp	10,912,089,263.00	Rp	655,001,426,063.00	2%	Sangat Kurang
497	Kab. Raja Ampat	Rp	24,143,800,383.60	Rp	915,062,158,551.00	3%	Sangat Kurang
498	Kab. Sorong	Rp	81,814,439,402.00	Rp	1,167,674,435,702.00	7%	Sangat Kurang
499	Kab. Sorong Selatan	Rp	26,804,190,427.00	Rp	666,625,249,589.00	4%	Sangat Kurang
500	Kab. Tambrauw	Rp	2,676,933,393.00	Rp	735,744,889,165.00	0%	Sangat Kurang
501	Kab. Teluk Bintuni	Rp	48,303,120,607.98	Rp	1,458,443,859,222.00	3%	Sangat Kurang
502	Kab. Teluk Wondama	Rp	14,345,589,687.00	Rp	629,614,819,815.00	2%	Sangat Kurang
503	Kota Sorong	Rp	103,975,954,791.00	Rp	767,492,164,105.00	14%	Kurang

**LAMPIRAN I. ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2014**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI  
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2014

**ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Barat	3.000.000.000
2	Provinsi Kepulauan Riau	3.000.000.000
3	Provinsi Jambi	19.650.584.000
4	Provinsi Bengkulu	2.000.000.000
5	Provinsi Lampung	2.000.000.000
6	Provinsi Jawa Barat	3.000.000.000
7	Provinsi Jawa Tengah	3.000.000.000
8	Provinsi DI Yogyakarta	20.056.006.000
9	Provinsi Jawa Timur	22.249.995.000
10	Provinsi Sulawesi Utara	19.563.185.000
11	Provinsi Sulawesi Tengah	19.218.244.000
12	Provinsi Sulawesi Selatan	19.041.986.000
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.000.000.000
14	Kab. Aceh Besar	3.000.000.000
15	Kota Banda Aceh	24.281.447.000
16	Kota Sabang	3.000.000.000
17	Kab. Nagan Raya	3.000.000.000
18	Kota Subulussalam	3.000.000.000
19	Kab. Humbang Hasundutan	3.000.000.000
20	Kab. Tanah Datar	3.000.000.000
21	Kota Solok	3.000.000.000
22	Kab. Siak	22.587.378.000
23	Kab. Bintan	3.000.000.000
24	Kab. Karimun	23.444.300.000
25	Kota Batam	23.762.476.000
26	Kab. Batanghari	3.000.000.000
27	Kab. Muaro Jambi	3.000.000.000
28	Kota Palembang	22.858.970.000
29	Kota Lubuk Linggau	2.000.000.000
30	Kab. Banyuasin	3.000.000.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
31	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.000.000.000
32	Kab. Bangka	3.000.000.000
33	Kab. Bangka Tengah	23.137.882.000
34	Kab. Kaur	2.000.000.000
35	Kab. Lebong	2.000.000.000
36	Kab. Bengkulu Tengah	2.000.000.000
37	Kab. Lampung Barat	3.000.000.000
38	Kab. Lampung Tengah	23.326.051.000
39	Kab. Way Kanan	3.000.000.000
40	Kota Bandar Lampung	26.273.764.000
41	Kota Metro	3.000.000.000
42	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000.000
43	Kota Depok	22.197.377.000
44	Kab. Serang	3.000.000.000
45	Kab. Tangerang	3.000.000.000
46	Kota Tangerang	3.000.000.000
47	Kota Serang	19.306.571.000
48	Kota Tangerang Selatan	25.270.927.000
49	Kab. Banyumas	3.000.000.000
50	Kab. Boyolali	3.000.000.000
51	Kab. Jepara	22.253.216.000
52	Kab. Karanganyar	18.935.183.000
53	Kab. Kebumen	21.867.375.000
54	Kab. Purworejo	3.000.000.000
55	Kab. Semarang	3.000.000.000
56	Kab. Temanggung	3.000.000.000
57	Kota Surakarta	24.840.490.000
58	Kab. Bantul	24.700.344.000
59	Kab. Sleman	25.878.507.000
60	Kota Yogyakarta	24.187.647.000





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
61	Kab. Bangkalan	22.112.413.000
62	Kab. Bondowoso	24.939.392.000
63	Kab. Gresik	21.136.997.000
64	Kab. Jember	3.000.000.000
65	Kab. Lamongan	20.407.073.000
66	Kab. Tulungagung	25.208.955.000
67	Kota Malang	27.655.721.000
68	Kota Mojokerto	23.161.017.000
69	Kota Probolinggo	21.943.361.000
70	Kota Surabaya	23.629.261.000
71	Kab. Sintang	3.000.000.000
72	Kota Pontianak	23.352.481.000
73	Kota Bitung	23.746.633.000
74	Kab. Gorontalo	3.000.000.000
75	Kab. Banggai	22.655.766.000
76	Kab. Donggala	25.156.543.000
77	Kab. Morowali	3.000.000.000
78	Kab. Poso	22.317.301.000
79	Kota Palu	27.588.057.000
80	Kab. Tojo Una Una	22.625.623.000
81	Kab. Sigi	3.000.000.000
82	Kab. Bulukumba	22.829.854.000
83	Kab. Enrekang	19.225.406.000
84	Kab. Gowa	3.000.000.000
85	Kab. Maros	21.883.191.000
86	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.191.245.000
87	Kab. Pinrang	26.687.187.000
88	Kab. Wajo	22.579.561.000
89	Kab. Luwu Timur	22.270.516.000
90	Kab. Mamuju	2.000.000.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
91	Kab. Buton	21.301.307.000
92	Kab. Konawe	19.508.469.000
93	Kab. Kolaka	19.341.246.000
94	Kab. Bombana	20.575.030.000
95	Kab. Badung	23.311.379.000
96	Kab. Gianyar	19.943.276.000
97	Kota Denpasar	22.763.285.000
98	Kab. Lombok Tengah	22.809.994.000
99	Kab. Sumbawa	22.052.555.000
	Total Provinsi	138.780.000.000,00
	Total Kabupaten/ Kota	1.249.020.000.000,00
	Total Nasional	1.387.800.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

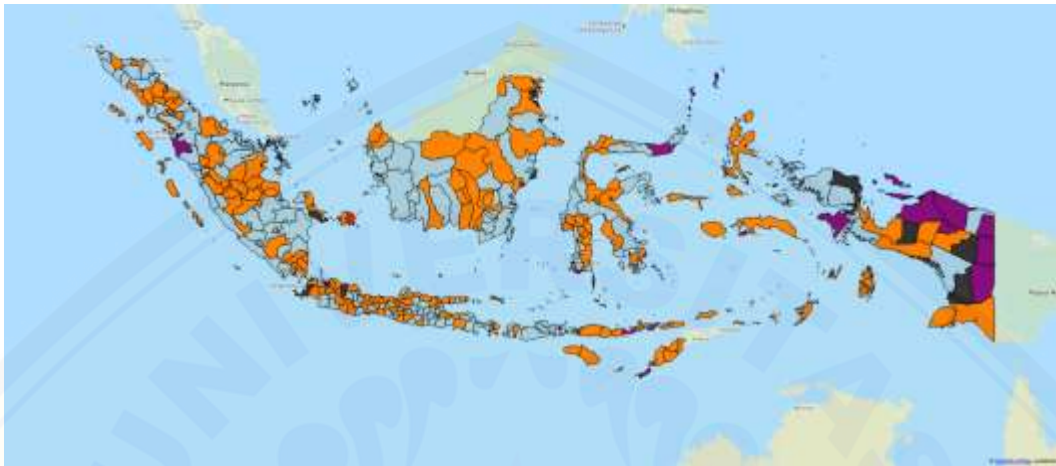
MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

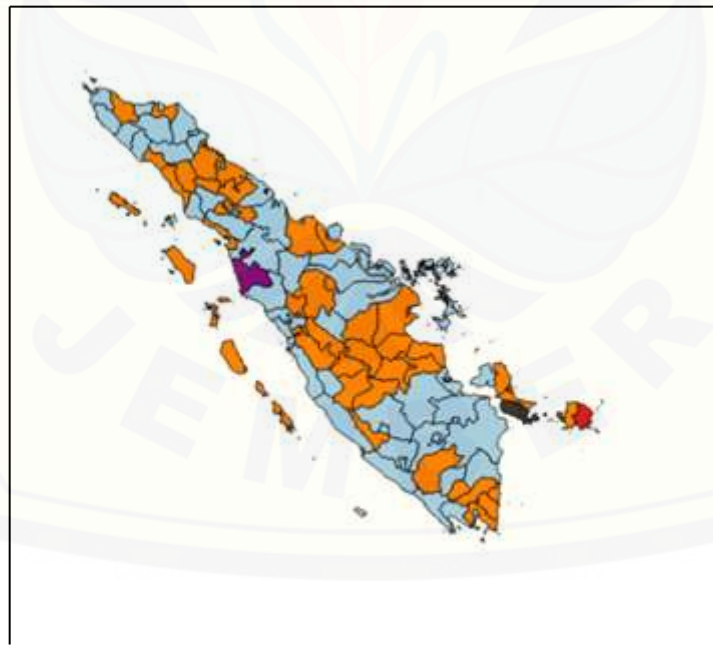
GIARTO  
NIP 195904201984021001

## LAMPIRAN J. PEMETAAN OPINI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

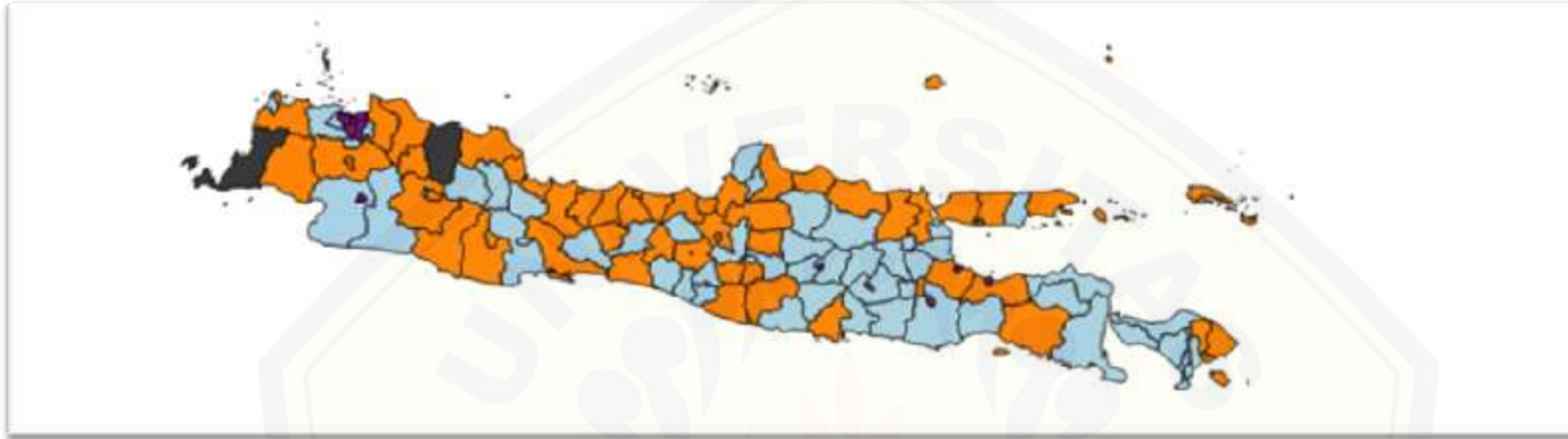


Gambar 1. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Indonesia

Pemetaan diatas merupakan secara keseluruhan, berikut detail pemetaan opini kabupaten dan kota tiap pulau :



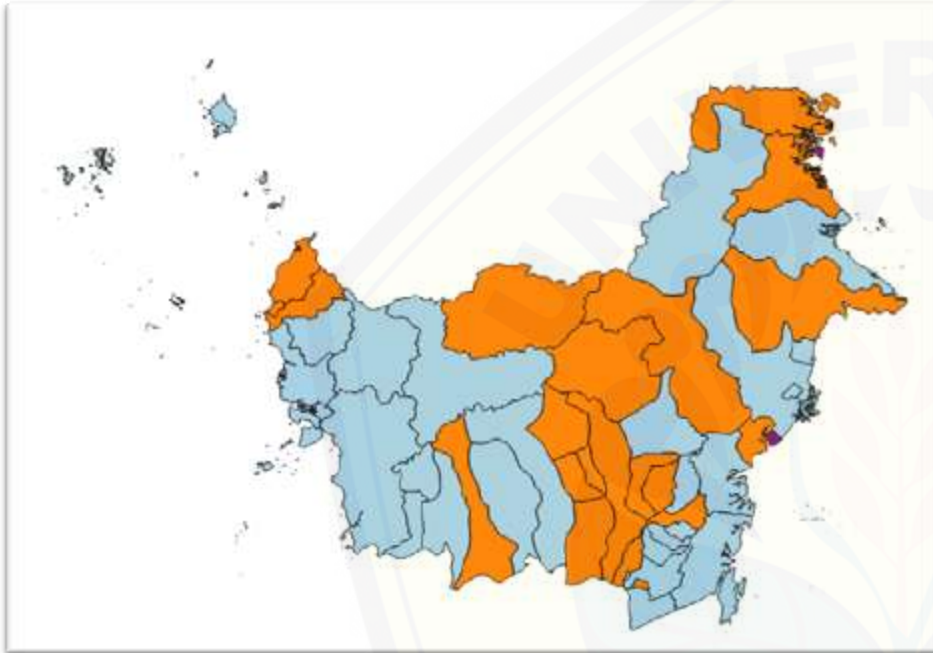
Gambar 2. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera



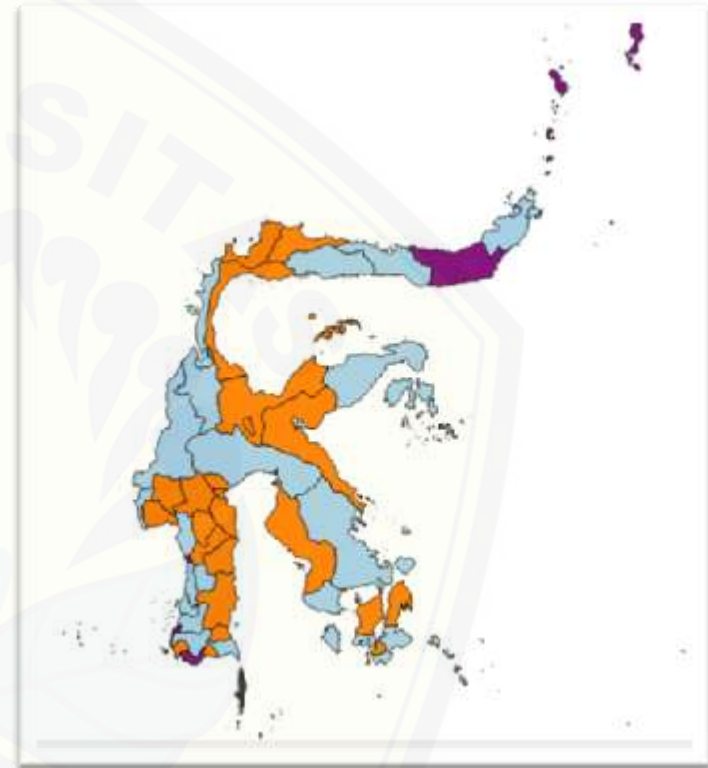
Gambar 3. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali



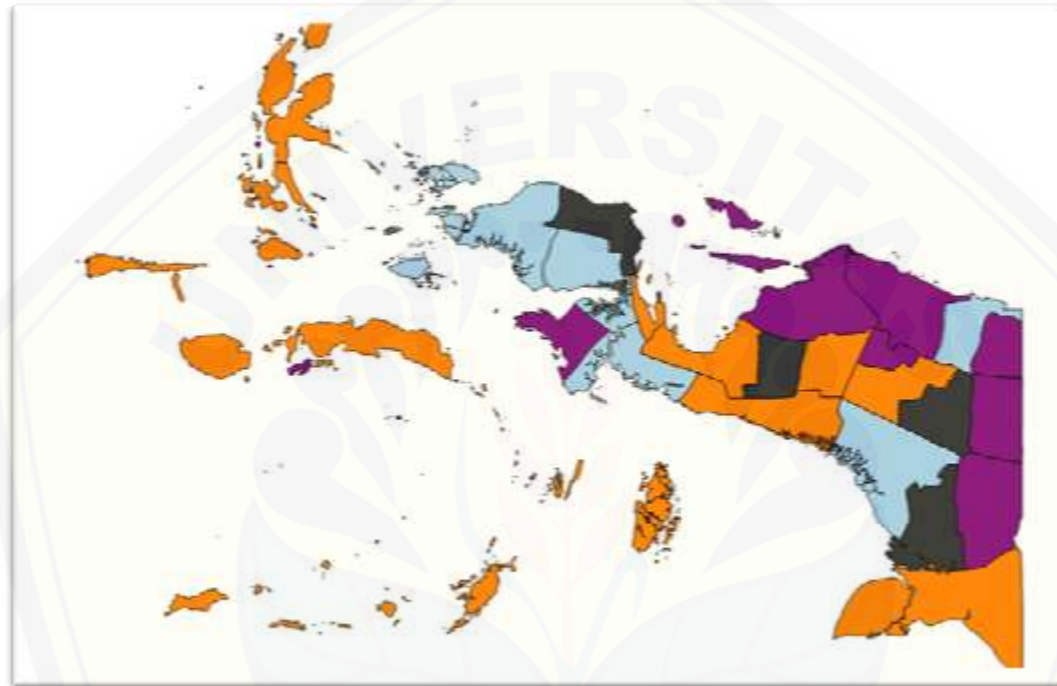
Gambar 4. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Nusa Tenggara



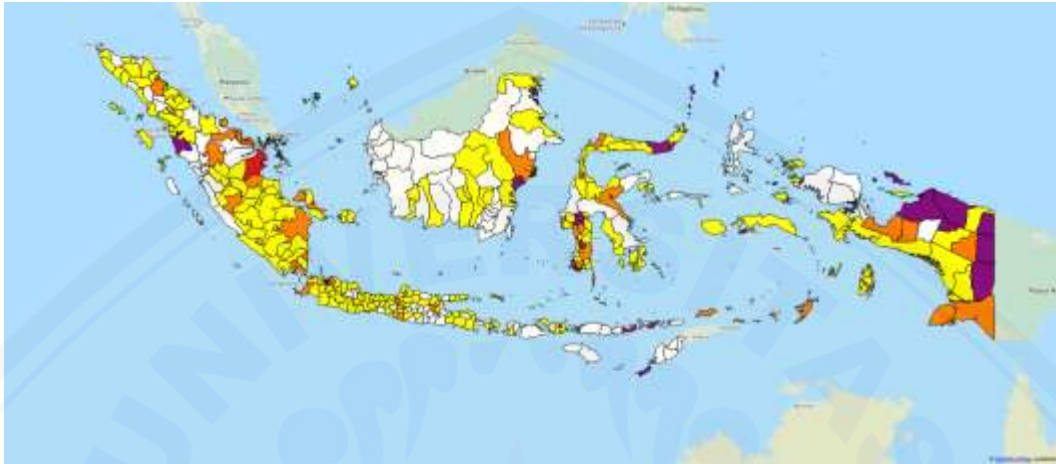
Gambar 5. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan



Gambar 6. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi

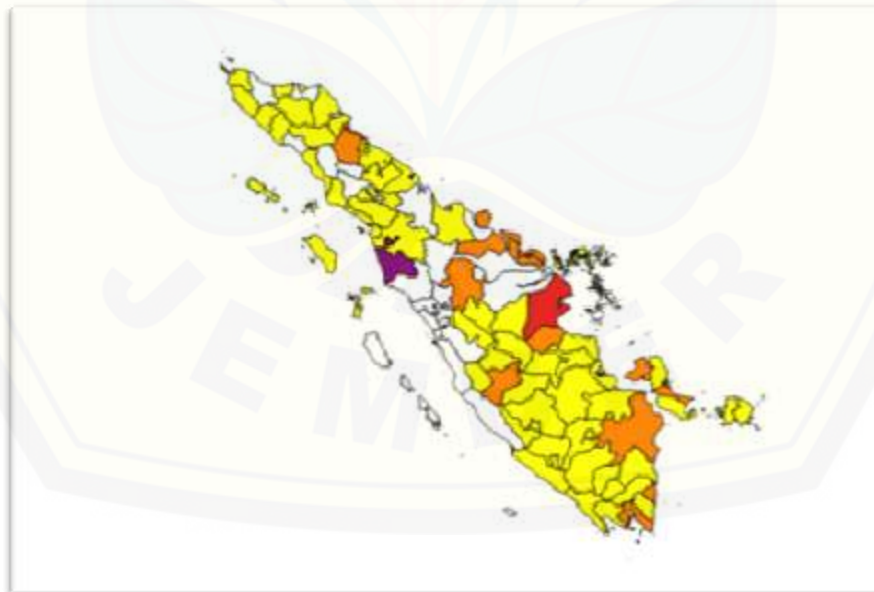


Gambar 7. Pemetaan Opini Kabupaten/Kota di Pulau Papua dan Maluku

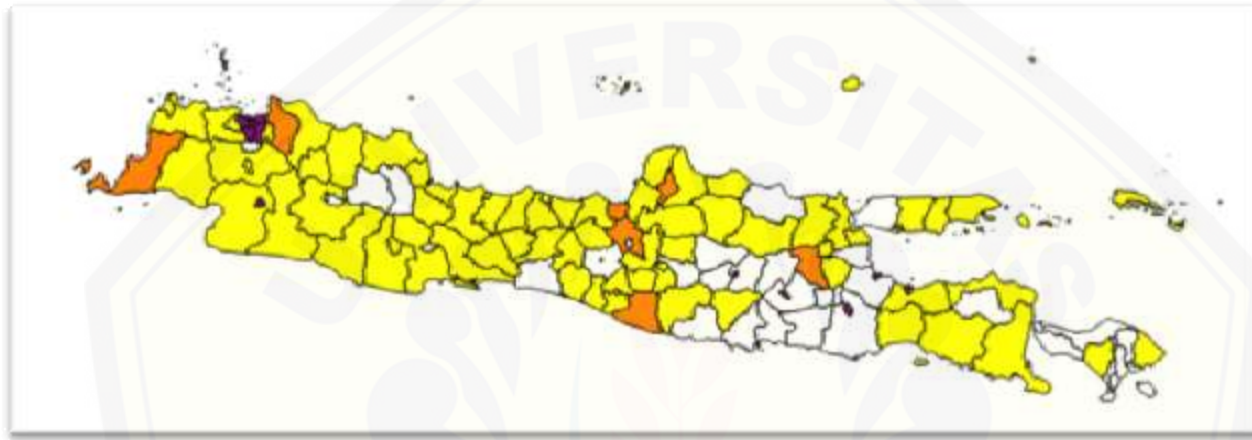
**LAMPIRAN K. PEMETAAN TEMUAN BPK RI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Gambar 7. Pemetaan Temuan BPK RI untuk Kabupaten/Kota di Indonesia

Pemetaan diatas merupakan secara keseluruhan, berikut detail pemetaan temuan BPK RI atas kabupaten dan kota tiap pulau :



Gambar 8. Pemetaan Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

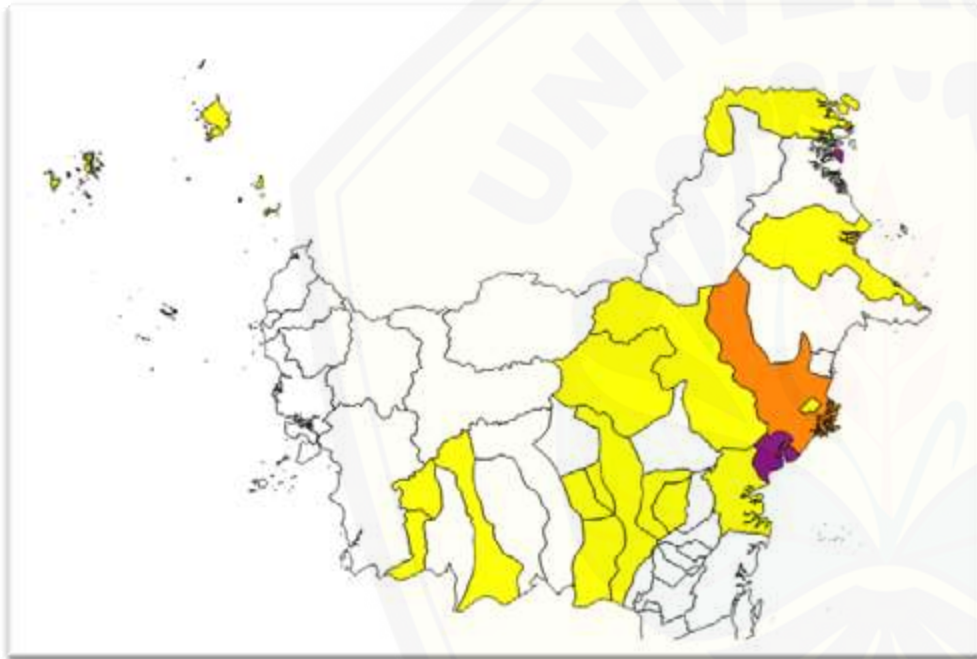


Gambar 9. Pemetaan Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali

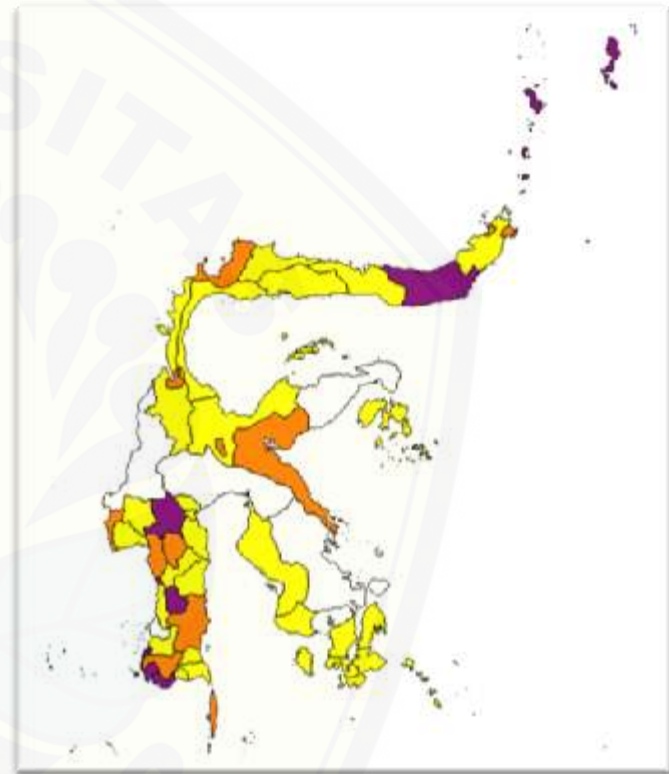


Gambar 10. Pemetaan Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Pulau Nusa Tenggara

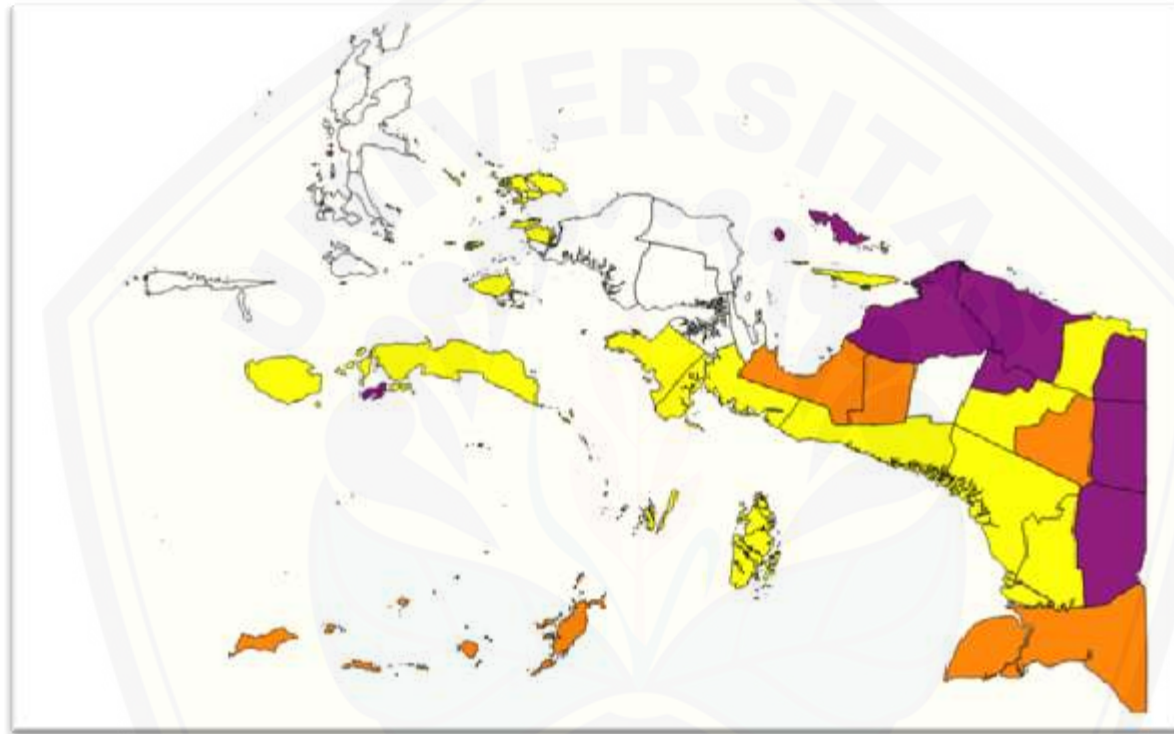




Gambar 11. Pemetaan Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan



Gambar 12. Pemetaan Temuan BPK RI Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi



Gambar 13. Pemetaan Temuan BPK RI  
Kabupaten/Kota di Pulau Papua dan

**LAMPIRAN L. PEMETAAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

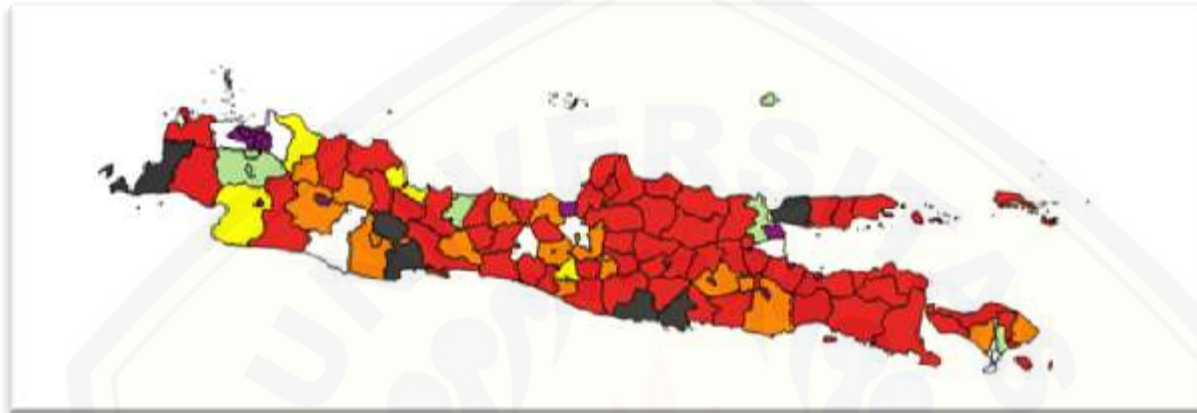


Gambar 14. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Pemetaan diatas merupakan secara keseluruhan, berikut detail pemetaan kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota tiap pulau :



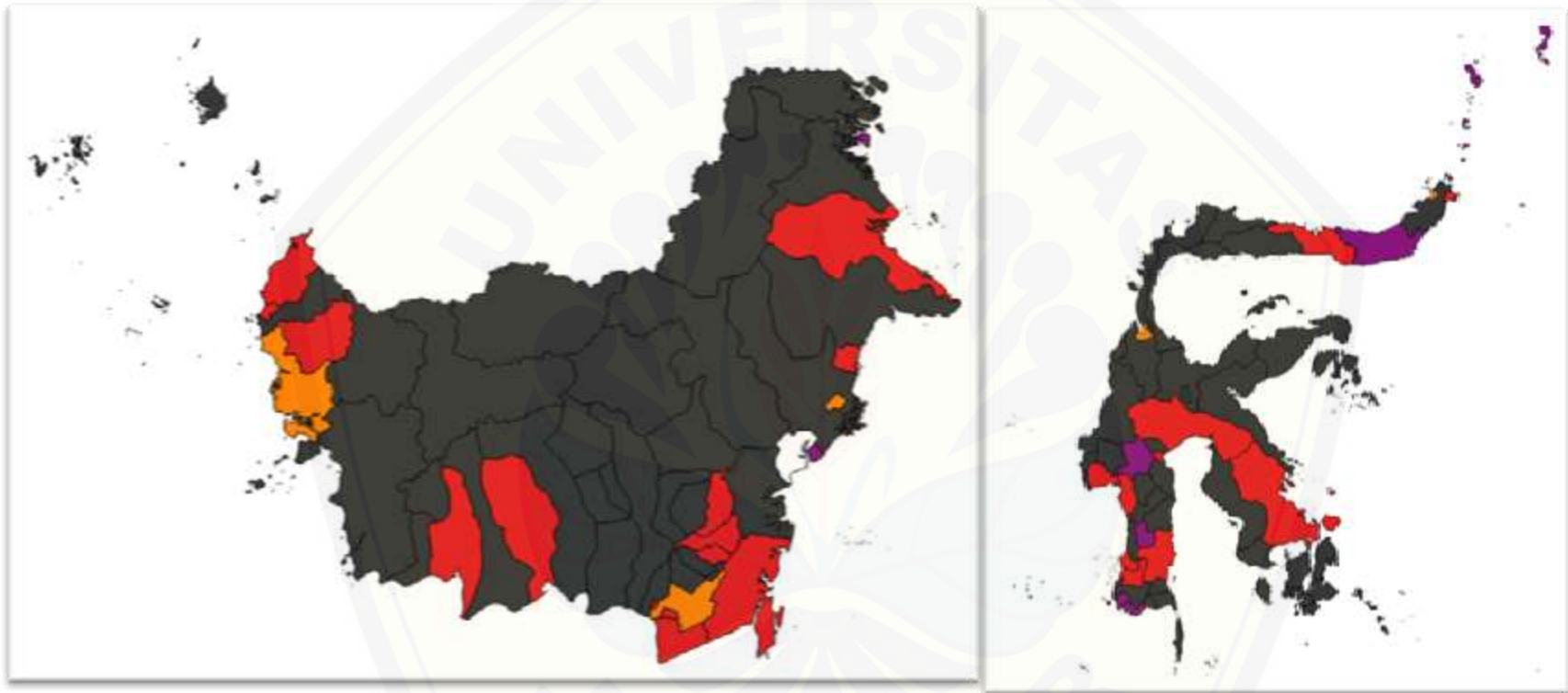
Gambar 15. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan



Gambar 16. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali

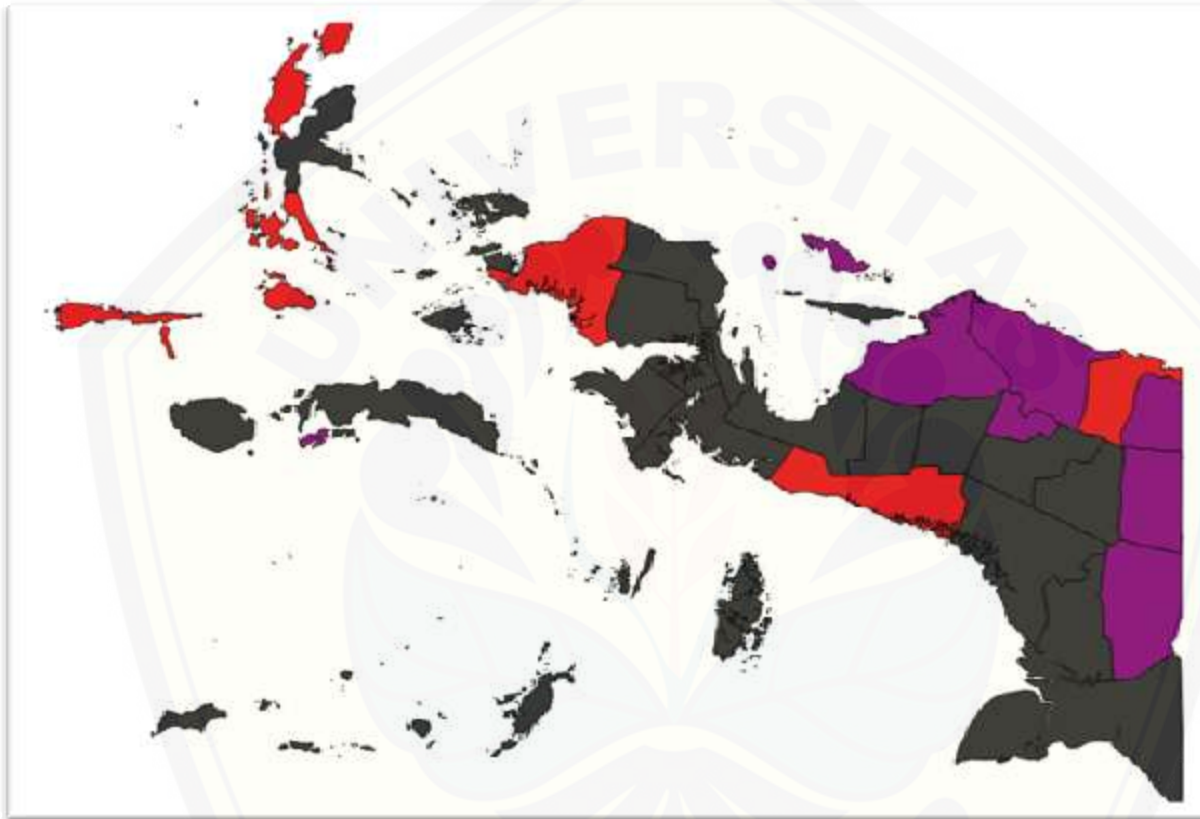


Gambar 17. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Nusa Tenggara



Gambar 18. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

Gambar 19. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi



Gambar 20. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Papua dan Maluku

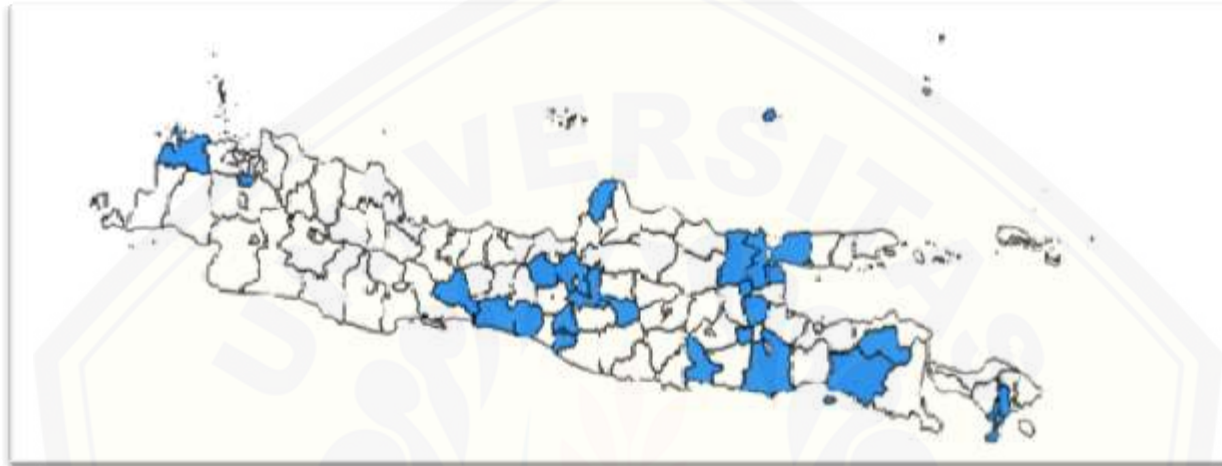
**LAMPIRAN M. PEMETAAN DID KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Gambar 21. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Indonesia

Pemetaan diatas merupakan secara keseluruhan, berikut detail pemetaan DID kabupaten dan kota tiap pulau :



Gambar 22. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

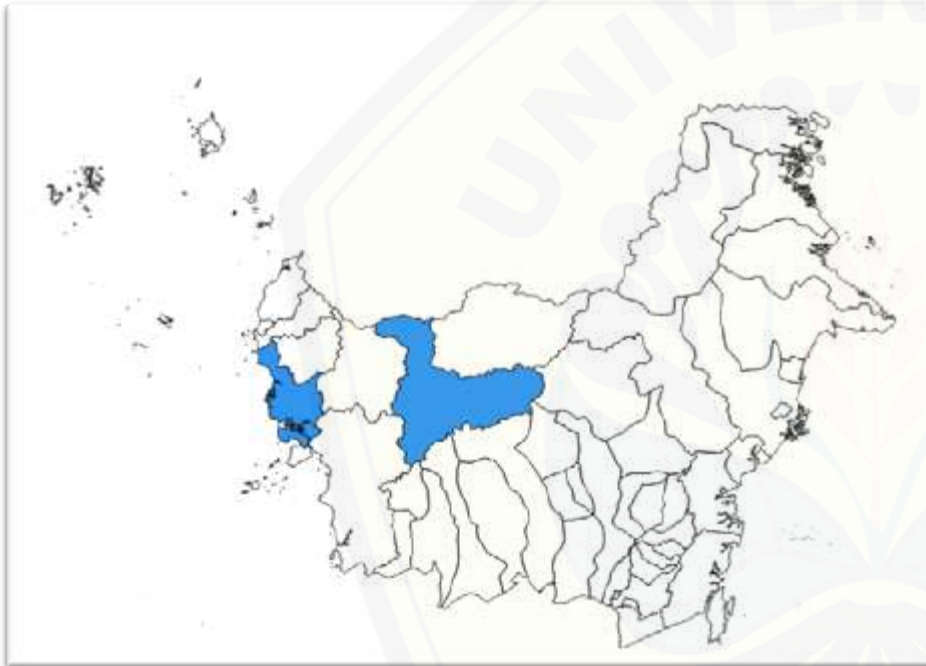


Gambar 23. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali

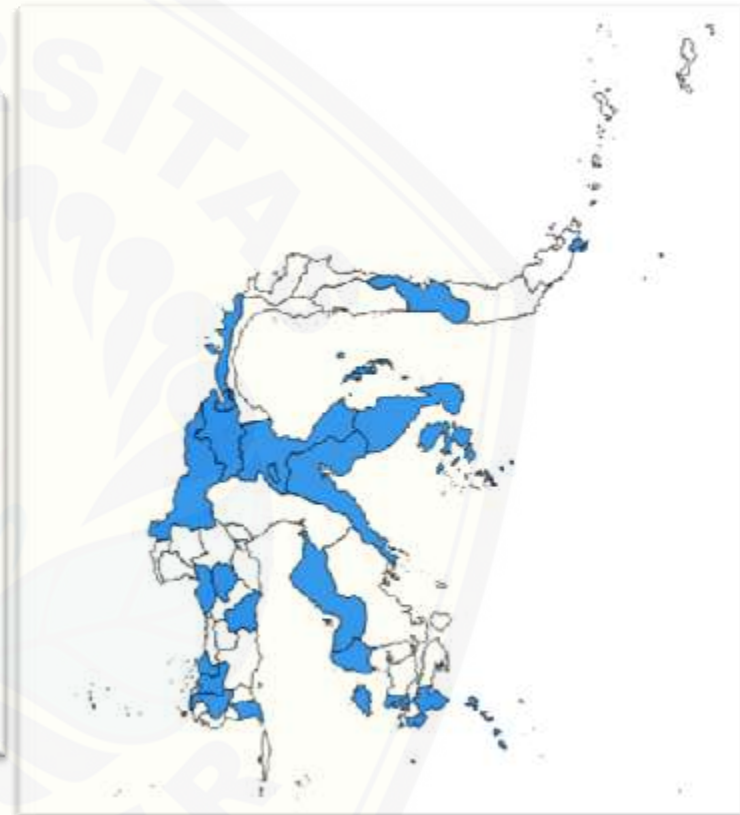


Gambar 24. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Nusa Tenggara





Gambar 25. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan



Gambar 26. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi



Gambar 27. Pemetaan DID Kabupaten/Kota di Pulau Papua dan Maluku

